

**SETIAP KEJADIAN
ADALAH PELAJARAN**

Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SETIAP KEJADIAN ADALAH PELAJARAN

Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag
Grad.Dip.SEA
M.Phil, Ph.D

Penerbit

2022

Judul Buku

SETIAP KEJADIAN ADALAH PELAJARAN
Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya

Penulis : Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

Korektor : Misni Parjiati
Perancang Sampul : M. Rizal Abdi
Perwajahan Isi : Tri Noviana

xviii + 460 hlm
14,5cm x 21cm

Cetakan Pertama, Oktober 2022
ISBN : 978-623-88200-1-6

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Penerbit Gading Publishing
Jl. Pura No 203 Sorowajan Baru Yogyakarta

www.gadingpublishing.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi ~ v

Kata Pengantar Penulis ~ ix

Bagian Satu ~ 1

Setiap Kejadian adalah Pelajaran: Perspektif Pendidikan Perubahan ~ 3

- ❑ Dari *Change Driver* Menuju *Change Victor* ~ 6
- ❑ Pendidikan Perubahan ~ 11
- ❑ *Experiential Learning* dan *Leaftheprinces* ~ 16
- ❑ Memaknai Setiap Kejadian ~ 21

Bagian Dua ~ 27

Kebijakan dan Praktik Pendidikan Lintas Budaya ~ 29

- ❑ *Look, Learn, and Practice: Strategi Pendidikan Tanggap Bencana* ~ 35
- ❑ Kutipan yang Menjadi Karakter Sekolah ~ 43
- ❑ Kebijakan Pro-Madrasah ~ 51
- ❑ Madrasah dan Sekolah Adalah Sama ~ 57
- ❑ Jaringan Alumni, Aset Lembaga ~ 63
- ❑ Pendidikan dan Tantangan Brain Drain ~ 71
- ❑ Volunterisme Pendidikan ~ 77
- ❑ *Academical Village* ~ 83
- ❑ Orang Tua, Jangan Telat Mengajarkan Moral! ~ 91
- ❑ Dilema Pendidikan di Kota Perbatasan ~ 107
- ❑ Bersyukur Itu Menjaga Tradisi ~ 115

- ❑ Ekosistem Sosial Ekonomi, Prasyarat Pendidikan Vokasi ~ 123
- ❑ Sekolah Integrasi; Inklusi Yes, Vokasi Oke ~ 131

Bagian Tiga ~ 139

Eksperimentasi Sosial Ekonomi Lintas Budaya ~ 141

- ❑ *Hubbul Wathon* di Negeri Zindabad ~ 147
- ❑ Individualisme No, Kolektivisme Yes ~ 159
- ❑ Madrasah Perdamaian ~ 165
- ❑ Mengubah Dunia Dari Coady ~ 171
- ❑ Pembelajaran Kepemimpinan Sosial ~ 177
- ❑ Indonesia, “Bahasa Kedua” di Saudi ~ 185
- ❑ Seni Bertahan Hidup ~ 191
- ❑ Makna Besar di Balik Aksi Kecil ~ 199
- ❑ Berlatih Kesabaran ~ 207
- ❑ Membangun Pemahaman, Merenda Masa Depan ~ 215
- ❑ Bos Tionghoa yang Berjiwa Melayani ~ 221
- ❑ Keluarga, Pilar Antiterorisme ~ 227
- ❑ Simbol Kebersamaan Melawan Terorisme ~ 241
- ❑ Sukses yang Berbuah Volunterisme ~ 247
- ❑ Pengembangan Ekonomi Desa dengan Nilai Tambah ~ 253
- ❑ Ekonomi Berbasis Masjid ~ 259

Bagian Empat ~ 265

Praktik Agama Lintas Budaya ~ 267

- ❑ Islam di Mata Warga Kanada ~ 273
- ❑ Negara Sekuler di Mata Warga Muslim ~ 279
- ❑ Hajinya Kaum Minoritas ~ 285
- ❑ Tirulah Muslim Indonesia ~ 291
- ❑ Dzikir Bosniak Pengikut Naqsyabandiyah ~ 297

- ❑ Altruisme-Volunterisme ala Pemuda Muslim di Barat ~ 307
- ❑ Ancaman Dakwah Salafi-Wahabi ~ 315
- ❑ Menjaga Kerapian Masjid dan Kekhusyukan Ibadah ~ 323
- ❑ Islam di Tengah Toleransi ~ 329
- ❑ Umrah Pembelajaran ~ 337
- ❑ Model Hubungan antar Agama ~ 343
- ❑ Tradisi Serupa, Lestarian Ziarah ~ 353
- ❑ Akar Tradisi Islam Kazakhstan ~ 359
- ❑ Wajah Mikro Islam di Tiongkok ~ 375
- ❑ Para Penjaga Tradisi Volunterisme ~ 381
- ❑ Peradaban Maju Yang Terus Terbarukan ~ 389
- ❑ Mendakwahkan Agama di Ruang Publik ~ 395

Bagian Lima ~ 405

Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya:

Merespons Perubahan, Mengarifi Perbedaan ~ 403

- ❑ Pengetahuan, Pengalaman, dan Pemaknaan: Konsep Dasar ~ 406
- ❑ *"It's Just Different"*: Basis Konseptual Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya ~ 416
- ❑ Memahami Yang Berbeda: Peran Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya ~ 423

Daftar Pustaka ~ 439

Catatan Biografi Penulis oleh Media ~ 449

- ❑ Kisah Inspiratif, Anak Penjual Petis Dilantik Jadi Rektor UINSA Surabaya ~ 451
- ❑ Prof. Akh. Muzakki: Jangan Tunduk pada Kemiskinan ~ 455

KATA PENGANTAR PENULIS

Sosiologi Pendidikan merupakan disiplin keilmuan yang mengintegrasikan bidang ilmu sosiologi dan pendidikan. Ilmu yang disebut pertama berperan sebagai piranti teoretik yang digunakan untuk membaca fenomena dan kecenderungan di balik kebijakan dan praktik pendidikan yang berada di tengah masyarakat, sedangkan ilmu yang disebut kedua menjadi subjek pengkajian partikular dari kerja operasional ilmu yang disebut pertama. Satu sisi, Sosiologi Pendidikan menjadikan kajian sosiologi memiliki nilai praktis dan terapan yang konkret sebagai disiplin keilmuan yang berguna untuk membantu dunia pendidikan memahami dan memaknai dirinya. Sisi lainnya, Sosiologi Pendidikan menjadikan pendidikan, baik sebagai bidang ilmu maupun praktik hidup, menyadari bahwa keberadaannya bukanlah entitas yang eksklusif, melainkan terpadu dengan dan sekaligus membutuhkan piranti keilmuan lain dalam mengembangkan diri melalui konsep pemahaman dan pemaknaan lanjutannya.

Banyak kajian telah dilahirkan untuk memperkuat kajian Sosiologi Pendidikan,¹ tetapi sangat sedikit—untuk

¹ Lihat sejumlah contoh kajian penting seperti: P. W. Musgrave, *The Sociology of Education* (London: Routledge, 2017); David B. Bills, *The Sociology of Education and Work* (Oxford, England: Blackwell Publishing, 2004); Scott Davies dan Neil Guppy, *The Schooled Society: An Introduction to the Sociology of Education*, Edisi 2 (Oxford; New York: Oxford University Press, 2010); Maureen T. Hallinan (ed.), *Handbook of the Sociology of Education* (New York: Springer, 2000); Rob Moore and Michael Young, "Knowledge and the Curriculum in the Sociology of Education: Towards a

tidak mengatakan sulit—ditemukan kajian akademik yang menyediakan ruang yang cukup leluasa bagi Sosiologi Pendidikan untuk melihat kekhasan dan partikularitas, bahkan irisan yang dapat dan atau mungkin muncul dari fenomena dan kecenderungan baru di balik kebijakan dan praktik pendidikan yang berada di tengah masyarakat lintas budaya, apakah di dalam cakupan sebuah negara-bangsa ataupun lintas negara.² Padahal, kebutuhan terhadap pergerakan Sosiologi Pendidikan yang mampu membaca, memahami dan memaknai fenomena dan kecenderungan baru pendidikan itu semakin hari semakin tinggi, terutama di tengah menguatnya globalisasi yang membuat semua gugus sosial di belahan dunia mana pun terhubung satu sama lain pada satu sisi dan mengalami berbagai perkembangan baru pada sisi lain, mulai dari homogenisasi (gerak penyeragaman), heterogenisasi (gerak penganekaragaman) hingga hibridisasi (gerak pemaduan).³ Untuk itulah, dibutuhkan Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya (*Sociology of Education Across Cultures*) sebagai respons terhadap

Reconceptualisation,” *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 22, No. 4 (2001): hlm. 445–461. doi:10.1080/01425690120094421; Scott Davies, “Leaps of Faith: Shifting Currents in Critical Sociology of Education,” *American Journal of Sociology*, Vol. 100, No. 6 (May 1995): hlm. 1448-1478; Ronald G. Sultana, “Transition Education, Student Contestation, and the Production of Meaning: Possibilities and Limitations of Resistance Theories,” *British Journal of Sociology of Education*, vol. 10, no. 3 (1989): hlm. 287-309; Martyn Hammersley, “From Ethnography to Theory: A Programme and Paradigm in the Sociology of Education,” *Sociology*, Vol. 19, No. 2 (1985): hlm. 244–259. doi:10.1177/0038038585019002007.

² Terdapat sejumlah kajian Sosiologi Pendidikan yang telah menghadirkan pengkajian atas fenomena atau praktik partikular pendidikan di sebuah gugus masyarakat atau negara tetapi mereka tidak sampai mengkaji secara lintas budaya fenomena dan atau praktik pendidikan dimaksud. Lihat, sebagai misal, Michael W. Apple, “Power, Meaning and Identity: Critical Sociology of Education in the United States,” *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 17, No. 2 (1996): hlm. 125–144. doi:10.1080/0142569960170201; Kenneth Blakemore dan Brian Cooksey, *A Sociology of Education for Africa* (London: Routledge, 2017).

³ Marwan M. Kraidy, *Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization* (Philadelphia: Temple University Press, 2005), 20–21 dan 39–45.

tuntutan, keperluan dan tantangan dimaksud.

Buku ini disusun dalam kerangka membangun konsep dasar dari Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya di atas. Pendidikan dalam kaitan ini dimaknai tidak saja dalam pengertian sempit sebagai upaya sistematis yang disengaja untuk menurunkan dan atau mentransfer nilai (*transfer of values*) dari satu generasi ke generasi berikutnya—sebagaimana jamak ditemukan dalam literatur ilmu pendidikan,⁴ melainkan juga diperluas ke dalam berbagai aspek dan praktik hidup individu dan masyarakat yang memiliki nilai edukatif bagi pengembangan kemuliaan diri (*personal development*) dan kemaslahatan bersama (*common goods*) menuju kebajikan hidup bersama yang lebih besar (*the greater good of society*).⁵ Jadi, buku ini beserta konsep Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya yang dikembangkan di dalamnya memaknai pendidikan melampaui cakupan pemaknaan konvensional yang selama ini berkembang yang menjadikan aktivitas alih nilai secara sistematis dan disengaja sebagai limitasinya.

Seperti lama menjadi diskurus dalam ilmu pendidikan, ada dua istilah yang dibedakan, *action* (tindakan) dan *event* (kejadian). Istilah *action* menunjuk kepada sesuatu yang sengaja dilakukan (*something done*) dan karena itu terikat dengan penilaian dan kewajiban moral, yakni bukan sekadar sukarela (*not just voluntary*) melainkan pilihan yang disengaja (*free*), dan bukan hanya diderek oleh kepentingan tertentu (*not*

⁴ Lihat, sebagai contoh, Tom Martinek dan Okseon Lee, "From Community Gyms to Classrooms: A Framework for Values-Transfer in Schools," *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, vol. 83, no. 1 (Januari 2012): hlm. 33–51. doi:10.1080/07303084.2012.1059870; Halit Karatay, "Transfer of Values in the Turkish and Western Children's Literary Works: Character Education in Turkey," *Educational Research and Reviews*, vol. 6, no. 6 (Juni 2011): hlm. 472–480.

⁵ Neil O. Houser, "Negotiating Dissonance and Safety for the Common Good: Social Education in the Elementary Classroom," *Theory & Research in Social Education*, vol. 24, no. 3, (1996): hlm. 294–312. doi:10.1080/00933104.1996.10505780.

just goal-directed) melainkan dilandasi oleh niat kuat-mendasar (*intentional*). Adapun istilah *event* merujuk kepada sesuatu yang begitu terjadi saja (*something that merely happens*) tanpa ada unsur kesengajaan kuat di dalamnya yang melahirkannya. Sebagai konsekuensinya, berbeda dengan yang disebut terakhir sebagai sesuatu yang biasa saja atau muncul dengan sendirinya, istilah yang disebut pertama karena itu merupakan fenomena yang menuntut perhatian yang konstan dan seksama.⁶

Seraya tidak menolak definisi konvensional mengenai pendidikan dalam cakupan *action* seperti dimaksud sebelumnya, pemaknaan yang diperluas dan melampaui cakupan konvensional atas pendidikan di atas menemukan penguat teoretiknya dari perspektif Islam. Dalam literatur pendidikan Islam, terutama yang dikembangkan dalam tradisi berbahasa Arab, pemaknaan terhadap istilah dan atau konsep pendidikan (*tarbiyah*) juga menempatkannya dalam makna yang diperluas hingga berkaitan dengan persoalan kebajikan individu dan kemaslahatan umum. Khalid bin Hamid al-Hazimi, pemikir pendidikan Islam, menyebut pemaknaan pendidikan berbasis kebajikan individu tersebut dengan terma *tabiyah 'ammah* yang digerakkan melalui praktik pengembangan karakter, dan menggambarkan pemaknaan pendidikan berbasis kemaslahatan umum dengan istilah *tarbiyah khashshah* yang dikembangkan melalui praktik risalah profetik atau penunaian tugas kenabian untuk umat.⁷ Jadi, pendidikan dalam perspektif khazanah keilmuan Islam dipandang tidak saja dalam kepentingan penguatan kemuliaan individu melainkan juga kemanfaatan sosial-kemasyarakatan.

⁶ Irfan Khawaja, "Why They Hate Us: A Pedagogical Proposal," dalam Yvonne Raley dan Gerhard Preyer (ed.), *Philosophy of Education in the Era of Globalization* (New York; London: Routledge, 2010), hlm. 92.

⁷ Lihat Khalid bin Hamid al-Hazimi, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah* (al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia: Dar 'Alam al-Kutub, 2000), hlm. 21.

Pemaknaan yang diperluas atas pendidikan dalam pembahasan kerangka konseptual Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya dalam buku ini juga seiring dengan perspektif Islam dalam memandang pendidikan sebagai sebuah aktivitas terukur. Menurut Latefah Alkanderi, pendidikan tidak saja bergerak dalam pengertian duduk di ruang kelas pembelajaran (*sitting in a classroom*) dan belajar dari buku (*learning from books*), melainkan juga meliputi setiap aspek perolehan informasi (*every aspect of absorbing information*), yang meliputi belajar dengan cara mempraktikkan sendiri (*learning by doing*) dan mengamati orang lain (*observing others*).⁸ Artinya, sebagai sebuah usaha yang disengaja, pendidikan menunjuk kepada makna yang meliputi berbagai aspek perilaku dan praktik individu dan atau masyarakat yang bernilai inspiratif-mendidik bagi pengembangan diri dalam nilai kemuliaan hidup.

Seiring dengan pemaknaan yang diperluas dan melampaui cakupan pemaknaan konvensional atas pendidikan di atas, perihal yang berdimensi sosial ekonomi, politik, dan bahkan agama termasuk di antara aspek dan praktik hidup yang dapat bernilai edukatif sebagaimana dimaksud, meskipun kategorinya bisa saja *action* atau bisa pula *event*. Karena itu, konsep Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya memaknai pendidikan tidak terbatas secara eksklusif hanya pada kebijakan dan praktik penyelenggaraan pendidikan formal persekolahan saja, melainkan juga praktik pendidikan nonformal dan informal yang menyentuh pula aspek dan praktik sosial, ekonomi, politik, dan bahkan agama yang bernilai edukatif. Pemaknaan

⁸ Lihat Latefah Alkanderi, "Exploring Education in Islam: Al-Ghazali's Model of the Mater-Pupil Relationship Applied to Educational Relationships within the Islamic Family", (Disertasi tidak dipublikasikan, College of Education, The Graduate School, The Pennsylvania State University, Amerika Serikat, Desember 2001), hlm. 30.

ini berlaku pada kategori *action* yang menuntut adanya unsur kesengajaan atau landasan niat yang mendasarinya maupun *event* yang tidak menunjuk kepada keharusan adanya unsur dimaksud.

Untuk mendasari bangunan konseptual tentang Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya ini, buku ini menurunkan pengkajian terhadap dua unsur penting. *Pertama*, pembahasan mengenai konsep pendidikan perubahan (*change education*). Konsep ini penting dikaji untuk mendasari kerangka konseptual yang lebih besar yang bernama Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya di atas. Posisinya tidak saja menjadi landasan, akan tetapi juga pemantik bagi pengembangan nilai yang dibutuhkan bagi perumusan bangunan teoretik Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya. Diskusi mengenai anggitan Perubahan Pendidikan, yang juga hadir menyertai, hanya merupakan konsekuensi logis saja dari pengkajian lebih mendasar mengenai konsep Pendidikan Perubahan dimaksud.

Kedua, pembahasan mengenai berbagai fakta lapangan yang dijumpai oleh penulis di berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Terkait dengan telaah fakta lapangan ini, penting disampaikan bahwa fakta-fakta lapangan yang dibahas pada sejumlah bagian di buku ini adalah catatan sosiologis atas berbagai kejadian yang dijumpai penulis dalam beragam aktivitasnya saat melakukan kegiatan akademik dan sosial di sejumlah kesempatan, baik dalam maupun luar negeri. Kegiatan akademik dan sosial di dalam negeri berupa aktivitas penelitian atau muhibah kebudayaan ke sejumlah daerah, mulai dari Jawa hingga Papua. Kegiatan akademik dan sosial di luar negeri mewujud dalam bentuk aktivitas penelitian, *short course*, serta perjalanan kepemimpinan, mulai dari Australia, Jepang, Saudi Arabia, Tunisia, Kazakhtan, hingga Amerika Serikat dan Kanada.

Fakta-fakta lapangan yang dipotret dari hasil perjalanan akademik dan sosial, dalam dan luar negeri, di atas penting diturunkan serta diberikan penjelasan dan analisis yang secukupnya agar bisa menjadi materi bahan baku (*raw material*) yang memberikan ruang bagi Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya untuk memainkan perannya dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisisnya. Dengan begitu, konsep Pendidikan Perubahan yang dikembangkan sebelumnya bisa membumikan instrumen analisisnya untuk kemudian menjadi dasar akademik bagi pengembangan konsep yang lebih besar yang disebut Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya.

Karena itu, buku ini hadir dengan pretensi untuk membangun konsep Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya dengan Pendidikan Perubahan sebagai basis teoretik awal yang mendasarinya. Konsep Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya tersebut dikembangkan dengan menunjuk serta mempertimbangkan fakta-fakta lapangan. Karena itu, selain mengembangkan analisis teoretis terhadap konsep Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya dengan Pendidikan Perubahan sebagai basis teoretik dasarnya, buku ini juga menghadirkan analisis terhadap fakta-fakta lapangan melalui telaah atas, dan sekaligus pemaknaan terhadap, sekumpulan catatan hasil perjalanan akademik dan sosial penulis ke sejumlah wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Terkait khusus dengan materi yang disebut terakhir, buku ini membagi dan atau mengklasifikasikan fakta-fakta lapangan di atas ke dalam tiga bidang pembahasan utama, yakni pendidikan, sosial ekonomi, dan agama. Pembagian dan klasifikasi fakta-fakta ke dalam tiga bidang ini tidak terlepas juga dari pemaknaan pendidikan yang diperluas sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ketiga bidang pembahasan utama dari fakta-fakta lapangan dimaksud diilustrasikan dan

ditelaah, baik dalam perspektif kebijakan (*policy*) maupun praktik implementatif dan atau eksperimentatif (*practices of implementation and experimentation*) di lapangan kehidupan gugus sosial masyarakat, dalam atau luar negeri. Dengan teknik distribusi pembahasan (ke dalam bagian bab pada buku) sebagaimana dijelaskan lebih detail di bawah, masing-masing dari ketiga bidang pembahasan utama atas fakta-fakta lapangan dimaksud berisikan ulasan beserta analisisnya yang diperlukan secara beragam sesuai dengan kasus lapangan yang ditemukan dalam perjalanan akademik dan sosial yang ditempuh penulis, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam mengilustrasikan hasil dan isi catatan perjalanan akademik dan sosial itu, buku ini semaksimal mungkin menggunakan gaya bahasa bertutur. Kemasan bahasanya diupayakan cenderung pendek-pendek. Tidak selalu mengikuti tata cara gramatikal yang baku nan kaku. Dan lebih dari itu, ungkapannya kerap menggunakan kata “saya” atau “aku” untuk menjelaskan substansi catatan. Karakter gaya penuturan seperti ini digunakan dalam rangka untuk bisa mendeskripsikan, mengilustrasikan, dan sekaligus menelaah fakta-fakta lapangan dimaksud secara lebih sederhana dan sebisa mungkin lebih mudah untuk diserap.

Untuk kepentingan teknis penulisan, pembahasan buku ini dibagi ke dalam lima bagian. Pembagian pembahasan ke dalam lima bagian ini dilakukan dengan urutan seperti berikut ini. Diskusi buku akan diawali dengan perspektif teoretik, dan juga akan diakhiri dengan analisis teoretik pula. Teknisnya, kedua telaah teoretik tersebut ditempatkan di Bagian Satu dan Bagian Lima sebagai awal dan akhir pembahasan buku. Pembahasan Bagian Satu atau awal buku dimaksud diproyeksikan sebagai pendasaran teoretik dan sekaligus sebagai kerangka akademik yang dibutuhkan secara signifikan

untuk membahas fakta-fakta lapangan yang dikaji pada bagian-bagian selanjutnya dalam buku ini. Semua pembahasan mengenai fakta-fakta lapangan dimaksud ditempatkan pada Bagian Dua, Bagian Tiga, dan Bagian Empat dari buku. Ketiga bagian tersebut disediakan untuk menelaah tiga bidang pembahasan utama, yakni pendidikan, sosial ekonomi, dan agama, seperti dijelaskan sebelumnya. Lalu, setelah fakta-fakta lapangan dalam tiga bagian pembahasan buku tersebut ditelaah sedemikian rupa, buku akan ditutup dengan penguatan akademik melalui teoretisasi fakta-fakta lapangan tersebut melalui konsep Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya.

Secara lebih detail, Bagian Satu dari buku membahas konsep dasar tentang Pendidikan Perubahan dengan memberikan telaah atas apa yang terjadi pada setiap gerak hidup manusia. Bagian Dua mendiskusikan beragam kebijakan dan praktik pendidikan lintas budaya. Bagian Tiga menelaah berbagai bentuk eksperimentasi sosial ekonomi lintas budaya. Bagian Empat mengkaji beraneka praktik agama lintas budaya. Bagian Lima sebagai bagian terakhir buku menurunkan pembahasan mengenai teoretisasi fakta-fakta lapangan melalui konsep teoretik Sosiologi Pendidikan Lintas Budaya dengan merespons Pendidikan Perubahan (dan tentu mengakomodasi perubahan pendidikan sebagai konsekuensi logisnya) serta sekaligus mengapresiasi setiap perbedaan secara positif untuk modal kemajuan hidup sosial.

Buku ini dihadirkan sebagai bacaan penting bagi mereka yang bergerak di dunia pendidikan khususnya dan kemasyarakatan pada umumnya. Dosen, mahasiswa, guru, orang tua, aktivis pendampingan masyarakat, dan bahkan para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan di level mana pun (nasional, daerah, maupun satuan pendidikan hingga institusi yang bergerak di bidang

pendampingan kemasyarakatan), patut menjadikan buku ini sebagai bacaan pemantik-pelengkap (*stimulating materials*) untuk kesempurnaan pemahaman dan praktik penyelenggaraan pendidikan dan kemasyarakatan secara lebih baik. Akhirnya, selamat menikmati dan mengasup setiap sajian materi yang disuguhkan halaman per halaman di buku ini untuk kebajikan bersama, baik di bidang akademik maupun praktik lapangan pendidikan dengan makna yang diperluas dan melampaui yang konvensional.

BAGIAN SATU

Setiap Kejadian Adalah Pelajaran: Perspektif Pendidikan Perubahan

Perubahan adalah Kehidupan. Kehidupan adalah perubahan. Perubahan menandai adanya kehidupan. Dan, kehidupan selalu identik dengan perubahan. Tak akan ada perubahan jika tak ada kehidupan. Itu karena perubahan membutuhkan energi. Dan energi hanya ada pada yang hidup. Membayangkan perubahan terjadi pada yang tidak hidup sama dengan mengkhayalkan matahari terbit malam hari. Mustahil untuk ukuran manusia. Karena itu, perubahan dan kehidupan persis bak dua sisi mata uang (*two sides of the same coin*). Bisa dibedakan tetapi tak bisa dipisahkan.

Berkelindannya perubahan dan kehidupan melintasi batas geo-sosiokultural. Perubahan, dalam makna sentralnya, bukan dominasi kultural gugus sosial tertentu. Termasuk warga masyarakat Indonesia. Alih-alih, perubahan mengenai semua anak manusia. Perubahan milik siapa saja. Tanpa pandang bulu. Tak ada yang dikecualikan. Laki atau perempuan. Kulit putih atau berwarna. Tua atau muda. Dan bahkan kaya atau miskin. Semua terkena proses dan sekaligus dampak perubahan. Apakah seseorang dari negara maju atau negara berkembang, semuanya mengalami dan sekaligus menghadapi perubahan. Semua itu karena perubahan dan kehidupan itu menyatu. Siapa pun yang berada di alam ini pasti bertemu dengan perubahan serta pula menyatunya perubahan dan kehidupan itu.

Peradaban apa pun di dunia ini mengafirmasi berkelindannya kehidupan dan perubahan di atas. Perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai misal, sebagaimana

dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁹ menyebutkan bahwa kehidupan menunjuk kepada arti “cara (keadaan, hal) hidup,” sedangkan kata “hidup” itu sendiri berarti salah satunya “masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya.” Artinya, kehidupan merujuk kepada keberadaan, pergerakan dan aktivitas yang di dalamnya terdapat unsur yang berubah atau komponen perubahan. Karena itu, perubahan menjadi bagian integral dari keberadaan aktivitas atau pergerakan yang menandai adanya kehidupan. Pemaknaan oleh KBBI di atas mengafirmasi perbendaharaan geo-sosiokultural Indonesia terhadap eratnya kaitan antara kehidupan dan perubahan dimaksud.

Di luar perbendaharaan geo-sosiokultural Indonesia, peradaban selainnya juga mengonfirmasi keterkaitan kehidupan dan perubahan. Dalam bahasa Inggris, sebagai contoh geo-sosiokultural Barat, kata “kehidupan” yang disepadankan dengan kata *life* juga merujuk kepada *the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death* (kapasitas untuk bertumbuh, bereproduksi, beraktivitas secara fungsional, dan berubah secara berkesinambungan sebelum munculnya kematian).¹⁰ Dengan demikian, perubahan diafirmasi sebagai bagian dari kehidupan. Dalam bahasa Arab pun, kata “kehidupan” yang diserupakan dengan kata *al-hayah* hampir memiliki kesamaan makna, menunjuk kepada pergerakan serta juga sebagai lawan dari kata *al-marwt* (kematian).¹¹ Substansi pergerakan, dalam perbendaharaan

⁹ Lihat maka “hidup” pada KBBI Online: <https://kbbi.web.id/hidup> (Diakses 18 Oktober 2021).

¹⁰ Lihat makna kata “life” dalam kamus online Google: <https://www.google.com/search?q=life+means&coq=life+means&aqs=chrome..69i57j0i512l4j0i22i30l4j0i10i22i30.3613j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses 18 Oktober 2021).

¹¹ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 122.

geo-sosiokultural Arab, berarti meniscayakan adanya perihwal yang berubah karena bergerak dinamis.

Menyusul menguatnya kelindan kehidupan dan perubahan di atas, maka tata pikir (*mindset*) berikut ini tampak sangat rasional: bukan saja perubahan yang penting dimengerti, melainkan juga respons terhadap perubahan itu yang juga patut diperhatikan. Mengerti atas perubahan memang merupakan modal awal untuk bisa menata hidup untuk lebih maju. Itu karena memang perubahan bukan untuk dihindari. Namun, siapa pun yang ingin bergerak maju atau menata hidup ke depan secara lebih baik dipersyaratkan untuk memiliki kecakapan hidup, di antaranya dalam bentuk keterampilan teknis, dalam merespons setiap perubahan yang terjadi. Alasannya sederhana sekali: perubahan itu untuk dikelola. Siapa yang bisa mengelola perubahan dengan baik, maka dia akan bisa menjadi minimal pengendali perubahan (*change controller*) itu dan maksimal bahkan juga akhirnya bisa menjadi penggerak perubahan (*change driver*) itu sendiri.

Sebaliknya, siapa yang gagal mengelola perubahan, maka dia akan segera dihadapkan pada dua kemungkinan: *Pertama*, ditinggalkan oleh dinamika yang muncul oleh dan karena perubahan, atau *kedua* terbawa oleh arus perubahan tanpa adanya kuasa yang memadai untuk mengelolanya. Kemungkinan pertama muncul biasanya pada orang yang tidak antisipatif atau adaptif atau bahkan bersikap menolak (*denial*) terhadap perubahan. Orang dengan karakter yang demikian bisa muncul karena tidak mengerti, atau bisa pula karena gagap memahami substansi di balik kelindan erat kehidupan dan perubahan. Kemungkinan kedua biasanya terjadi pada mereka yang tidak memiliki prinsip hidup yang kuat hingga pergerakannya pun terbawa oleh arus hidup yang timbul di permukaan.

Apa pun kemungkinan yang terjadi padanya, orang yang gagal mengelola perubahan akan segera menjadi korban dari perubahan (*change victim*) itu sendiri. Pada tataran paling minimal, kegagalan untuk mengelola perubahan terjadi karena ketidaktahuan bahwa perubahan selalu hadir pada kehidupan. Pada orang gagal yang demikian, tidak ada prestasi yang bisa ditunjukkan. Bahkan, kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*) sekalipun sudah cenderung enyah dari kehidupannya. Salah satu indikatornya adalah tiadanya proses pengambilan pelajaran atas apa yang terjadi pada dirinya. Indikator ini diperparah oleh menguatnya indikator lainnya, yakni adanya keengganan untuk selalu belajar dari apa yang telah terjadi, baik yang menjadi pengalaman hidupnya sendiri maupun orang lain.

Dari *Change Driver* Menuju *Change Victor*

Agar tidak menjadi korban dari perubahan, setiap kita seyogyanya menjadi pengendali perubahan, dan bukan sekadar penumpang perubahan. Prasyaratnya, terdapat kesadaran di internal diri masing-masing bahwa hidup itu bergerak maju, dan bukan bergerak mundur. Kesadaran ini lalu menuntut adanya langkah konkret bahwa perubahan yang selalu hadir dalam hidup, baik yang menjadi pengalaman dirinya sendiri maupun orang lain, harus diikuti dengan baik. Adaptasi adalah langkah awalnya. Sikap menolak terhadap perubahan bukanlah langkah strategis, karena penolakan berarti pengabaian terhadap fakta perubahan. Lebih-lebih, penolakan yang bersumber dari ketidakpahaman atas fakta perubahan tidak akan membantu apa-apa terhadap upaya pemahaman yang memadai serta adaptasi yang dibutuhkan terhadap fakta perubahan itu. Memang, penolakan atas dasar kritisisme bisa dikecualikan, tetapi tetap saja bahwa di balik penolakan yang

disebut terakhir ini terdapat minimal pemahaman kritis yang dibutuhkan yang pemenuhannya memerlukan proses dan daya pikir yang tinggi.

Langkah selanjutnya adalah mengelola perubahan dengan baik. Ada empat kata kunci yang mencirikan kata “mengelola” ini, yakni “mengendalikan,” “menyelenggarakan,” “mengurus,” dan “menjalankan.”¹² Hidup itu selalu dengan ukuran dan atau standar, dan karena itu setiap yang berubah perlu untuk selalu diselaraskan dengan ukuran dan atau standar dimaksud. Pada titik inilah, perubahan itu perlu untuk dikendalikan, minimal dalam pengertian diselaraskan dengan ukuran dan atau standar dimaksud. Bahkan pada titik yang paling minimal, perubahan tidak selalu harus ditunggu, melainkan patut dijemput, diselenggarakan, dan atau dijalankan. Karena itu, mengelola perubahan mengandung arti menyelenggarakan perubahan itu agar hidup bergerak maju, dan bukan mundur. Di sinilah, mengelola perubahan berarti mengurus seluruh yang terkait dengan proses lahir dan berkembangnya perubahan itu. Semua kandungan makna pengelolaan ini dibutuhkan agar perubahan tidak berjalan liar, tetapi memiliki nilai positif bagi kehidupan.

Pada taraf ini, perubahan dijadikan sebagai masukan dan sekaligus materi yang menuntut ikhtiar maksimal untuk merespons dan mengelolanya dengan baik. Hanya dengan cara begitu, perubahan akan melahirkan ruang bagi munculnya kesadaran bahwa perubahan adalah kesempatan bagi individu, suka atau tidak suka, untuk selalu belajar untuk hidup dalam gerak maju. Selanjutnya, dengan kesadaran seperti itu, akan selalu ada kesiapan diri untuk menyambut dan mengelola setiap perubahan yang hadir pada dirinya. Kesiapan inilah yang

¹² Lihat makna “mengelola” sebagai derivasi dari kata “kelola” pada KBBI Online: <https://kbbi.web.id/kelola> (Diakses 28 Oktober 2021).

membedakan apakah seseorang bisa berprestasi atau tidak di tengah perubahan yang selalu hadir dalam hidupnya. Pasalnya, ketidaksiapan dalam merespons dan mengelola perubahan hanya akan menjadikan perubahan sebagai beban hidup. Jika ini yang terjadi, seseorang akan berkutat dengan masalahnya sendiri, karena dia akan disibukkan dengan kegapapannya terhadap setiap yang terjadi pada dirinya, sedangkan perubahan yang menyediakan kesempatan untuk bergerak maju tidak bisa direspons, apalagi dikelola dengan baik.

Sebaliknya, jika perubahan direspons dengan proses adaptasi serta pengelolaan yang baik, maka perubahan dimaksud akan segera bisa menjadi bagian dari, dan menyatu dengan napas hidup. Bahkan pada tataran maksimal, perubahan dimaksud juga segera menjadi bagian dari kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan ditunaikan dengan baik. Akan muncul kesadaran bahwa perubahan adalah menjadi bagian dari tuntutan dan kebutuhan hidup, serta bahkan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri—sebagaimana diuraikan di awal tulisan ini. Memenuhi tuntutan perubahan akan dipandang sebagai bagian dari kehidupan. Pula, menunaikan kebutuhan hidup, di antara yang utama, adalah dengan cara merespons dengan mengelola setiap perubahan dengan baik. Jika relasi antara perubahan, kehidupan, dan respons diri hingga dalam bentuk pengelolaan bisa dilakukan dengan baik, maka hidup akan selalu berada dalam nilai positif kemajuan.

Langkah-langkah di atas itulah yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa menjadi pemenang perubahan (*change victor*). Tanda paling utama untuk menjadi pemenang perubahan adalah satunya pemahaman, sikap, dan perilaku dalam bentuk kemampuan untuk selalu mengambil manfaat dari setiap perubahan. Pada level paling elementer dalam bentuk pemahaman, perubahan dipandang dan

dimaknai sebagai bagian dari gerak hidup. Pemahaman seperti ini kemudian dilanjutkan dengan sikap dan kesadaran bahwa yang menjadi masalah itu bukanlah perubahan, melainkan sikap dan respons diri terhadap perubahan itu. Seseorang akan menjadi pemenang perubahan jika yang bersangkutan menjadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk bergerak lebih baik, dan itu diawali dengan respons diri secara positif terhadap perubahan beserta tuntutan dan tantangan yang dibawa serta. Gagal menumbuhkan sikap dan respons positif hanya akan menjadikan perubahan sebagai beban hidup semata tanpa adanya kuasa untuk memanfaatkan peluang yang dilahirkannya.

Pada level perilaku, seseorang yang menjadi pemenang perubahan di antaranya ditandai dengan kreativitas dan inovasi yang dilahirkan untuk merespons dan mengelola perubahan. Adanya kreativitas dan inovasi ini menjadi prasyarat dan sekaligus penanda penting bagi isyarat seseorang yang segera menjadi pemenang perubahan. Pasalnya, tidak akan ada seseorang itu sukses menjadi pemenang perubahan saat dirinya tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam menyambut dan mengelola perubahan. Hubungan antara kemenangan dan inovasi-kreativitas adalah hubungan sirkular. Tidak ada kemenangan tanpa kemampuan dalam berkreasi dan berinovasi. Sebaliknya, kreativitas dan inovasi menjadi prasyarat kemenangan menyusul nilai positif yang dihadirkan untuk merespons dan mengelola setiap perubahan yang terjadi.

Seiring dengan selalu berlanjutnya perubahan seperti dimaksud di atas, inovasi dan kreativitas tidak seharusnya berhenti pada satu titik atau tahapan. Keduanya harus selalu hadir dalam setiap tahapan hidup, sebagaimana perubahan yang selalu menghinggapi hidup manusia. Tahapan-tahapan hidup itu bisa berupa pergerakan dari anak-anak ke remaja,

lalu ke dewasa hingga tahapan hidup orang tua. Tahapan-tahapan hidup dimaksud bisa juga berwujud dari hidup dalam keterbatasan hingga keberkecukupan. Bisa pula tahapan-tahapan dimaksud mewujud dalam bentuk kesempitan menuju kelampayan hidup, atau bahkan juga dari ketertinggalan menuju kemajuan. Atas berbagai macam tahapan hidup itu, inovasi dan kreativitas dibutuhkan untuk selalu hadir dalam kebersamai perkembangan hidup seseorang. Dengan cara itu, inovasi dan kreativitas memiliki kekuatan penting untuk mendampingi gerak hidup seseorang.

Secara teknis, kedua jenis kemampuan, baik inovasi maupun kreativitas, di atas akan menghadirkan dua keterampilan teknis pada diri seseorang yang memilikinya, yakni daya kenyal (*agility*) dan daya dobrak (*breakthrough*). Daya kenyal memberi kekuatan ketahanan dalam merespons setiap perubahan. Bahkan, perubahan dengan skala dampak apa pun bisa diikuti dengan baik tanpa kehilangan kekuatan diri untuk menghadapinya. Daya dobrak melengkapi daya kenyal dengan mempersenjatai diri seseorang dengan kemampuan untuk melakukan pengisian kesempatan yang lahir dari proses perubahan dengan sesuatu yang baru. Bahkan dalam menghadirkan sesuatu yang baru itu, daya dobrak memberikan kemampuan dalam bentuk daya ungkit kepada diri seseorang untuk bukan sekadar menumpang perubahan, melainkan mengendalikan dan menyetir perubahan itu sendiri, tentu ke arah yang lebih baik. Posisi pemenang perubahan, karena itu, hanya merupakan konsekuensi logis saja dari capaian seseorang saat dirinya sudah melalui proses panjang dalam menghadapi dan mengelola perubahan sebagaimana diuraikan di atas.

Pendidikan Perubahan

Tentu, untuk mengantarkan seseorang menjadi pengendali dan sekaligus pemenang perubahan, dibutuhkan proses panjang nan efektif. Pendidikan adalah jalur dan sarana paling efektif, meskipun panjang, untuk memenuhi kepentingan yang demikian, karena pendidikan tidak saja memberi kesempatan seseorang untuk memasuki masa depannya secara mandiri melalui pemberian keterampilan teknis, melainkan juga pembangunan mental-spiritual melalui basis kognitif dan afektif yang dimiliki.¹³ Lebih-lebih, pendidikan merupakan usaha sadar yang dijalankan secara sistemik dan terstruktur untuk membangun mental-spiritual seseorang.¹⁴ Usaha sadar inilah yang membedakan apakah suatu aktivitas itu bisa masuk ke dalam kategori pendidikan atau kegiatan biasa saja.¹⁵ Untuk

¹³ Diskusi mengenai ini bisa didapatkan, di antaranya, di Marc S. Atkins, Kimberly E. Hoagwood, Krista Kutash, dan Edward Seidman, "Toward the Integration of Education and Mental Health in Schools," *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, Vol. 37, No. 1-2 (2010): hlm. 40-47. doi:10.1007/s10488-010-0299-7; Donald Sharp, Michael Cole, dan Charles Lave, "Education and Cognitive Development: The Evidence from Experimental Research," *Monographs of the Society for Research in Child Development*, vol. 44, no. 1-2 (1979): hlm. 1-112. doi:10.2307/3181586; Deanna Kuhn, "The Application of Piaget's Theory of Cognitive Development to Education," *Harvard Educational Review*, Vol. 49, No. 3 (1979): hlm. 340-360. doi:10.17763/haer.49.3.h70173113k.

¹⁴ Lihat Marian de Souza, Leslie J. Francis, James O'Higgins-Norman, dan Daniel G. Scott, *International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing* (Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2009); Marian de Souza, *Spirituality in Education in a Global, Pluralised World* (London: Routledge, 2015).

¹⁵ Beberapa perspektif mengenai makna pendidikan bisa dijumpai di sejumlah literatur berikut: Ari Antikainen, Jarmo Houtsonen, Hannu Huotelin, dan Juha Kauppila, "In Search of the Meaning of Education: The Case of Finland," *Scandinavian Journal of Educational Research*, Vol. 39, No. 4 (1995): hlm. 295-309. doi:10.1080/0031383950390402; Jack Mezirow, "A Critical Theory of Adult Learning and Education," *Adult Education*, Vol. 32, No. 1 (1981): hlm. 3-24. doi:10.1177/074171368103200101; David Carr, "Philosophy and the Meaning of 'Education,'" *Theory and Research in Education*, Vol. 1, No. 2 (2003): hlm. 195-212. doi:10.1177/1477878503001002003; David Carr, *Making Sense of Education: An Introduction to the Philosophy and Theory of Education and Teaching*

itulah, pendidikan sangat dibutuhkan bagi pengendalian dan sekaligus pemenangan atas perubahan sebagaimana dimaksud.

Di sinilah Pendidikan Perubahan (*change education*) menjadi konsep yang penting untuk dikembangkan sebagai pendasaran atas upaya dalam mengantarkan seseorang agar dapat menjadi pengendali dan sekaligus pemenang perubahan. Konsep ini dikembangkan dari pemikiran dasar bahwa perubahan membutuhkan skema pengelolaan yang meliputi pengendalian, penyelenggaraan, pengurusan, dan pengorganisasian seperti yang diulas sebelumnya. Skema pengelolaan atas perubahan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan individu dan masyarakat, karena perubahan tidak sepatutnya dipandang sebagai sesuatu yang muncul dan bergerak secara alamiah (*natural*) saja, melainkan juga lebih dari itu sebagai sesuatu yang harus bisa diperkirakan (*expected*) dan bahkan dalam derajat tertentu sudah bisa diantisipasi (*anticipated*) sebelumnya.

Semua rangkaian dari skema pengelolaan beserta pertimbangan di atas membutuhkan edukasi yang positif melalui proses yang sistemik, terukur, dan berkelanjutan. Proses yang demikian ini membutuhkan kerangka kerja yang utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keutuhan kerangka kerja dimaksud mengharuskan dilakukannya pengondisian yang terukur dalam mengelola perubahan. Kepentingannya sederhana tetapi jelas, yakni agar pengelolaan perubahan bisa berjalan dengan maksimal dan efektif. Di sinilah konsep Pendidikan Perubahan dibutuhkan karena memainkan peranan sentral bagi pengelolaan perubahan itu sendiri. Dengan begitu, perubahan hadir bersama dengan kesiapan individu dan masyarakat untuk menyambut, menghadapi, dan atau bahkan mengelolanya, dan juga sebaliknya, setiap individu

(London: Routledge, 2003).

dan masyarakat selalu memiliki kesiapan meskipun tingkat dan bentuknya beragam dalam menyambut, menghadapi, dan atau mengelola setiap perubahan.

Sebagai bagian sentral dari konsep ini, siapa pun penting membangun pemahaman dan kesadaran bahwa kejadian adalah bagian dari kehidupan. Kejadian bisa berubah-ubah dari satu lokasi ke lainnya atau dari satu waktu ke waktu lainnya, tetapi setiap individu sepatutnya bisa menjadikan perubahan itu sebagai kesempatan edukatif bagi pengembangan diri. Setiap terjadi perubahan, berarti setiap kali itu pula terdapat materi edukasi yang penting diikuti dan ditelaah oleh siapa pun, baik yang mengalami langsung maupun yang membaca atau mengikuti pengalaman orang lain atasnya. Dalam perspektif Pendidikan Perubahan, kesempatan edukatif selalu hadir bersama munculnya perubahan itu, dan itu yang menjadi kewajiban setiap individu untuk mencernanya dengan baik.

Pendidikan Perubahan tidak mengandaikan pemahaman dan kesadaran atas nilai edukatif atas perubahan di atas berhenti pada level pengetahuan-pemahaman semata, melainkan juga mengamanatkan agar pengetahuan-pemahaman itu bisa bergerak lebih lanjut ke level berikutnya, yakni ranah praktik edukatif. Pemahaman dan kesadaran yang baik atas perubahan harus diikuti dengan praktik hidup yang lebih konkret atas perubahan itu sendiri. Konkretnya, harus ada upaya pada setiap individu untuk mengambil pelajaran dari setiap yang terjadi pada kehidupan, baik yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Bahkan, terhadap setiap perubahan yang terjadi pada kehidupan sendiri atau orang lain itu, penyikapan berikut ini harus disadari dan dilakukan: selalu terdapat pelajaran dari setiap perubahan yang harus diambil bagi kemaslahatan hidup berikutnya. Tinggal permasalahan berikutnya adalah bagaimana mengambil pelajaran itu.

Pendidikan perubahan sejatinya mendapatkan inspirasi yang kuat dari ajaran agama. Di Islam, sebagai misal, al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 191 mengilhami, menginspirasi, mendasari, dan sekaligus memberikan energi yang kuat khususnya terhadap Pendidikan Perubahan. Dikemukakan "Duh Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia" yang dipersembahkan oleh ayat al-Qur'an tersebut memberikan semangat bahwa setiap perubahan dalam hidup selalu datang dengan makna tertentu, dan makna itu selalu berarti adanya nilai positif yang dikandung oleh perubahan dimaksud. Kalimat "tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia" adalah ungkapan yang lahir dari sikap positif terhadap perubahan yang menandai "aksi ambil manfaat" atas setiap kejadian. Ungkapan "aksi ambil manfaat" ini adalah nama lain dari praktik pengambilan pelajaran atas setiap kejadian dimaksud, apakah itu terjadi pada diri sendiri atau menjadi pengalaman orang lain yang dapat dipetik sebagai pelajaran.

Dari perspektif sosiologi, Pendidikan Perubahan juga mendapatkan penguat dari kerangka teori *fungsiionalisme struktural*, yang dikenal pula dengan istilah teori *struktural fungsiional*. Dalam teori ini, semua yang terjadi dalam kehidupan antar individu atau antara individu dan gugus sosial yang lebih luas memiliki makna fungsional bagi kehidupan mereka. Seraya menyerupakan kehidupan masyarakat dengan organisme, teori ini memandang bahwa setiap struktur dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi yang kemudian menciptakan kestabilan dan keteraturan. Setiap unsur atau bagian dari masyarakat memiliki peran untuk membentuk keutuhan dalam kehidupan masyarakat. Peran inilah yang kemudian membuat bagian-bagian atau unsur-unsur yang berbeda-beda itu menunjukkan arti pada dirinya masing-masing untuk selanjutnya memiliki dan sekaligus memberi

makna bagi kehidupan masyarakat.¹⁶

Berangkat, utamanya, dari inspirasi ajaran agama dan kajian sosiologis di atas, Pendidikan Perubahan menegaskan bahwa “setiap kejadian adalah pelajaran.” Karena kejadian adalah bagian dari kehidupan—sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka setiap kali muncul kejadian [terlepas apakah terjadi pada diri sendiri atau orang lain], setiap kali itu pula harus terjadi proses pendewasaan diri pada setiap individu. Saat terjadi pada diri orang lain, kejadian itu harus memberi inspirasi bagi lahirnya langkah-langkah “aksi ambil manfaat” dalam bentuk pengambilan pelajaran, mulai dariantisipasi hingga solusi. Saat terjadi pada diri sendiri, sebuah kejadian harus memberi kesadaran aksi untuk tidak terjadi kali berikutnya, dan maksimal semakin membuat yang bersangkutan lebih matang dan dewasa.

Proses “aksi ambil manfaat” yang dibutuhkan untuk melahirkan langkah antisipasi dan solusi pada satu sisi dan untuk menjadikan seseorang lebih matang dan dewasa pada sisi lain di atas tidak akan bisa terjadi jika tidak ada kemampuan pada diri seseorang untuk belajar dari setiap kejadian. Absennya kemampuan untuk belajar dari setiap kejadian hanya akan menjauhkan proses “aksi ambil manfaat” itu dari diri seseorang. Akibatnya, langkah antisipasi hingga solusi yang dibutuhkan untuk tumbuhnya kematangan dan kedewasaan diri akan bisa terganggu oleh kondisi yang demikian. Nah, kemampuan untuk belajar dari setiap kejadian seperti yang dimaksudkan dan diidealisasikan oleh konsep Pendidikan Perubahan dimaksud di atas tidak bisa begitu saja lahir secara tiba-tiba, melainkan

¹⁶ Lihat Robert T. Garner, “Structural Functional Theory,” dalam George Ritzer dan Chris Rojek (eds), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* (New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd, 2019), hlm. 1–4. doi:10.1002/9781405165518.wbeoss2; Talcott Parsons, *The Present Status of “Structural-Functional” Theory in Sociology* (London: Routledge, 1975).

membutuhkan proses penumbuhan yang baik. Untuk itu, dalam perspektif lebih lanjut Pendidikan Perubahan, setiap individu harus memiliki kemampuan dan keterampilan teknis untuk belajar dari setiap kejadian. Belajar dari kasus hidup, baik yang dialaminya sendiri maupun orang lain, adalah bagian penting dari proses kepemilikan atas kemampuan dan keterampilan teknis dimaksud.

Menjadikan setiap kejadian sebagai pelajaran hidup adalah bagian dari esensi Pendidikan Berkesinambungan atau Pendidikan Berkelanjutan (*sustainable education*). Untuk itu, Pendidikan Perubahan memberikan perhatian besar kepada pemahaman, kesadaran dan praktik hidup individu untuk selalu bisa belajar dan atau menarik pelajaran dari setiap kejadian. Hal ini penting karena kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh ada atau tidak adanya kejadian yang menimpa dirinya, melainkan diukur dari seberapa terampil yang bersangkutan bisa keluar dari setiap kejadian yang menimpanya itu dengan selalu belajar dan atau mengambil pelajaran dari setiap kejadian pada dirinya dimaksud. Pun prinsip yang sama juga berlaku pada kejadian yang menimpa orang lain dan munculnya proses pengambilan pelajaran dari setiap kejadian pada diri orang lain itu. Jika proses seperti ini terjadi, maka esensi Pendidikan Berkelanjutan atau Pendidikan Berkesinambungan bisa disemai dari titik pemahaman dan kesadaran ini.

Experiential Learning dan Leaftheprinces

Tumbuhnya kemampuan dan keterampilan teknis untuk belajar dari setiap kejadian seperti dimaksud di atas dapat terfasilitasi dengan baik melalui praktik pengalaman langsung atau praktik pengambilan pelajaran dari pengalaman sesama. Kedua jenis pengalaman ini memang berbeda sumber. Pengalaman langsung berarti bersumber dari kejadian

yang seseorang alami langsung dalam hidupnya, sedangkan pengalaman sesama menunjuk kepada kejadian yang bersumber atau dialami oleh orang lain. Meskipun berbeda sumber, kedua jenis pengalaman tersebut sama-sama secara efektif dalam derajat masing-masing menjadi materi pembelajaran hidup, karena setiap kejadian dari kedua sumber pengalaman tersebut akan selalu menjadi poin pelajaran riil. Karena itu, setiap perubahan akan selalu dipahami sebagai kejadian hidup yang harus dapat menimbulkan pengalaman yang segera bisa dipetik menjadi dan atau sebagai sebuah pelajaran.

Prinsip belajar melalui praktik pengalaman langsung di atas dikenal dengan konsep *experiential learning*, sedangkan prinsip belajar melalui pengambilan pelajaran dari pengalaman sesama disebut *learning from other people's experiences* (selanjutnya disingkat atau disebut dengan singkatan *leaftheprinces*). Kedua jenis pembelajaran ini memang sama-sama memberi dampak signifikan pada kehidupan seseorang, tetapi besarnya cenderung diasumsikan berbeda. Disebut "diasumsikan" karena secara konseptual gambar besarnya memang cenderung demikian, tetapi secara faktual gambar kecilnya bisa muncul berbeda-beda pada satu orang dibanding lainnya. Perbedaan antara satu orang dan lainnya ini dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari latar belakang sosio-kultural hingga kapasitas intelektual diri. Perbedaan sosio-kultural melahirkan kekhasan cara dalam merespons pengalaman yang terjadi, sedangkan perbedaan kapasitas intelektual menyebabkan keragaman penyikapan akademik terhadap kejadian yang dialami.

Dalam perspektif *experiential learning*, belajar dengan mengalami langsung akan memberikan dampak yang lebih besar dibanding belajar dari membaca pengalaman orang lain. Mengetahui sesuatu dengan cara mengalami sendiri jauh lebih baik daripada mengetahui sesuatu dengan cara membaca

pengalaman orang lain. Mengarifi sesuatu yang berasal dari pengalaman sendiri juga cenderung bermakna lebih mendalam dibanding mengarifi sesuatu yang bersumber dari pengalaman orang lain. Pun, menyadari atas sesuatu melalui pengalaman sendiri secara langsung juga memberi dampak yang lebih baik dibanding menyadari atas sesuatu dari pengalaman orang lain. Semua ini terjadi karena pengalaman langsung secara sendiri memberi kesempatan untuk menumbuhkan dan menambah *insight* (wawasan dan atau pemahaman) dan kesadaran yang lebih besar dan tinggi dibanding keberadaan dan peran yang bisa dimainkan oleh pengalaman orang lain kepada diri seseorang. Karena itulah, belajar dengan cara mengalami langsung sejatinya memberikan peluang yang lebih besar untuk memberi dampak dan pengaruh yang lebih besar pula pada hidup seseorang dibanding belajar dengan cara membaca pengalaman orang lain.

Terlepas dari berbagai ragam dampak atau pengaruh yang bisa timbul pada diri seseorang, konsep *leaftheprinces* cenderung mendekati dan mengidentifikasi pengalaman dengan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dalam derajat yang lebih rendah daripada *experiential learning*. Hal ini tentu terkait erat dengan level *insight* atau wawasan atau pemahaman serta kesadaran yang dapat timbul dari keberadaan pengalaman sesama dibanding pengalaman sendiri. Membaca pengalaman orang lain memang tidak memberi *insight* atau wawasan atau pemahaman serta kesadaran sebesar mengalami sendiri secara langsung. Meskipun begitu, pengalaman sesama tetap memberi peluang yang besar kepada seseorang untuk menumbuhkan kebajikan hidup jika bisa dipetik pelajaran yang bisa muncul darinya. Seseorang bisa belajar dari apa yang dialami orang lain. Dia bisa mengambil pelajaran dari pengalaman sesamanya.

Terlepas dari perbedaan skala yang dapat timbul dari pengalaman langsung dan pengalaman orang lain di atas, makna yang dikembangkan baik oleh konsep *experiential learning* maupun *leaftheprinces* mengajarkan prinsip pembelajaran yang menarik, efektif, dan berdaya ungkit yang kuat bagi pengembangan kebajikan hidup pribadi maupun sosial ke depan. Bagian sentral dari prinsip pembelajaran dimaksud di antaranya adalah bahwa belajar dari pengalaman, baik sendiri maupun orang lain, tetap saja memberikan dampak lebih besar dibanding belajar dengan cara semata-mata merujuk kepada konsep atau teori saja. Belajar dari pengalaman, langsung secara sendiri atau dari yang dialami orang lain, memberikan ruang refleksi yang lebih besar dibanding belajar dari konsep atau teori semata. Ruang refleksi ini memberikan kesempatan riil yang lebih besar pula kepada seseorang yang kemudian dapat menggerakkannya untuk berproses secara lebih mandiri dalam memahami, memaknai, dan mengambil inspirasi hingga pelajaran positif dari setiap kejadian konkret yang dialami sendiri maupun oleh sesamanya.

Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa konsep atau teori tidak memberi ruang untuk refleksi kognitif-akademik kepada seseorang. Konsep dan teori tetap memiliki kekuatan pengaruh terhadap perubahan pada diri seseorang melalui dampak-konsekuensi praktis yang bisa ditimbulkan menyusul implikasi teoretik yang dikandungnya. Berbasis temuan-temuan teoretik yang dihasilkan, konsep dan teori juga dapat menjadi pengungkit bagi lahirnya perilaku dan tindakan yang dibutuhkan untuk menuju kebajikan tertentu. Hanya saja, ruang refleksi kognitif-akademik berbasis konsep atau teori tersebut cenderung lebih terbatas dibanding ruang refleksi yang diberikan oleh pengalaman konkret. Semua itu tidak terlepas dari *insight* atau wawasan atau pemahaman serta

kesadaran yang ditimbulkan oleh pengalaman konkret yang mungkin tidak bisa didapatkan melalui pembacaan terhadap konsep atau teori. Jangankan begitu, pengalaman langsung yang dialami sendiri oleh seseorang saja berkemungkinan besar memberikan wawasan atau pemahaman serta kesadaran yang lebih besar dibanding, dan bahkan itu tidak bisa diperoleh melalui, pembacaan terhadap pengalaman orang lain.

Pada titik inilah, maksim “pengalaman adalah guru terbaik” (*experience is the best teacher*) menemukan kontekstualisasinya. Maksim tersebut mengirimkan pesan bahwa seseorang akan bisa belajar lebih banyak dari hal-hal yang terjadi langsung pada dirinya dalam kehidupan nyata dibanding mendengar tentang atau belajar dari hal-hal yang terjadi pada kehidupan orang lain. Alasannya sederhana: pengalaman akan dapat memandu seseorang untuk bergerak maju dalam hidupnya. Kata “maju” ini lahir dari proses pengambilan pelajaran dari pengalaman riil yang dilalui. Dengan pengalaman riil itu, seseorang akan bisa mengambil inspirasi kebajikan untuk terus bergerak maju demi mengejar atau menambah kebajikan baru dalam hidupnya. Konsep atau teori memang memberikan pendasaran yang terukur bagi perjalanan hidup, tetapi konsep atau teori yang lahir dari pengalaman konkret serta proses refleksi atasnya memberikan kesempatan yang lebih besar nan mendalam kepada seseorang dibanding pembacaan atas konsep atau teori semata dalam menambah kebajikan baru dalam hidupnya. Inilah mengapa pengalaman disebut sebagai “guru terbaik” menyusul kebajikan yang timbul dari proses riilnya serta pemaknaan mendalam atasnya.

Oleh karena itu, teori *experiential learning* dan *leafthepinces* selalu dan pasti memaknai positif setiap kejadian. Refleksi merupakan bagian penting dari tahapan untuk

menjadikan setiap kejadian bermakna positif bagi kehidupan seseorang. Refleksi ini menjadi bagian sentral dan integral dari kedua teori dimaksud karena kejadian, seperti disinggung sebelumnya, selalu muncul dalam hidup. Ia bisa hadir tidak saja dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda, melainkan juga dalam konteks ruang dan waktu yang sama. Kehadirannya pun bisa pula lebih dari sekali walaupun dengan skala dan dimensi yang tidak selalu sama. Bahkan lebih jauh, peristiwa sebagai nama lain dari kejadian selalu hadir mengiringi setiap perubahan dalam hidup. Kedua teori *experiential learning* dan *leaftheprinces* tersebut mengondisikan agar setiap individu cakap dalam merespons setiap kejadian, yang di antaranya lahir karena perubahan dimaksud, dan karena itu refleksi merupakan tahapan penting untuk melatih setiap individu untuk sampai kepada kemampuan dan keterampilan dalam mendekati setiap kejadian atau peristiwa hidup secara bermakna.

Memaknai Setiap Kejadian

Merujuk kepada teori besar tentang Pendidikan Perubahan serta teori kecil-spesifik *experiential learning* dan *leaftheprinces* di atas, kejadian dan perubahan memiliki relasi dan kaitan yang sangat erat. Kejadian mengindikasikan adanya perubahan, dan perubahan merupakan perwujudan konkret dari substansi kejadian. Kejadian menunjukkan adanya pergerakan sesuatu yang di dalamnya ada proses yang dinamis dan tidak statis. Perubahan hanya menjadi konsekuensi logis saja dari munculnya pergerakan yang dinamis dimaksud. Selanjutnya, perubahan tersebut juga bergerak untuk menimbulkan kejadian lainnya yang menjadi konsekuensi logis lanjutan pula atas dinamika yang muncul di dalamnya. Di sinilah, pergerakan sirkular antara kejadian dan perubahan terjadi secara timbal balik, yang satu akan menimbulkan yang lain. Untuk itu,

keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat, dan hubungan dimaksud cenderung tidak bisa dipisahkan walaupun masih bisa dibedakan di antara keduanya, persis seperti hubungan antara kehidupan dan perubahan sebagaimana dijelaskan di awal.

Karena itu, setiap kejadian dan atau perubahan—seperti yang ditemui penulis dalam rangkaian panjang perjalanan sosial-akademiknya dan detail uraiannya bisa dijumpai di serangkaian pembahasan buku ini di bagian bawah—patut dijadikan sebagai materi pendidikan. Skala, agenda, dan *locus*-nya bisa dari mana saja, akan tetapi substansi kejadian dan atau perubahan itu dipandang lebih penting untuk diambil sebagai poin pelajaran bagi kehidupan. Memang kondisi pelaku dan tempat menjadi konteks penting bagi ikhtiar untuk bisa mendudukan sebuah kejadian atau perubahan pada proporsi dan konteks riilnya. Namun, tidak terlalu penting siapa yang mengalami dan di mana kejadian itu berlangsung. Yang layak dipandang jauh lebih penting dari itu semua adalah apa yang bisa diserap sebagai sebuah pelajaran dari setiap kejadian dan perubahan dimaksud, terlepas siapa yang melakukan atau di mana kejadian atau peristiwa perubahan itu terjadi.

Isu tentang siapa pelaku atau yang mengalami dan di mana kejadiannya berlangsung memang penting untuk menjadi konteks dari sebuah kejadian, dan itu memberi nilai penting pula bagi kita untuk bisa membaca lebih jelas, jernih, dan mendalam atas peristiwa atau kejadian-kejadian yang diulas. Namun demikian, bagi kita semua, yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemahaman yang jelas, jernih, dan mendalam dimaksud membantu kita untuk bisa mengambil manfaat yang lebih besar dari setiap kejadian atau peristiwa yang diulas, dianalisis dan dimaknai di setiap bagian dari seluruh pembahasan, seperti yang dipersembahkan buku

ini. Pemahaman yang baik adalah langkah mendasar yang dibutuhkan oleh seseorang untuk sampai kepada kemampuan dan atau keterampilan yang terukur dalam mengambil pelajaran mulia, atau apa yang diilustrasikan sebelumnya dengan istilah “aksi ambil manfaat”, dari setiap kejadian.

Kita diingatkan oleh karya-karya ilmiah sebelumnya tentang bagaimana memaknai sesuatu, termasuk konsep teoretik dan atau kejadian lapangan. Sebut saja salah satunya karya berjudul *Philosophical Reflections for Educators*.¹⁷ Karya bunga rampai hasil suntingan Charlene Tan (dosen di The National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapura) ini menyajikan telaah analitis terhadap sejumlah konsep teoretik¹⁸ dan kejadian lapangan¹⁹ seperti dimaksud. Diskusi mengenai teori yang terkait hingga implikasinya disajikan dengan sangat baik dalam masing-masing pembahasan konsep teoretik dan atau kejadian lapangan yang ada di dalamnya. Yang menarik lagi dari karya ini, di akhir setiap pembahasan, selalu disertakan ruang untuk refleksi konseptual dan praktis bagi pendidik atau guru untuk kepentingan penunaian tugas mereka dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pembaca diajak untuk merefleksikan setiap konsep teoretik dan atau kejadian lapangan yang dibahas pada setiap bagian pembahasan melalui telaah praktis atas konsep teoretik dan atau kejadian lapangan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan atau pembelajaran dimaksud.

Menunjuk kepada pentingnya refleksi untuk lahirnya

¹⁷ Charlene Tan (ed.), *Philosophical Reflections for Educators* (Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2008).

¹⁸ Lihat, sebagai misal, Lau Chek Wai, “Montessori’s Philosophy of Movement,” dalam Charlene Tan (ed.), *Philosophical Reflections for Educators* (Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2008), hlm. 41-50.

¹⁹ Lihat, sebagai misal, Charlene Tan, “Religious Education and Indoctrination,” dalam Charlene Tan (ed.), *Philosophical Reflections for Educators* (Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2008), hlm. 183-192.

kecakapan dalam “aksi ambil manfaat” atas setiap konsep teoretik dan kejadian lapangan, sesuai dengan tahapan teori *experiential learning* dan *leaftheprinces* serta inspirasi karya ilmiah bunga rampai di atas, maka untuk kebutuhan suksesnya “aksi ambil manfaat” dimaksud, contoh-contoh pemaknaan atas setiap kejadian memang penting dihadirkan. Ini dibutuhkan sebagai referensi semata untuk “aksi ambil manfaat” lainnya atas kejadian hidup lebih luas. Pasalnya, dalam hidup individu dan sosial, kasus bisa tidak sama. Kejadian bisa berbeda-beda. Peristiwa juga bisa beragam. Yang dibutuhkan adalah kecakapan untuk merespons setiap kasus, kejadian atau peristiwa yang bisa terjadi secara tidak sama, atau berbeda, atau beragam. Referensi memegang peranan penting bagi “aksi ambil manfaat” secara lebih luas sebagai pola atau model untuk perujukan menyusul inspirasi yang dilahirkan.

Untuk kepentingan sebagai referensi dimaksud, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang direkam untuk selanjutnya menjadi materi pembahasan dalam sejumlah bagian selanjutnya di buku yang berada di hadapan pembaca ini disajikan dengan semangat tunggal: belajar dari setiap kejadian. Itu karena, seluruh pembahasan dalam buku ini datang dan dihadirkan dengan satu keyakinan kuat: “setiap kejadian adalah pelajaran”, seperti diuraikan di atas. Karena itu, setiap kejadian yang dialami, diikuti, atau disaksikan oleh penulis dibahas secara khusus dalam buku ini untuk memberikan kesempatan kepada pembaca agar bisa mempraktikkan prinsip “setiap kejadian adalah pelajaran” dengan cara mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang diulas. Untuk itu, dalam buku ini, pembaca dilengkapi dengan uraian yang memadai tentang makna dari setiap kejadian yang dijumpai dan dirangkum penulis.

Tidak ada kejadian yang buruk. Semua kejadian adalah

baik. Tinggal bagaimana seseorang merespons kejadian-kejadian itu. Maka, hanya ada dua kategori kejadian: kejadian yang baik untuk ditiru, dan kejadian yang baik untuk tidak ditiru. Teori besar tentang Pendidikan Perubahan serta teori kecil-spesifik *experiential learning* dan *leaftheprinces*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hadir dengan semangat dan sekaligus pelajaran penting “tidak ada kejadian yang buruk”, sebagaimana diuraikan dimaksud. Yang buruk itu lahir karena respons yang tidak baik terhadap kejadian. Kegagalan dalam merespons kejadian akan menentukan apakah seseorang dapat mengambil manfaat dari setiap kejadian ataukah tidak. Tentu, setiap kita selayaknya berusaha menumbuhkan keterampilan tertentu yang dibutuhkan untuk selalu cakap dalam mengambil pelajaran secara bermakna dari setiap kejadian, sebagaimana diuraikan sebelumnya.

BAGIAN DUA

Kebijakan dan Praktik Pendidikan Lintas Budaya

Pendidikan merupakan hajat hidup umat manusia. Posisinya menyatu dalam napas hidup mereka. Selama ada kehidupan, selama itu pula pendidikan dibutuhkan. Sebaliknya, selama pendidikan menjadi perhatian penting, selama itu pula hidup manusia akan memiliki arti. Karena itu, semua gugus sosial di belahan dunia mana pun mereka tinggal memandang pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting, dan karena itu mereka pasti membutuhkan pendidikan yang baik. Bahkan, tidak ada individu atau gugus sosial mana pun yang tidak memerlukan pendidikan. Semua itu terjadi karena manusia, baik secara individu maupun kelompok, pasti memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan cita-cita dan kehendak individu dan sosial mereka, serta sekaligus mengembangkannya, di tengah pergantian dan perubahan hidup antara satu generasi ke generasi berikutnya.

Atas dasar itu, penyelenggaraan pendidikan di mana pun memiliki tujuan yang beraneka segi (*multifaceted*) dan kepentingan yang bertumpuk. Aneka tujuan dan kepentingan tersebut bergerak mulai dari kerangka ideologi, sosial, ekonomi, hingga politik. Kesemuanya berkelindan satu sama lain. Dari sisi ideologi, semua umat manusia pasti merasa perlu untuk melakukan transfer nilai dan keyakinan kepada generasi penerusnya. Mereka semua pasti memiliki kepentingan untuk melakukan konservasi terhadap tata nilai yang mereka miliki kepada generasi berikutnya. Mereka berupaya keras agar nilai

dan keyakinan yang dimilikinya bisa mengalir berlanjut ke generasi mereka berikutnya melalui proses alih yang mereka yakini efektif, berkelanjutan dan berdampak panjang. Bahkan, bisa dikatakan, tidak ada satu pun individu dan gugus sosial mana pun yang tidak memiliki kepentingan untuk melestarikan nilai kepada generasi mereka berikutnya.

Pada titik inilah pendidikan pasti memiliki tujuan ideologi, dan karena itu ia dibutuhkan sebagai medium untuk alih nilai (*transfer of values*) yang operasionalisasinya berada dalam kerangka yang cenderung konservatif atas nilai-nilai dan keyakinan itu. Dikatakan “cenderung konservatif” karena masing-masing dari individu ataupun masyarakat berkepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen penting bagi pelestarian nilai ke generasi berikutnya akibat daya cipta dan dampak yang panjang nan melembaga yang bisa ditimbulkannya pada kehidupan lintas generasi. Bahwa terdapat kemungkinan pergerakan dan atau pergeseran atas nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya menyusul terjadinya perubahan hidup manusia, hal itu tidak mengurangi substansi pendidikan sebagai instrumen dan medium penting untuk konservasi nilai yang dialihkan dimaksud. Meski begitu, kemungkinan lain dalam bentuk pengembangan atas nilai bisa saja menyeruak dan tidak terelakkan menyusul perubahan modus dan gaya hidup generasi yang berbeda dari sebelumnya. Di sinilah diskusi mengenai pendidikan sebagai pembentuk-pengembang peradaban dan sekaligus produk peradaban²⁰ menemukan relevansinya.

Bahkan lebih dari itu, semua manusia, apakah individu maupun kelompok, memiliki kepentingan untuk mempersiapkan anak-anak atau generasi penerus mereka

²⁰ Lihat, misalnya, Robert R. Carkhuff, “Education and the Advancement of Civilization,” *Education*, Vol. 106, Issue 3 (1986): hlm. 241–249.

untuk bisa menjemput masa depannya secara mandiri dan lebih baik. Tentu, kata “menjemput” di sini berarti di dalamnya ada kebutuhan untuk menjadi pemenang atas masa depan, dan bukan menjadi pecundang. Karena itu, setiap dari kita di mana pun berada pasti memiliki kepentingan untuk menjamin masa depan generasi penerus. Itu karena masa depan gugus sosial apa pun, termasuk sebuah bangsa sekalipun, sangat ditentukan oleh positif atau tidaknya masa depan individu-individu yang menjadi generasi penerusnya. Karena itulah, pada titik ini, semua individu dan gugus sosial mana pun membutuhkan pendidikan sebagai instrumen dan medium untuk mempersiapkan generasi penerus mereka untuk memasuki dunianya sendiri di masa depan dengan wajah penuh optimisme. Tujuan sosial pendidikan semacam ini dimiliki oleh semua gugus sosial dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.

Selain untuk penjaminan keberlanjutan tata nilai dan keyakinan serta untuk pengembangan sumber daya manusia lintas generasi di atas, pendidikan juga menjadi instrumen vital untuk melakukan mobilisasi vertikal rakyatnya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, pendidikan tak bisa dilepaskan dari tujuan ekonomi. Beragam konsep pendidikan modern, mulai dari *link and match* (hubung dan padu)²¹ hingga vokasi,²² dilahirkan di antaranya untuk merespons kebutuhan yang konkret atas hubungan antara pendidikan dan kepentingan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesejahteraan. Konsep-konsep tersebut didesain dalam rangka mendekati kompetensi peserta didik ke

²¹ Azmil Azman et al., “Link and Match Policy in Vocational Education to Address the Problem of Unemployment,” *International Journal of Multi Science*, Vol. 1, No. 6 (Oktober 2020): hlm. 76-85.

²² Stephen Billett, *Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects* (Dordrecht; Heidelberg, London; New York: Springer, 2011).

kebutuhan pasar kerja beserta tuntutan dan tantangannya. Pendidikan dipandang sebagai produsen sumber daya manusia yang bisa melahirkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja, dan karena itu diharapkan sedemikian rupa agar tidak ada celah yang lebar antara luaran yang dihasilkan dalam bentuk lulusan dan keterampilan-kecakapan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Dalam konteks tujuan ekonomi ini, pendidikan bergerak menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan material individu dan warga masyarakat.

Semua individu dan gugus sosial berkepentingan untuk menjamin keberlangsungan hidup material mereka secara lebih baik dari waktu ke waktu. Kepentingan ini akan terasa semakin membesar oleh negara, karena negara memiliki kewajiban untuk memikirkan kehidupan rakyatnya secara merata di seluruh wilayah di tanah air. Pemerintah tentu tidak hanya memikirkan kesejahteraan individu dan masyarakat di suatu daerah atau wilayah tertentu saja, melainkan seluruh rakyatnya secara adil dan merata. Ukurannya sangat sederhana: kesejahteraan material rakyat di semua wilayah semakin bertambah meningkat. Karena itu, pendidikan lalu dianggap penting untuk menyiapkan generasi anak bangsa yang terampil dan cakap secara substantif dan teknis dalam menghadapi tantangan hidup terkini dan mendatang agar lebih siap dalam memandang masa depan serta terjauh dari jebakan mata rantai pengangguran.

Jika ditarik ke kepentingan yang lebih luas lagi, bahkan, setiap negara di dunia memiliki kepentingan politik atas pendidikan. Konkretnya, setiap negara memiliki tujuan politik terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan di dalamnya. Itu berlaku baik pada kategori pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/negara (atau yang populer disebut dengan sekolah/madrasah negeri), atau pendidikan

yang diselenggarakan oleh masyarakat (atau yang terkenal dengan istilah sekolah/madrasah swasta). Tujuan politik atas pendidikan dimaksud adalah untuk menciptakan warga negara yang baik (*good citizen*) sesuai dengan konstitusi yang dianut masing-masing negara itu.²³ Di sinilah lalu, kita bisa melihat bahwa setiap negara membuat aturan tentang penyelenggaraan semua jenis dan level pendidikan yang ada di masing-masingnya agar kesemuanya sesuai dengan tujuan ekonomi, sosial maupun politik yang dimiliki.

Atas pertimbangan dan berbagai konteks di atas, maka pendidikan selalu menjadi perhatian besar lintas batas budaya seluruh individu dan gugus sosial serta bahkan negara, seperti ditemukan oleh penulis melalui serangkaian perjalanan akademik yang dilakukan sebagaimana diuraikan sebelumnya, terlepas kepentingan politik, sosial, maupun—mungkin bahkan—agama yang melingkari. Untuk itulah, Bagian Dua buku ini memandang penting untuk menurunkan pembahasan dan telaah terhadap kebijakan dan praktik pendidikan lintas budaya dimaksud, dengan materi uraian dan analisis sebagaimana berikut:

- ❑ *Look, Learn, and Practice: Strategi Pendidikan Tanggap Bencana*
- ❑ Kutipan yang Menjadi Karakter Sekolah
- ❑ Kebijakan Pro-Madrasah
- ❑ Madrasah dan Sekolah Adalah Sama
- ❑ Jaringan Alumni, Aset Lembaga
- ❑ Pendidikan dan Tantangan Brain Drain
- ❑ Volunterisme Pendidikan
- ❑ *Academical Village*
- ❑ Orang Tua, Jangan Telat Mengajarkan Moral!

²³ Stephan Millett, "The State, the Soul, Virtue and Potential: Aristotle on Education," dalam Charlene Tan dan Benjamin Wong (eds), *Philosophical Reflections for Educators* (Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2008), 23.

- ❑ Dilema Pendidikan di Kota Perbatasan
- ❑ Bersyukur Itu Menjaga Tradisi
- ❑ Ekosistem Sosial Ekonomi, Prasyarat Pendidikan Vokasi
- ❑ Sekolah Integrasi; Inklusi Yes, Vokasi Oke

Melalui pembacaan terhadap serangkaian materi kebijakan dan praktik pendidikan lintas budaya di atas, pembaca difasilitasi oleh buku ini untuk bisa mengambil pelajaran dari setiap materi yang dibahas, sebagaimana platform akademik awal yang menjadi perhatian besar buku ini: “Setiap Kejadian adalah Pelajaran”. Detail pembahasan untuk masing-masing dari materi kebijakan dan praktik pendidikan lintas budaya di atas bisa dijumpai pada lembar uraian selanjutnya, seperti tampak pada halaman-halaman berikut, sesuai dengan urutannya.

Look, Learn, and Practice: Strategi Pendidikan Tanggap Bencana

Strategi akan memiliki nilai efektivitas yang sangat tinggi jika berada di tangan pihak yang berpengalaman. Sama strategi tapi beda pelaku, hasilnya juga akan beda. Karena itu, belajar strategi kepada yang berpengalaman menjadi kebutuhan hidup. Provinsi Osaka (*Osaka Prefecture Government*) Jepang dan Jawa Timur memiliki kemiripan. Osaka dikenal sebagai wilayah di negeri Sakura yang sangat akrab dengan bencana alam. Jawa Timur juga menjadi wilayah dengan potensi bencana alam yang tinggi. Karena itu, penting bagi Provinsi Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk belajar tentang pendidikan tanggap bencana kepada Pemerintah Osaka. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan muhibah dalam rangka memperkuat pendidikan tanggap bencana melalui “studi tiru” ke Osaka Jepang 10-16 November 2018. Pada bagian ini, catatan perjalanan membahas bagaimana pendidikan tanggap bencana dilakukan Pemerintah Osaka. Lebih khusus lagi, catatan ini membahas strategi pendidikan tanggap bencana yang dilakukan melalui film sebagai media sosialisasi dan kampanye tanggap bencana dimaksud kepada masyarakat, termasuk siswa sekolah.

Judul tulisan ini, sebetulnya, adalah judul film. Bukan hasil kreasi saya. Saya hanya mengambilnya saja dari judul film itu. Secara verbatim, saya tidak menyusun tiga kata tersebut ke dalam satu rangkaian bahan baku judul tulisan ini. Kata *look*, *learn*, dan *practice* memang sudah lama ada karena memang terambil dari Bahasa Inggris. Masing-masing berarti “lihat”, “pelajari”, dan “lakukan”. Dari bahan dasarnya, tiga kata dimaksud berakar dalam tradisi kebahasaan Inggris. Dan, dari sisi susunan redaksional pula, rangkaian tiga kata yang ada pada judul juga bukan karya saya.

Rangkaian tiga kata di atas adalah judul film tayangan pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang. Yang memproduksi film itu adalah Tsunami Center. Nama

panjangnya adalah *Tsunami/Storm Surge Disaster Prevention Station*. Lembaga ini milik Pemerintah Provinsi Osaka yang didirikan sebagai bagian dari pelebagaan upaya terstruktur untuk mengantisipasi dan mencegah jatuhnya korban akibat petaka gelombang pasang tsunami. Dari namanya saja sudah bisa ditebak bahwa lembaga ini memiliki tugas penting untuk melakukan serangkaian pendidikan tanggap bencana di Osaka, sebuah provinsi di Jepang yang menjadi wilayah rawan bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga angin topan. Apalagi, separuh wilayah provinsi ini berada di daratan yang terbentuk dari dan atau berupa semacam atau setara “lembah” yang posisinya lebih rendah daripada ketinggian air laut.



Foto: bagian depan *Tsunami Centre* atau *Tsunami/Storm Surge Disaster Prevention Station*

Cerita penyusunan judul tulisan ini tak lepas dari film hasil produksi Tsunami Center di atas. Saya sangat tersentak

sejak menyaksikan film itu begitu diputar di layar kantor itu. Judul film itu begitu menggelitik. Begitu diputar, film itu langsung tampil secara menyolok dengan judul *Look, Learn, and Practice*. Saya pun sontak terdorong hebat (baca: terangsang) untuk menyaksikan pemutaran film itu. Benakku langsung berbisik kala itu: “*eh... kenapa film ini pakai judul Look, Learn, and Practice?*” Ini pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh film ini. Pasti ada nilai yang sedang ingin disampaikan kepada penonton seperti diriku. Begitu bisikku dalam hati. Sebab, dari sisi susunan redaksi, judul seperti ini mirip dengan judul film-film bermutu. Lihat saja film berjudul *Eat, Pray, Love* yang dibintangi oleh Julia Roberts dan disutradarai oleh Ryan Murphy.

Setiap slot tayangan kuperhatikan secara seksama. Kunikmati setiap bagian dari tayangan film itu. Dan akhirnya kusimpulkan: film ini tidak hanya menarik dari sisi materi tayangan, melainkan juga skenario yang dibuat. Materi tayangan film menawan karena isinya begitu menguras emosi dan perasaan. Bahkan, tak jarang tayangan itu membuat hati membuncah akibat dahsyatnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menjadi fokus tayangan film.

Tapi, aku sadar sesadar-sadarnya, bahwa tayangan film itu dibuat dalam rangkaian pendidikan tanggap bencana. Karena itu, aku pun tak boleh larut dan hanya fokus pada materi tayangannya semata. Aku sadar, aku harus juga mengamati dan menelaah bagaimana pendidikan tanggap bencana itu dilakukan melalui film itu. Termasuk bagian pentingnya adalah bagaimana skenario yang dibuat agar pendidikan tanggap bencana melalui media film itu efektif bagi peserta didik dan atau warga Osaka Jepang pada khususnya, dan seluruh umat manusia pada umumnya.

Kenapa saya harus memberikan perhatian pada

aspek bagaimana pendidikan tanggap bencana itu dilakukan melalui film itu? Saya ingin mempelajari bagaimana strategi pendidikan dilakukan untuk memperkuat nilai dan keterampilan tanggap bencana. Ya, strategi pendidikan itu yang harus kuperhatikan agar kepentingan untuk menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan tanggap bencana di tengah-tengah masyarakat bisa saya ambil hikmahnya. Bisa kutarik pelajarannya. Bisa kutangkap inspirasinya. Dan tentu bisa kutiru *best practice* (praktik terbaik)-nya untuk kepentingan penguatan pendidikan serupa di negeri sendiri, Indonesia.

Di titik itulah, saya ikuti betul tahapan demi tahapan dalam skenario tayangan film itu. Dalam catatan saya, melengkapi materi tayangan yang sangat menawan, film dimaksud dihadirkan dengan skenario yang bagus dan efektif. Rincian urutannya sebagaimana berikut. *Pertama*, tayangan bencana diikuti dengan tingkat kedahsyatan dampak buruk yang ditimbulkan. *Kedua*, penjelasan apa itu tsunami dan gelombang besar air laut. *Ketiga*, tayangan tentang bayangan jika bencana itu mengenai kawasan umum yang dekat dengan kita, seperti pusat perbelanjaan, sentra hunian dan perkantoran. *Keempat*, bagian tayangan tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi tsunami dan Anda sedang berada di pusat perbelanjaan, *subway*, kantor, dan rumah, termasuk kesiapsiagaan dengan tas logistik untuk persiapan evakuasi diri.

Maka, praktik pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang, sebagaimana ditunjukkan oleh film dengan judul di atas, memberikan pelajaran sangat berarti bahwa pendidikan tanggap bencana, dan juga yang lainnya, tidak bisa dimulai dan terlebih-lebih dengan ceramah dan instruksi yang berlebihan. Proses penumbuhan pengetahuan dan sekaligus penguatan kesadaran tanggap bencana, dan saya yakin juga lainnya, selayaknya didahului dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik dan atau individu anak bangsa

untuk melihat secara lebih dekat (baik fisik langsung maupun melalui media, termasuk audio-visual) terhadap materi yang menjadi fokus pembahasan dan atau pembelajaran. Materi dimaksud mulai dari fenomena (kasus dan padanannya) hingga dampaknya. Melalui substansi yang dikandung oleh prinsip *look* (lihat), anak didik dan atau individu anak bangsa dibawa ke dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan mereka segera merasa dekat dan menjadi bagian dari fenomena itu.

Dengan begitu, akan tumbuh pengetahuan awal pada diri peserta didik dan atau individu anak bangsa tentang apa dan bagaimana materi yang sedang menjadi fokus pembelajaran itu. Dalam kasus pendidikan tanggap bencana, setelah melihat secara dekat tentang fenomena yang menunjuk kepada rangkaian mulai dari gempa bumi, dan gelombang air pasang dari laut ke daratan, hingga jatuhnya korban harta dan nyawa, para peserta didik dan atau individu anak bangsa bisa memiliki pengetahuan awal tentang apa itu bencana alam dan dampak buruknya yang dahsyat bagi sebuah wilayah beserta isinya. Termasuk manusia yang tinggal di dalamnya.

Lalu, dari pengetahuan awal itu, diharapkan mulai muncul rasa ingin tahu yang besar dan lebih mendalam pada diri peserta didik dan atau individu anak bangsa tentang fenomena bencana alam dimaksud. Lalu, proses lanjutannya berupa pemberian materi informasi tentang *what* (apa), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana) bencana alam itu terjadi. Lalu materi utama, seperti tsunami, disampaikan sehingga peserta didik bisa mengetahui lebih detil tentang apa, mengapa dan bagaimana bencana alam itu terjadi. Pada titik inilah, proses *learning* (belajar) diharapkan terjadi dan semakin menemukan lahan suburnya.

Kemudian, untuk memungkinkan proses belajar tersebut bisa memperkuat dampak positifnya secara terukur pada diri peserta didik dan atau anak bangsa, maka tahapan paling

krusial harus segera dilalui: penguatan kesadaran dan sekaligus pengubahannya ke dalam tindakan konkret. Pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang, seperti dilakukan melalui tayangan film di atas, memberikan inspirasi agar proses ini dilakukan melalui penerjemahan prinsip tanggap bencana ke dalam langkah-langkah konkret yang mudah dilakukan oleh peserta didik dan atau individu anak bangsa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Isinya semacam manual atau petunjuk konkret tentang apa yang harus mereka lakukan, mulai dari bagaimana merencanakan kehidupan sehari-hari hingga apa yang harus mereka kerjakan pada saat terjadi bencana alam. Itulah yang diajarkan oleh kata *practice* (lakukan) dalam rangkaian pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang di atas. Dengan begitu, tidak saja pengetahuan yang didapat dan juga kesadaran baru yang diperoleh tentang bencana alam, akan tetapi lebih jauh hingga tindakan praktis apa serta bagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap potensi bencana itu.

Di sinilah rangkaian proses pendidikan tanggap bencana bisa dilakukan secara komprehensif. Proses itu tidak saja berkaitan dengan ranah kognitif dan afektif, melainkan bergerak hingga ke ranah psikomotorik. Proses komprehensif ini penting dijamin agar problem alam, dan juga sosial sekalipun, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak bangsa bisa dipahami, disadari dan sekaligus dipecahkan secara konkret. Dengan begitu, tugas dan tanggung jawab tidak hanya menjadi dominasi generasi tertentu dan atau kelompok sosial-ekonomi tertentu pula, melainkan menjadi milik bersama. Karena itu, proses penguatan kesadaran dan solusinya juga harus melibatkan semua komponen dan unsur warga bangsa secara keseluruhan. Pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang cenderung sukses besar karena ia telah menjadi ritme dan sekaligus melalui proses yang demikian ini.

Kita selama ini memang telah diperkenalkan dengan strategi “amati”, “tiru”, dan “modifikasi” yang kemudian terkenal dengan akronim ATM. Strategi ini sangat efektif untuk menanamkan dan memperkuat kreativitas pada diri peserta didik atau anak bangsa. Meskipun kreativitas yang dibangun dengan strategi ATM tersebut termasuk ke dalam derajat yang cenderung ke dalam posisi di bawah, strategi itu memainkan peranan penting untuk memfasilitasi pengembangan kreativitas diri peserta didik agar segera bisa menjadi anak bangsa yang hadir dengan sesuatu yang baru sebagai kontribusi individu kepada bangsa dan negara.

Namun kini, strategi *look, learn, and practice*, seperti yang diajarkan oleh praktik penguatan pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang, menjadi strategi pendidikan dan atau pembelajaran yang cenderung jitu untuk kepentingan dua hal. *Pertama*, penguatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Tidak saja kepentingan ini berlaku bagi kasus pendidikan tanggap bencana semata, melainkan juga fokus pendidikan lainnya yang mempersyaratkan terjadinya sinkronisasi yang kuat antara pengetahuan, sikap, dan praktik nyata. Pendidikan karakter secara lebih luas bisa mengikuti *track* (jalur) yang disediakan dan dicontohkan oleh pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang ini.

Kepentingan *kedua* yang dikandung oleh strategi *look, learn, and practice* di atas adalah untuk penguatan tata kelola perubahan (*change management*) pada dunia pendidikan. Semangat yang diajarkan oleh pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang adalah bahwa perubahan tidak cukup hanya di ranah pengetahuan semata. Pun juga kesadaran. Perubahan harus dijamin hingga ke ranah perilaku konkret. Itu karena naiknya pengetahuan tidak setara dengan, dan diikuti oleh, kenaikan yang sama pada kesadaran diri. Bahkan, naiknya taraf pengetahuan dan kesadaran tidak serta merta diikuti dengan

perilaku nyata. Belajar dari strategi pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang, prinsip dan proses berikut ini menjadi mutlak dilakukan: Pendidikan tidak boleh berhenti di level pengetahuan dan pemahaman, melainkan harus terus bergerak hingga titik kesadaran dan praktik nyata. Itulah prinsip tata kelola perubahan oleh pendidikan tanggap bencana di Osaka Jepang yang harus dijadikan pelajaran berharga bagi dunia pendidikan secara luas.

Kutipan Yang Menjadi Karakter Sekolah

Pendidikan tak boleh kehilangan karakter. Lebih-lebih saat pendidikan itu dijalankan dari semangat dan prinsip hidup tokoh idola yang cenderung menjadi ideologinya. Sekolah serta perguruan tinggi sebagai representasi lembaga pendidikan, karena itu, tak juga boleh kehilangan karakter yang mendasarinya. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan yang bertajuk *exposure visit* ke sejumlah instansi pemerintahan dan sejumlah komunitas, baik di perkotaan maupun pedesaan, di Kanada dari tanggal 11 Mei hingga 4 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan *project* penguatan kepemimpinan lokal untuk pembangunan di Indonesia (*Supporting Islamic Leadership/SILE*) hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) atau yang dalam perkembangan berikutnya dikenal juga dengan Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD). Pada bagian ini, catatan perjalanan bersentuhan dengan pengalaman kampus The Coady International Institute dalam memperkuat dirinya sebagai perguruan tinggi pemberdayaan masyarakat dengan berangkat dari ideologi dan perjuangan tokoh ideologinya.



Coady International Institute



Gambar dan Kutipan Mutiara Mr. Coady

*If we are wise, we will help the people everywhere
to get the goal and abundant life...
to become masters of their own destiny
(jika kita bijak, kita akan membantu masyarakat
di manapun berada untuk mendapatkan tujuan
dan hidup berkelimpahan...
untuk menjadi tuan bagi nasib mereka sendiri)*

Kutipan di atas merupakan salah satu dari serangkaian ungkapan mutiara yang diletakkan di dinding di sepanjang koridor utama bangunan kampus pendidikan. *Coady International Institute*, begitulah nama kampus pendidikan itu. Lembaga yang lebih akrab di telinga publik Kanada dan dunia internasional dengan nama pendek *Coady Institute* itu merupakan bagian dari St. Francis Xavier University.

St. Francis Xavier University sendiri berdiri tahun 1855. Letaknya memang berada di kota kecil bernama Antigonish. Kota ini merupakan bagian dari provinsi yang terletak di salah satu kawasan maritim Kanada, Nova Scotia. Sedangkan Coady Institute berdiri tahun 1959, sekitar seabad setelah berdirinya universitas di atas yang menjadi payung kelembagaannya.

Kampus St. Francis Xavier University ini sangat terkenal sebagai kampus pemberdayaan masyarakat serta pusat keunggulan di bidang pengembangan kepemimpinan. Secara spesifik, Coady Institute sendiri sangat terkenal sebagai pusat keunggulan dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan kepemimpinan masyarakat (*community leadership education*). Seperti jelas tercantum dalam kutipan di atas, kampus ini berprinsip untuk “membantu masyarakat di manapun berada untuk mendapatkan tujuan dan hidup berkelimpahan... untuk menjadi tuan bagi nasib mereka sendiri.”

Meskipun terletak jauh dari pusat keramaian Provinsi Nova Scotia, penduduk di kota itu sangat mencintai dan berbangga hati dengan Coady Institute pada khususnya dan St. Francis Xavier University pada umumnya. Selain menjadi satu-satunya ikon kota tersebut yang patut dibanggakan, keberadaan kampus tersebut menjadi penanda suksesnya gerakan sosial tahun 1920an yang dikenal dengan *The Antigonish Movement*.

Gerakan sosial itu dimobilisasi oleh kampus St. Francis Xavier University untuk melakukan pengembangan

masyarakat bersama semangat hidupnya. Tokoh sentralnya adalah para pemuka agama dan tokoh pendidikan lokal seperti Moses Coady dan Jimmy Tompkins. Coady sebagai nama salah satu tokoh gerakan akhirnya diabadikan sebagai nama kampus pengembangan masyarakat. Ungkapan-ungkapan mutiaranya lalu diabadikan pada hampir setiap bagian sepanjang bangunan kampus. Mirip *al-mu'allaqat* untuk konteks tujuh rangkaian syair ternama (*qashidah*) di Mekkah pada masa pra-Islam yang digantungkan untuk menghiasi dinding-dinding Ka'bah.

The Antigonish Movement merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas ekonomi dan sosial. Pergerakannya meliputi sektor pendidikan orang dewasa, koperasi, keuangan mikro, dan pengembangan masyarakat pedesaan untuk membantu masyarakat kecil di sekitar kawasan maritim Kanada. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial warga setempat.

Atas keberhasilan gerakan sosial itu, lahirlah serangkaian sistem sosial-ekonomi dan politik yang saat ini dinikmati oleh masyarakat Antigonish pada khususnya dan Nova Scotia pada umumnya. Lahirnya sistem serikat kredit (*credit union*) Nova Scotia dan New Brunswick berhutang budi luar biasa besar kepada gerakan sosial di atas. Bahkan seiring dengan besarnya dampak gerakan sosial dimaksud, pengaruhnya dirasakan hingga ke pembenahan sistem provinsi lainnya di Kanada.

Inilah latar belakang mengapa begitu memasuki gedung kampus Coady Institute pada khususnya, saya mendapati begitu banyak kutipan yang bertebaran di sepanjang bangunan kampus tersebut. Tidak saja di sepanjang koridor gedung yang berjejer di area kampus tersebut. Tapi juga di sepanjang taman dan lintasan pejalan kaki yang menghiasi keindahan kampus

tersebut.

Contoh lain di luar kutipan di awal tulisan ini bisa diturunkan di sini. Seperti: *Masters of their own destiny...they will use what they have to secure what they have not*. Artinya, “Tuan bagi nasib mereka sendiri ... mereka akan menggunakan apa yang mereka miliki untuk menggapai apa yang tidak mereka miliki”. Maksudnya, potensi masyarakat layak untuk dikembangkan agar mereka bisa memaksimalkan capaian hidup untuk kebaikan mereka sendiri.

Latar belakang di atas menjelaskan mengapa begitu bangganya masyarakat lokal terhadap kampus itu. Lebih dari itu, dipajangnya berbagai gambar dan kutipan ungkapan mutiara tokoh pendidikan seperti Coady hampir di semua ruangan menjadikan semangat dan praktik pembelajaran kampus itu berorientasi sangat kuat kepada pengembangan dan atau pemberdayaan masyarakat.

Karakter kampus itu disemai dan sekaligus diabadikan melalui visualisasi dari gagasan-gagasan besar tokoh utamanya. Visualisasi berupa gambar dan ungkapan mutiara itu menjadi pengingat sehingga karakter tokoh ideolog utama tersebut bisa diturunkan secara kuat ke para peserta didik. Oleh karena itu, di Kanada dan dunia internasional, nama Coody Institute dan St. Francis Xavier University lekat erat dengan konsep dan praktik pengembangan masyarakat.

Apa pelajaran bagi sekolah-sekolah kita di Indonesia? Apa pula makna yang bisa dipetik secara spesifik oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di negeri ini?

Kita memang penting belajar dari pengalaman baik Kanada. Dalam diskusi saya dengan sejumlah pejabat kementerian pendidikan di Provinsi Ontario dan British Columbia Kanada, ada sebuah kesan kuat bahwa praktik untuk mengabadikan ungkapan-ungkapan mutiara para tokoh utama

di balik sebuah lembaga pendidikan tidak saja dilakukan oleh perguruan tinggi, tapi juga sekolah-sekolah. Nilai penting dari praktik semacam ini sangat disadari oleh sekolah-sekolah di Kanada untuk menjadi penguat pembentukan karakter peserta didik, sebagaimana yang diidealisasikan tokoh ideolog utama tersebut. Hal ini biasa terjadi di sekolah-sekolah yang awalnya digerakkan oleh lembaga-lembaga agama, seperti gereja.

Sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah di bumi pertiwi Indonesia layak berinterospeksi atas apa yang selama ini dipraktikkan. Merujuk kepada pengalaman-pengalaman berbagai lembaga pendidikan di Kanada di atas, sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah di Indonesia sangat perlu untuk memperkuat strategi pembangunan pendidikan karakter di dalamnya. Tokoh-tokoh utama di lingkungan masing-masing, mulai dari Mbah Hasyim Asyari, Mbah Bisyr Syamsuri, Mbah Wahab Hasbullah, hingga Soekarno dan Hatta sangat perlu untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi pembelajaran.

Gagasan-gagasan besar mereka serta gambar-gambar diri mereka sudah sepatutnya menghiasi setiap ruangan. Selama ini, hal itu masih sulit didapatkan. Akibatnya, tidak sedikit peserta didik kita yang tidak mengenal sejarah perjuangan mereka. Para peserta didik lebih mengenal tokoh-tokoh selebritis yang kemunculannya bak jamur di musim hujan daripada kyai-kyai besar dan tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa kepada bangsa dan negara ini melalui pengabdian mereka dalam berbagai bentuknya.

Pentingnya pengutipan gagasan-gagasan besar mereka serta pemajangan gambar-gambar diri mereka terasa sangat nyata saat dikaitkan dengan tantangan dan ancaman ideologis yang berkembang saat ini dan mempengaruhi karakter peserta didik kita. Tidak saja oleh globalisasi ekonomi, akan tetapi juga

globalisasi-transnasionalisasi ideologi-kultural.

Pembelajaran kita saat ini sedang ditantang oleh gemerlapnya budaya serba instan. Pemantiknya adalah globalisasi yang memberikan kemudahan akses terhadap budaya asing, apapun sumber dan bentuknya. Belum lagi di internal Islam Indonesia, yang ditandai oleh makin menjamurnya ideologi-ideologi ekstremis atau garis keras yang sering menjadikan kelompok-kelompok Islam moderat sebagai lawan. Pada aras ini, ideologi Islam moderat sedang berada dalam ancaman dan tantangan yang tidak kecil.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita menggelorakan kembali semangat para tokoh pendiri bangsa ini melalui jalur pendidikan formal. Kita wajib membentengi generasi muda saat ini dan mendatang dari ancaman dan tantangan di atas. Pesantren tidak menjadi masalah dalam hal ini karena ada figur kyai yang menjadi pelembaga langsung tradisi yang diidealisasikan. Namun, sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang tidak memiliki modal sosial-kultural seperti halnya pesantren dimaksud membuat mereka dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar untuk menjamin terlembaganya ideologi dan tradisi Islam moderat di tengah tantangan ideologi eksternal yang besar pula.

Pemampangan gambar diri para kyai yang menjadi ideolog utama Islam moderat dan para tokoh pendiri bangsa yang menjadi ideolog bangsa ini beserta pemajangan ungkapan-ungkapan mutiara mereka, sebagai contoh lainnya, sangat mendesak dilakukan di seluruh bangunan lembaga pendidikan yang ada di bumi pertiwi ini. Praktik ini bisa dijadikan sebagai salah satu inovasi untuk memperkuat standar sarana dan prasarana pendidikan. Dengan begitu, karakter pendidikan yang berbasis ideologi dan tradisi Islam moderat dan kebangsaan Indonesia bisa disemai dan dilembagakan

secara lebih kuat dan sinergis, sebagaimana pengalaman lembaga pendidikan di Kanada di atas.

Kebijakan Pro-Madrasah

Kuasa politik birokrasi memang untuk melayani. Bukan justeru menuntut dilayani. Muaranya adalah untuk kebijakan bersama. Tak pilih pandang siapa yang harus dilayani. Minoritas-mayoritas hanyalah urusan besar-kecil. Dan birokrasi harus dipersembahkan sebesar-besarnya untuk kebijakan bersama. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan ke Kota Davao, Filipina, pada tanggal 14 Mei hingga 1 Juni 2012 dalam rangka mengikuti kursus pendek (*short course*) *Mindanao Peacebuilding Institute/MPI 2012 Annual Peacebuilding Training* (Pelatihan Pembangunan Perdamaian Tahunan MPI 2012) dengan tajuk “*Restoring Justice, Building Peace*” (Memperbaiki Keadilan, Membangun Perdamaian). Catatan perjalanan pada bagian ini memotret bagaimana pemerintah kota Davao memperlakukan minoritas Muslim dengan sebaik mungkin. Salah satunya melalui kebijakan advokasi terhadap lembaga pendidikan Islam bagi minoritas Muslim di dalamnya. Namanya madrasah.



Foto Situasi Kelas Pembelajaran di Madrasah Kota Davao

Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan kesempatan mengunjungi pusat Kota Davao pada tanggal 14 November 2012 dalam rangkaian kegiatan akademik saya kala itu. Itu penting tidak saja untuk mengetahui kemajuan kota.

Melainkan juga untuk melihat secara dekat bagaimana modal sosial dan kultural dimaksimalkan oleh kota itu. Meskipun tidak sepenuhnya bersifat representatif, pusat kota menjadi miniatur tentang desain pengembangan sosial dan fisik kota.

Persis di pusat kota, kunjungan tersebut akhirnya mengantarkan saya ke bangunan Balai Kota (*City Hall*). Mata saya pun tertuju langsung ke sebuah bangunan di sebelah kanan Balai Kota itu. Tulisan Arab pada papan yang menempel di bangunan itu yang menjadi penyebabnya. Tulisan itu berbunyi: *Maktab ittihad al-madaris al-`arabiyah li al-tanmiyah tahta maktab al-`umdah*. Di bawahnya tertulis terjemahan dalam Bahasa Inggris: *Office of the madrasah comprehensive development and promotion program*. Terjemahan Bahasa Indonesianya: Kantor program pengembangan komprehensif dan promosi madrasah.

Saya pun tak bisa menahan diri untuk segera bertanya perihal tulisan Arab-Inggris tentang madrasah kepada pemandu rombongan kami. Namanya Anna Escalante. Dia pegiat senior dari Mindanao Peacebuilding Institute (MPI), sebuah lembaga pengembangan dan penciptaan perdamaian ternama di Kota Davao.

Pertanyaan saya pertama kali berkaitan dengan keberadaan institusi pendidikan madrasah di Kota Davao. Pertanyaan itu penting saya ajukan karena fakta adanya sebuah gedung berlantai dua persis di sebelah kanan Bali Kota namun bertuliskan nama madrasah. Bagi saya, keberadaan madrasah di kawasan lingkaran satu pusat pemerintahan kota di mana Muslim minoritas layak menjadi bahan analisis.

Tidak banyak di dunia ini yang memiliki desain tata kota yang memberikan tempat strategis bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan madrasah. Apalagi di kawasan mayoritas non-Muslim. Kalaulah ada kebijakan yang pro-

madrasah, paling banter lokasi peruntukan madrasah dimaksud berada di pinggiran kota.

Desain tata Kota Davao menjadi kasus menarik. Alih-alih diletakkan di pinggiran kota, keberadaan madrasah justru persis di jantung pemerintahan kota. Anna Escalante yang secara sosio-kultural tidak berlatar belakang Muslimah menjelaskan, kebijakan pemerintahan Kota Davao sangat akomodatif terhadap pendidikan madrasah. Hingga gaji gurunya pun ditanggung oleh pemerintah lokal Davao. Termasuk juga pembangunan fisik sarana-prasarana. Intinya, pemerintah Kota Davao memberikan perhatian besar pada pendidikan madrasah, sebagaimana pendidikan pada umumnya.

Perbincangan itu pun makin lama makin menimbulkan daya tarik luar biasa kepada saya. “Semangat akademik” saya sebagai akademisi semakin membuncah saat penjelasan mengenai kebijakan pro-madrasah oleh pemerintah Kota Davao semakin dalam diberikan. “Aku harus cari tahu lebih banyak tentang kebijakan dan praktik pro-madrasah ini,” begitu naluri akademikku berbisik.

Akupun lalu mengarahkan sorot mataku ke berbagai arah di Balai Kota itu. Terutama yang berdekatan dengan bangunan madrasah. Kudapati lalu sesosok laki-laki berusia menjelang lanjut. Lalu ucapan salam keluar bersahutan di antara kami. Pria ini bernama Umar. Dia dulunya beragama Kristen, lalu masuk Islam. Setelah itu, bekerja di Arab Saudi selama tigabelas tahun. Sepuluh tahun di Makkah, dan sisanya berpindah-pindah di beberapa kota di Saudi. Sekembali dari Saudi, dia aktif bersosialisasi dan beraktivitas bersama masyarakat Muslim Kota Davao pada khususnya.

Melihat kami membicarakan soal madrasah, dia pun tertarik menimpali. Tentu, nada perkenalan mengawali obrolan kami, agar kedekatan bisa diraih dengan penuh kehangatan.

Karena dia pernah di Timur Tengah, maka obrolan sengaja saya arahkan dalam Bahasa Arab.

Lalu, dia pun menjelaskan banyak hal tentang madrasah. Tidak saja latar belakang keberadaan madrasah di lokasi yang strategis di pusat kota. Tetapi, lebih dari itu, juga posisi madrasah dalam kerangka konseptual dan praktis pelaksanaan pendidikan di kota itu. Secara lebih spesifik, dia menyebutkan adanya empat madrasah di Kota Davao yang menjadi bagian dari sistem pendidikan lokal. Keempat madrasah itu menjadi *public school* (sekolah negeri).

Tentu, penjelasan yang diberikan Umar kepada saya adalah sejauh yang dia ketahui. Juga, itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota dari masyarakat Muslim Kota Davao. Ini yang dalam bahasa akademik disebut dengan model sejarah lisan. Yakni, rekaman sejarah seperti yang dipahami dan disampaikan oleh anggota masyarakat yang hidup dan menjadi bagian dari denyut sejarah kawasan itu sendiri.

Tapi, satu hal yang pasti bahwa rangkaian penjelasan dari dua sumber informasi di atas cukup dapat mewakili untuk digunakan menjelaskan perihal madrasah dan kebijakan pemerintah kota yang pro terhadapnya. Dua sumber informasi itu berasal dari latar belakang sosial keagamaan yang berbeda. Namun, pesan yang disampaikan serupa: kebijakan pro-madrasah memang ada dalam pelaksanaan pemerintahan di Kota Davao. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas informasi yang muncul terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan akurasinya.

Melihat fakta di Davao di atas, kita yang berada di Indonesia seharusnya patut merasa malu saat madrasah masih mengalami peminggiran dari kebijakan pemerintah. Kasus yang menimpa alumni madrasah aliyah di pesantren Guluk-Guluk pada proses rekrutmen anggota Polri Kabupaten Sumenep

pada pertengahan 2012 lalu adalah salah satu contohnya kala itu. Dia ditolak mendaftar saat itu karena statusnya sebagai alumni madrasah, dan itu menjadi ironi besar dari perlakuan pengambil kebijakan di Indonesia terhadap madrasah dalam pengalaman pasca reformasi.

Pelajaran oleh kebijakan pemerintah Kota Davao di atas selayaknya menumbuhkan kesadaran tinggi bahwa di negeri yang Muslimnya minoritas saja, pemerintahan kotanya memberikan perhatian yang cukup kepada madrasah. Maka, sungguh lacur, di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia, madrasah masih kerap menjadi korban diskriminasi dan peminggiran.

Diakuinya posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memang sebuah prestasi menarik. Tapi, menguatnya semangat dan praktik otonomi daerah menyisakan masalah bagi nasib madrasah. Karena berada di bawah kewenangan vertikal Kementerian Agama, maka madrasah tidak termasuk ke dalam kewenangan yang didelegasikan ke kekuasaan pemerintah daerah.

Akibatnya, kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang menambah kekuatan modal finansial pemerintah daerah tidak memberikan dampak signifikan kepada perkembangan madrasah. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pendidikan oleh pemerintah daerah hanya menyentuh lembaga pendidikan yang bernomenklatur sekolah. Nasib madrasah dianggap menjadi urusan Kementerian Agama.

Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama di Indonesia. Argumen yang perlu dibangun ke depan bukan pada persoalan delegasi kewenangan. Melainkan ikhtiar pembangunan sumber daya manusia. Dalam kaitan ini, kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur sejak tahun 2008

yang memberikan perhatian khusus kepada pendidikan madrasah diniyah dalam kerangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah patut ditiru. Madrasah diperhatikan dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia.

Madrasah dan Sekolah Adalah Sama

Selalu ada kearifan pada yang lokal. Selalu ada keutamaan dan kemuliaan pada lokalitas. Itulah yang di antaranya ingin disampaikan oleh konsep *local wisdom* (kearifan lokal). Selanjutnya, posisi kebijakan pemerintah menjadi penguat atas kearifan, keutamaan, dan kemuliaan lokalitas itu. Kebijakan pemerintah dimaksud baik dalam kaitannya dengan urusan sosial, ekonomi maupun pendidikan. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan muhibah ke tanah Papua selama 6 hari (06 hingga 10 Januari 2012) dalam rangka studi arus dasar kompetensi pengawas dan kepala sekolah/madrasah (*Schools and Madrasah Principals and Supervisor' Competence Baseline Study*) hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP). Selama muhibah itu, penulis membuat serangkaian catatan perjalanan, mulai tentang Islam, pendidikan, dan masyarakat di tanah Papua. Pada bagian ini, catatan perjalanan melukiskan kebijakan pemerintah lokal di Papua, khususnya Kabupaten Keerom, terhadap dunia pendidikan persekolahan secara spesifik yang ada dan berkembang di tengah masyarakat Papua, baik itu bernomenklatur sekolah maupun madrasah.



Foto Stuktur Pengawasan dan Pengendalian Pendidikan Kantor Dinas Dikbud Kab. Keerom, Papua

Judul tulisan ini saya buat menyusul temuan saya atas sejumlah rangkaian penelitian lapangan ke sejumlah titik sekolah di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, 06 hingga 10 Januari tahun 2015. Penelitian itu saya lakukan dalam rangka studi dasar kompetensi pengawas dan kepala sekolah/madrasah (*Schools and Madrasah Principals and Supervisor' Competence Baseline Study*) untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian itu merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta lembaga analis kebijakan *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP).

Keerom sendiri merupakan sebuah kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura. Kabupaten Keerom memiliki tujuh distrik (kecamatan), yaitu Arso, Skanto, Arso Timur, Senggi, Web, Waris, dan Towe. Dari tujuh distrik yang dimiliki, lima di antaranya merupakan daerah yang menjadi titik perbatasan dengan negara Papua Nugini. Beberapa di antaranya hanya bisa diakses dengan menggunakan pesawat. Itu pun pesawat carter. Harganya sekitar 18 hingga 20 juta. Tidak ada akses darat yang bisa dilalui.

Meskipun medannya menantang dan berada di wilayah terpencil, jangan dibayangkan bahwa Kabupaten Keerom juga tertinggal dari sisi kebijakan pendidikan yang dikembangkan. Sekolah gratis adalah salah satunya. Kebijakan sekolah gratis merupakan ikhtiar pemerintah lokal untuk memberikan layanan terbaik bagi pendidikan warganya. Pemerintah lokal berharap dengan kebijakan itu, tak lagi ada anak warga masyarakat yang tidak mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Kebijakan ini memang sangat penting dilakukan mengingat fakta geografis yang ada. Banyak peserta didik yang tinggalnya sangat jauh dari lokasi sekolah. Bahkan, menurut penuturan beberapa kepala sekolah yang saya wawancarai, ada

sejumlah siswa yang harus berjalan kaki sekitar 10 kilometer untuk bisa sampai ke sekolah. Infrastruktur dan akses jalan yang baru dalam perkembangan terakhir ini saja dibangun membuat mereka harus melakukan itu semua.

Kebijakan pendidikan gratis itu diberlakukan baik untuk lembaga pendidikan yang bernama sekolah ataupun madrasah. Semua lembaga pendidikan diberikan layanan pendidikan gratis. Tidak ada perbedaan. Tak peduli apakah itu namanya sekolah atau madrasah. Semuanya ditanggung oleh APBD. Maka, anak yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) atau di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) mendapatkan layanan pendidikan yang sama: gratis. Lembaga pendidikan yang berstatus swasta pun mendapatkan layanan itu. Lagi-lagi, baik itu sekolah swasta ataupun madrasah swasta, layanan pendidikannya gratis.

Pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan juga tak luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Keerom. Baik gedung sekolah maupun madrasah mendapatkan perlakuan yang sama. APBD disediakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga pendidikan, baik yang bernama sekolah maupun madrasah. Bahkan, soal kualitas pendidikan pun juga mendapatkan perhatian dari pemerintah lokal.

Keingintahuan saya atas alasan kebijakan pemerintah Kabupaten Keerom di atas semakin tinggi saat saya melihat dan mencermati struktur unit pelaksana teknis pengawasan dan pengendalian pendidikan untuk Distrik Skanto Kabupaten Keerom. Di lembar yang berisi struktur pengawasan dan pengendalian pendidikan tersebut, jelas tergambar bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian pendidikan itu meliputi secara sama sekolah dan madrasah.

Mendapati kenyataan seperti di atas, saya pun lalu bertanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan,

Pak Bambang Suhartawan. Pertanyaan saya begini: “Mengapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengurus madrasah?” “Kenapa Pemerintah Kabupaten Keerom mengembangkan kebijakan yang memperlakukan secara sama antara madrasah dan sekolah?”

Pertanyaan-pertanyaan di atas, bagi saya, menarik untuk dipertanyakan kepada pemerintah daerah di salah satu kabupaten di Papua ini. Mengapa? Sebab, di penghujung tahun 2012, publik dan dunia pendidikan di berbagai wilayah pada umumnya di Indonesia diributkan oleh berita keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri yang melarang APBD digunakan untuk memberi bantuan kepada madrasah. Alasan yang mengemuka, madrasah adalah urusan agama. Dan, karena agama tidak menjadi unsur kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, maka APBD yang merupakan anggaran yang dialokasikan untuk daerah tidak boleh diberikan kepada madrasah.

Meskipun Surat Edaran itu dibantah lebih lanjut oleh Kemendagri melalui penerbitan SE Nomor 903/5361/SJ tertanggal 28 Desember 2012, berita kebijakan itu sempat menimbulkan reaksi keras. Sebab, pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terkena dampak konkret jika larangan itu diberlakukan. Sejak tahun 2008, Pemprov Jawa Timur punya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) dan pesantren. Jumlah Bosda Madin dan Pesantren itu cukup besar hingga mencapai Rp. 260 miliar pertahun. Dan, nilai manfaatnya pun sangat dirasakan oleh ribuan guru dan siswa madrasah serta lembaga madrasah itu sendiri.

Nah, ternyata hal yang diributkan sebagai akibat dari berita pelarangan APBD untuk madrasah di atas tidak terjadi di Kabupaten Keerom. Kearifan lokal menjadi model kebijakan

pendidikan yang khas Kabupaten Keerom pada khususnya dan Papua pada umumnya. Hal itu tercermin dari jawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom, Bambang Suhartawan, terhadap pertanyaan yang saya lontarkan di atas. Jawaban pria yang asal Blitar, Jawa Timur, itu sungguh menarik: “Bagaimanapun, madrasah adalah urusan pendidikan bagi warga kami juga. Dan, kami diberikan kewenangan atas nama otonomi khusus Papua untuk juga mengurus madrasah. Sehingga, nasib madrasah juga menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.”

Kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Papua seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom di atas menarik dianalisis lebih jauh. *Pertama*, sekolah dan madrasah diperlakukan sama. Tidak ada diskriminasi antara keduanya. Yang menarik, argumen yang dikembangkan oleh Pemerintah Papua seperti direpresentasikan oleh Kabupaten Keerom tidak perlu jauh-jauh menunjuk kepada Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Madrasah yang melegalisasi madrasah sebagai sebuah varian bersama sekolah.

Alih-alih, Pemerintah Papua justru mendasarkan kebijakan perlakuan yang sama antara sekolah dan madrasah di atas pada dan atas nama otonomi khusus yang diberikan. Otonomi tidak dimaknai sebagai “harus menang”, “harus putera daerah”, “harus untuk kepentingan mayoritas”, dan “harus serba-penduduk asli”. Pemerintah Papua memberikan contoh menarik bahwa otonomi justru dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Tak peduli pendatang ataukah penduduk asli. Tak peduli kelompok mayoritas atau minoritas. Tak peduli berbasis keagamaan ataukah tidak. Semuanya diperlakukan sama di depan kebijakan politik pendidikan di Papua pada umumnya, dan Kabupaten Keerom

pada khususnya.

Kedua, Papua memberi teladan berbangsa yang baik melalui sektor pendidikan. Yakni bahwa jumlah (mayoritas atau minoritas) tidak boleh menjadi bahan diskriminasi atas layanan pendidikan. Dan, kebijakan publik di sektor pendidikan harus diorientasikan kepada kemaslahatan bersama tanpa harus membeda-bedakan latar belakang kelompok sosial dan keagamaan.

Menurut Sensus Penduduk 2010 kala itu, diketahui memang bahwa penduduk yang menganut agama Islam dan Kristen, saat kami melaksanakan penelitian lapangan itu, relatif seimbang. Jumlah penganut Kristen mencapai 51,89 persen dengan terdiri dari 27,06 persen penganut Protestan, dan 24,83 Katolik. Penduduk Muslim sendiri mencapai 47,52 persen. Adapun sisanya penganut agama lain.

Artinya, meskipun jumlah penganut Kristen sedikit lebih tinggi dibanding penduduk Muslim, kebijakan sektor pendidikan di Kabupaten Keerom justru memberikan teladan yang baik bahwa jumlah yang lebih banyak tidak harus menindas, atau minimal meminggirkan, jumlah yang lebih kecil. Pelajaran untuk Indonesia yang damai, adil tanpa harus ada diskriminasi, minimal di sektor pendidikan, telah diberikan oleh masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Keerom pada khususnya dan Papua pada umumnya. Saatnya, sinar dan cahaya mutiara dari Timur ini bisa menyinari wilayah lain di Indonesia.

Jaringan Alumni, Aset Lembaga

Jangan sepelekan alumni. Buatlah jaringan yang kuat. Sebab, manfaatnya juga akan kembali ke lembaga pendidikan asal itu sendiri. Begitu nasehat populer yang banyak didengar. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan yang bertajuk *exposure visit* ke sejumlah instansi pemerintahan dan sejumlah komunitas, baik di perkotaan maupun pedesaan, di Kanada dari tanggal 11 Mei hingga 4 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan *project* penguatan kepemimpinan lokal untuk pembangunan di Indonesia (*Supporting Islamic Leadership/SILE*) hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) atau yang dalam perkembangan berikutnya dikenal juga dengan Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD). Pada bagian ini, catatan perjalanan berkaitan dengan bagaimana perguruan tinggi di Kanada, dalam hal ini adalah The Coady International Institute, membangun dan merawat alumninya melalui komunikasi dan koordinasi yang rapi hingga jejaring alumni menjadi bagian dari nafas perguruan tinggi.



Foto calon alumni dari berbagai negara di depan Kampus Coady Institute

Dua hari setelah pelaksanaan wisuda atas kursus singkat bidang *mobilizing assets for community-driven development* (memobilisasi aset untuk pembangunan berbasis masyarakat) di kampus The Coady International Institute, St. Francis Xavier University, Kanada, pada tanggal 5 Juni 2012, saya bersama seorang teman dari UIN Makassar, Profesor Hamdan Juhannis, kala itu melakukan perjalanan pulang ke Indonesia. Perjalanan kami memakan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Dari kampus, kami menuju Bandara Halifax di Provinsi Nova Scotia dengan mengendarai taksi, dan memakan waktu dua jam.

Pesawat Air Canada menerbangkan kami dari Bandara Halifax ke Bandara Toronto. Perjalanannya memakan waktu dua jam pula. Selanjutnya, pesawat Cathay Pacific membawa kami meninggalkan Kanada melalui Bandara Toronto untuk kembali ke Indonesia. Namun, selepas meninggalkan Bandara Toronto, pesawat tidak langsung membawa kami Indonesia. Rute yang dilalui memaksa kami untuk transit di Hongkong. Dari Bandara inilah, kami lalu menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Saat transit di Hongkong, saya mencoba memanfaatkan fasilitas internet bandara tersebut untuk melakukan cek email. Di antara email yang masuk, ada sebuah email dari Heidi Sinclair. Perempuan muda ini adalah staf bagian rekrutmen dari The Coady International Institute, St. Francis Xavier University. Dialah salah seorang staf yang sangat aktif berhubungan dengan kami-kami selama kami berada di kampus tersebut.

Subject dari email yang dikirim oleh Heidi berjudul *Greetings from the Coady Institute!* (Salam dari Coady Institute). Dalam email itu, dia bilang begini: *We at the Coady, hope that you have arrived home safe. It was wonderful to have you join us at the Coady Institute for the mobilizing assets for community-*

driven development certificate program. It is our hope that you had a valuable experience in and out of the classroom setting, and that you will be able to use your new learning's in your work. As a Coady graduate, you are a part of a network of more than 5,500 from 130 countries, congratulations!...I highly encourage you to pass information about our programs along to your networks. I've prepared a letter (that you can find below) that can be forwarded to contacts of yours that would be interested and benefit from a Coady program.

Pesannya kurang lebih berarti begini: Kami di Coady berharap bahwa Anda telah tiba di rumah dengan aman. Sangat indah sekali Anda telah bergabung dengan kami di Institut Coady untuk program memobilisasi aset untuk pembangunan berbasis masyarakat. Harapan kami, Anda memiliki pengalaman berharga di dalam dan luar ruang kelas, dan menggunakan pembelajaran baru Anda itu dalam pekerjaan Anda. Sebagai lulusan Coady, Anda adalah bagian dari jaringan lebih dari 5.500 dari 130 negara, selamat! ... Saya sangat mendorong Anda untuk menyampaikan informasi tentang program kami bersama ke jaringan Anda. Saya telah menyiapkan surat (sebagaimana terlampir) yang dapat diteruskan ke kolega Anda yang akan tertarik dan mengambil manfaat dari program Coady.

Saya pun segera memahami bahwa inilah salah satu cara yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan di negara maju, seperti kampus di atas, untuk minimal menjaga hubungan hubungan baik dengan para alumni yang dilahirkannya, dan maksimal memanfaatkan jaringan alumni sebagai aset lembaga. Mengapa pemahaman ini segera muncul pada diri saya? Sebab, selain komunikasi oleh Coady Institute di atas, sampai saat ini saya tetap menerima sebuah majalah atau terkadang *leaflet* dari kampus The Australian National University (ANU) Canberra-Australia yang menjadi almamater saya sewaktu menyelesaikan

program magister serta The University of Queensland (UQ) Brisbane-Australia yang menjadi almamater saya untuk program doktoral.

Majalah dan *leaflet* di atas secara rutin dikirim ke saya sebagai media untuk berkomunikasi antara lembaga pendidikan yang pernah menjadi almamater saya dengan saya serta ribuan orang yang menjadi alumnya. Komunikasi itu tidak terputus oleh selesainya studi. Meskipun sudah tidak lagi berada di kampus sebagaimana dulu masih menjadi mahasiswanya, kampus-kampus itu tetap menjaga komunikasi dengan para mantan mahasiswanya dari berbagai latar belakang budaya, kelas sosial, dan bahkan negara asalnya.

Yang menarik, biasanya satu paket dengan majalah atau *leaflet* yang dikirim ke para alumni di atas adalah formulir donasi plus nomor rekeningnya yang bisa menerima berbagai bentuk donasi dari para alumni dimaksud. Dari situlah, para alumni bisa mengirimkan donasi mereka. Dan dari situ pulalah, akumulasi kapital pendukung bisa digerakkan melalui alumni dengan berbagai latar belakang kesuksesan yang diraih selepas berakhirnya studi di lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Memperkuat jaringan. Ya, itulah isu sentralnya. Pikiran kita selama ini lebih banyak memahami konsep jaringan di atas dalam konteks akumulasi kepentingan politik kekuasaan. Semuanya serba dihitung dari kalkulasi politik. Begitu kata “jaringan” disebut, basis kognitif kita langsung menggumpal dan tertuju pada kepentingan politik kekuasaan.

Padahal, kalau kita belajar dari lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mapan di negara-negara maju, konsep “jaringan” di atas sangat erat pula dipraktikkan oleh lembaga pendidikan. Terlepas dari level dan ragam apapun. Tidak peduli perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga riset sekalipun. Mereka sangat memahami dan mempraktikkan pentingnya

prinsip jaringan tersebut.

Sebab, bagi mereka, besarnya lembaga pendidikan di antaranya didukung oleh kuatnya jaringan sosial. Lemahnya jaringan menjadi salah satu tahap awal dari segera redupnya, atau bahkan lenyapnya, lembaga pendidikan tersebut dari persaingan yang semakin lama semakin ketat.

Alumni merupakan salah satu jaringan sosial terpenting bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi. Pentingnya jaringan alumni dimaksud tidak saja dalam kepentingannya untuk memperkuat keberadaan dan mempertajam reputasi lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan di mata masyarakat pengguna. Melainkan juga signifikan untuk memperkuat kapasitas finansial dan manajemen sumber daya lembaga pendidikan dimaksud.

Pengalaman lembaga-lembaga pendidikan di negara maju mengafirmasi keberadaan jaringan alumni dengan berbagai nilai signifikansinya di atas. Sebuat saja begini: sebuah lembaga pendidikan akan memiliki citra dan sekaligus mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat jika alumni yang diproduksinya berkibar mewarnai “jagat persilatan” di tengah-tengah masyarakat.

Dan biasanya, para alumni juga menjadi salah satu sumber penting bagi penguatan kapasitas finansial lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang telah terbukti sukses di negara-negara maju tidak mengandalkan biaya SPP sebagai sumber utama dari pendanaan penyelenggaraan pendidikan mereka. SPP memang menjadi sumber pendanaan, tapi hanya salah satu saja. Itupun dengan prosentase yang tidak menjadi penentu utama. Ada sumber-sumber pendanaan lain. Jaringan alumni menjadi salah satu yang terpenting. Dengan begitu, biaya operasional lembaga-lembaga pendidikan itu tidak bergantung sekali dengan SPP.

Saya lalu teringat dengan Hadits Nabi ini: *Man achabba an yubsatho labu fi rizqih wa an yunsya'a labu fi atsarihi falyashil rahimahu*. Artinya kurang lebih begini: Barangsiapa yang ingin dihamparkan rizkinya dan ditumbuhkan pengaruhnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Kata *rizq* dalam Hadits dimaksud tidak saja dalam pengertian modal finansial, melainkan apa saja yang bisa mendatangkan kelapangan dalam kehidupan. Dari situlah lalu lahir modal-modal lainnya, di antaranya modal sosial dan kultural. Juga, kata *atsar* juga tidak saja dalam makna tradisionalnya seperti bekas atau petilasan, melainkan juga pengaruh dan dampak positif.

Maka, Hadits di atas menjadi dalil dari pentingnya memperkuat jaringan sosial dalam kehidupan bersama. Melalui pesan agungnya *falyashil rahimahu*, Nabi Muhammad sedang mengingatkan kita bahwa penguatan jaringan sosial adalah bagian penting dari kehidupan seorang Muslim dan semua kepentingannya.

Jaringan sosial menjadi modal penting bagi kesuksesan. Dalam bidang apapun. Pendidikan termasuk di dalamnya. Dengan ribuan alumni yang dilahirkannya, sebuah lembaga pendidikan pada hakekatnya telah memperbanyak modalnya. Alumni sebetulnya merupakan modal sangat berharga bagi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, jaringan alumni sangat disadari oleh lembaga-lembaga pendidikan yang telah terbukti maju sebagai modal penting untuk menunjukkan kinerjanya di mata masyarakat pada satu sisi, dan memperkuat pengaruh dan dominasinya di pasar kerja dan kehidupan sosial.

Tentu, untuk kepentingan memperkuat jaringan alumni di atas, pembenahan ke dalam harus segera dilakukan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Utamanya manajemen mutu. Kuatnya jaringan alumni di antaranya ditentukan juga oleh kuatnya kinerja lembaga pendidikan di mata masyarakat

pengguna. Keduanya seperti sebuah lingkaran yang sulit dicari titik awal dan akhirnya. Tapi, keduanya saling mempengaruhi.

Tanpa perbaikan internal, khususnya melalui manajemen mutu yang jempolan, jaringan alumni itu akan menempuh jalan terjal. Dan, tanpa jaringan alumni yang kuat, pembenahan internal akan segera dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Mulai dari gagasan, sumber daya manusia pelaksana pendamping, hingga finansial. Saatnya lembaga pendidikan kita berubah dengan cara memperkuat jaringan alumni bersama dengan perbaikan tata kelola internal.

Pendidikan dan Tantangan *Brain Drain*

Distribusi pembangunan kerap dihadapkan pada keseimbangan tenaga kerja terampil di tengah-tengah masyarakat. Masalah ini tidak hanya dihadapi oleh pemegang kuasa politik yang bernama negara. Desa pun juga mengalami problem yang sama. Pendidikan dalam hal ini memperhadapkan masyarakat pada dua aspek yang bergerak paradoksal. Satu sisi, pendidikan mempersiapkan dan sekaligus mencetak lulusan yang menjadi tenaga terampil di bidangnya. Namun, sisi lainnya, justru pendidikan memfasilitasi anak warga masyarakat untuk meninggalkan daerah asalnya saat dirinya telah menjadi tenaga terampil melalui proses pendidikan yang dijalani. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan yang bertajuk *exposure visit* ke sejumlah instansi pemerintahan dan sejumlah komunitas, baik di perkotaan maupun pedesaan, di Kanada dari tanggal 11 Mei hingga 4 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan *project* penguatan kepemimpinan lokal untuk pembangunan di Indonesia (*Supporting Islamic Leadership/SILE*) hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) atau yang dalam perkembangan berikutnya dikenal juga dengan Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD). Pada bagian ini, catatan perjalanan berkaitan dengan dilema pendidikan dan praktik keluarnya tenaga terampil dari daerah asal pasca lulus dari proses pendidikan yang diikuti.



Foto Kawasan St. Andrews Community di Provinsi Nova Scotia, Kanada

Perjalanan saya ke Kanada, tidak bisa disangkal, memberikan banyak keuntungan keilmuan dan bahkan pengetahuan praktis. Karena, saya berkesempatan tidak saja mengunjungi kota-kota besar seperti Victoria dan Toronto. Tapi juga ke kota-kota kecil. Bahkan yang terpencil sekalipun.

Pengalaman berkunjung di *setting* wilayah kota metropolitan hingga terpencil itu memberikan pelajaran sangat berharga untuk bisa menyelami dan memaknai apa yang terjadi di negara maju seperti Kanada ini. Saya sempat melakukan kunjungan lapangan (*field visit*) ke St. Andrews Community di Antigonish County, Provinsi Nova Scotia, Kanada, pada tanggal 22 Mei 2012 yang lalu. Eksperimentasi dalam bentuk inisiatif lokal yang khas (*local initiative*) dan kuasa lokal tersendiri (*local authority*) menjadi isu sangat menarik dari wilayah ini. Mengapa begitu? St. Andrews Community ini tidak memiliki struktur administrasi pemerintahan formal tersendiri seperti halnya di daerah-daerah atau desa-desa lainnya di Kanada. Dari namanya pun sudah kelihatan ciri khasnya: *St. Andrews Community*. Ia hanya gugusan komunitas. Bukan desa dengan segala kekuatan administratifnya.

Tapi, meskipun begitu, masyarakat lokal yang jumlahnya “hanya” 1.100 orang tersebut sangat luar biasa terampil dalam mengorganisasi diri. Mereka sangat piawai dalam menciptakan inisiatif-inisiatif pembangunan di wilayahnya (atau yang lebih dikenal dengan istilah *local initiatives* seperti disinggung sebelumnya) serta membangun otoritas mereka sendiri (atau yang lebih populer dengan istilah *local authority* seperti disinyalir di atas) dalam mengembangkan daerahnya. Apa yang dikenal dengan istilah “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri) yang pernah dipopulerkan oleh Bung Karno dalam konteks Indonesia masa perjuangan sungguh menjadi pemandangan paling menonjol dari St. Andrews Community di atas.

Secara historis, modal sosial St. Andrews Community di atas telah mulai bersemi dari generasi awal di daerah tersebut yang merupakan imigran dari Skotlandia dan Belanda. Kini, dengan kekuatan semangat volunterisme yang dimiliki, mereka telah mampu membangun secara mandiri-swadaya sejumlah fasilitas kampung. Sebuat saja kantor pemadam kebakaran (*fire hall*), pusat kegiatan masyarakat (*community centre*), hingga kompleks hunian kelompok usia lanjut.

Cerita sukses mereka dalam membangun daerahnya secara mandiri-swadaya di atas dilandasi oleh sejumlah nilai penting yang mereka pegang teguh secara turun-temurun. Dalam penjelasan mereka, ada tiga nilai utama yang mereka pelihara: berdikari untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*), semangat hidup bermasyarakat (*community spirit*), dan hirau atas yang lain (*care for others*).

Atas cerita sukses ini, mereka yang tinggal di dalam lingkungan St. Andrews Community sangat dikenal dengan “masyarakat serba bisa” (*can-do-community*). Hal inilah yang mengilhami sebuah lembaga pengkajian bertaraf internasional yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, The Coady International Institute, untuk secara khusus melakukan studi dan kemitraan mengenai isu bagaimana sebuah masyarakat mampu mengorganisasi diri dan menderek gerak pembangunan. Lalu lahirlah karya dari lembaga ini berjudul *By Their Own Hands: 200 Years of Building Community in St. Andrews, Nova Scotia*.²⁴

Meskipun *local initiative* dan *local authority* menjadi kekuatan penting dari St. Andrews Community, ada masalah yang muncul: tantangan keluarnya sumber daya manusia muda dari komunitas ini ke daerah perkotaan. Dari penjelasan para

²⁴ Lihat Gord Cunningham dan Kate Fiander, *By Their Own Hands: 200 Years of Building Community in St. Andrews, Nova Scotia* (Nova Scotia: Coady International Institute Publications, 2009)

warga senior di komunitas itu, masalah dimaksud disimpulkan begini: *the more education the people have, the more possibility they move out*. Semakin bagus tingkat pendidikan warga, semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk meninggalkan kampungnya ke perkotaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, semakin besar kemungkinan mereka berkarir keluar kota.

Dalam pengertian lebih luas, inilah yang disebut dengan problem *brain drain*. Yakni, keluarnya sumber daya manusia yang bagus ke daerah lain. Motifnya tentu sangat erat kaitannya dengan ikhtiar untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Bahasa kasarnya, soal pekerjaan.

Pelakunya adalah kelompok usia muda. Mereka lebih memilih mencari penghidupan melalui sektor pekerjaan yang lebih baik di perkotaan daripada tinggal di komunitas asalnya setelah menyelesaikan jenjang sekolah tertentu. Ini problem yang dihadapi masyarakat yang masih tergolong rural untuk konteks Kanada.

Relatif tidak ada masalah dengan kelompok usia tua untuk tinggal dan menghidupkan komunitas itu. Justeru, rata-rata kelompok usia tua di Kanada secara lebih luas lebih memilih daerah yang jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk sebagai tempat tinggal. Hal seperti ini, sebaliknya, tidak menjadi pertimbangan kaum mudanya. Mereka lebih memilih untuk mencari peruntungan di kota-kota besar.

Masalahnya kemudian, kepentingan untuk mempertahankan model pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (*community-driven development*) sedang mendapatkan ancaman oleh keluarnya sumber daya manusia terbaik berusia muda. Penyebabnya adalah *brain drain* seperti disinggung di atas. *Brain drain* inilah yang mengancam prinsip *sustainability* (keberlanjutan) dari *community-driven*

development dimaksud.

Kita pun lalu bisa bermain-main dengan simpulan yang berbau teori. Ternyata, masalah yang dihadapi dan banyak terjadi di Indonesia juga menjadi masalah masyarakat Kanada, terutama di kawasan rural. Seperti telah menjadi pemahaman umum, problem yang lama tak terpecahkan adalah: mengapa perkembangan pedesaan di Indonesia sangat jauh tertinggal dari perkembangan perkotaan? Ini problem klasik pedesaan namun belum terpecahkan di negeri bumi pertiwi ini.

Penyebab yang bisa dikemukakan atas problem di atas, di antaranya, adalah munculnya arus *brain drain* yang mengiringi keberhasilan partisipasi warga masyarakat pedesaan di bidang pendidikan. Akibatnya, pedesaan tetap sepi dari sentuhan tangan-tangan dan tenaga-tenaga terampil yang dihasilkan oleh pendidikan. Lulusan sekolah lebih memilih keluar daripada tinggal di pedesaan.

Ini menandakan, jumlah lulusan sekolah tidak selalu seiring dengan jumlah tenaga muda yang terampil namun mengabdikan dirinya di daerah yang bersangkutan. Perkotaan tetap menjadi impian bagi kepentingan pencarian peruntungan bagi generasi muda.

Ini artinya, kaitan antara pendidikan dan tantangan *brain drain* bukan sesuatu yang khas masyarakat negara berkembang. Kanada sebagai representasi negara maju sekalipun juga menghadapi masalah yang sama. Maka, yang bisa dimaknai segera: ada gula ada semut. Di mana ada potensi penghidupan yang besar, di situlah orang berebut untuk menggapainya.

Ini sebuah sunnatullah. Bisa terjadi di mana saja. Hanya bedanya, di Kanada, nilai hidup untuk membangun diri masyarakat melalui kemampuan berdikari untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, semangat hidup bermasyarakat, dan hirau atas yang lain sangat kuat mentradisi. Dengan semangat dan

nilai hidup inilah, mereka bisa menciptakan *local initiatives* dan *local authority* demi kebaikan kehidupan bersama.

Inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita masyarakat Indonesia. Nilai-nilai lokal Indonesia, seperti yang sebagiannya juga mentradisi dalam masyarakat Kanada di atas, mulai terancam dengan skema-skema kebijakan instan, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) dan sejumlah skema lain di antaranya oleh Bank Dunia. Memang program-program tersebut digerakkan sebagai jaring pengaman sosial, namun jika tidak disikapi hati-hati, skema-skema itu akan berujung pada mandulnya kemampuan masyarakat lokal kita untuk membangun dan memperkuat *local initiatives* serta *local authority*.

Volunterisme Pendidikan

Pendidikan adalah instrumen untuk pelestarian nilai hidup. Caranya melalui praktik penyampaian prinsip dasar, tata nilai, dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak hanya warga masyarakat yang butuh. Pemerintah pun juga memandangnya penting untuk konservasi dan sekaligus pengembangan nilai tradisi dimaksud untuk lintas generasi. Pada titik ini, pemerintah Kanada, sebagai contoh, mengembangkan kebijakan volunterisme pendidikan melalui praktik pengabdian kepada masyarakat oleh setiap siswa sekolah dalam rangka untuk melestarikan tradisi dan nilai yang dikandung oleh jiwa sosial yang tinggi yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Kanada. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan yang bertajuk *exposure visit* ke sejumlah instansi pemerintahan dan sejumlah komunitas, baik di perkotaan maupun pedesaan, di Kanada dari tanggal 11 Mei hingga 4 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan *project* penguatan kepemimpinan lokal untuk pembangunan di Indonesia (*Supporting Islamic Leadership/SILE*) hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) atau yang dalam perkembangan berikutnya dikenal juga dengan Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD). Pada bagian ini, catatan perjalanan menggambarkan bagaimana pemerintah Kanada mengembangkan kebijakan volunterisme pendidikan di sekolah-sekolah, sebagaimana dimaksud di atas.



Foto Kegiatan Pembahasan Kebijakan Volunterisme di SMA Delta School District, British Columbia, Kanada

Dalam serangkaian kunjungan saya ke sekolah-sekolah, universitas, dan kementerian pendidikan di sejumlah negara bagian (*province*) di Kanada, saya menemukan pelajaran menarik. Di negara bagian Ontario dan British Columbia, sebagai misal, sekolah-sekolah menerapkan kebijakan mengenai volunterisme dalam dunia pendidikan. Yakni, kewajiban bagi siswa level SMA untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat (*community services*) selama 40 jam. Kewajiban itu sudah harus ditunaikan sebelum masa kelulusan, dan bisa dicitil selama masa studi.

Pemerintah di sana menerapkan instrumen untuk mengukur tingkat pemenuhan kewajiban dan sekaligus keberhasilan dari program *community services* itu. Bentuknya adalah *template* formulir laporan yang harus ditandatangani oleh anggota atau kelompok masyarakat di titik simpul yang menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) dari aktivitas *community services* siswa tersebut. Laporan itu lalu diverifikasi untuk selanjutnya disahkan oleh pihak sekolah.

Kebijakan di atas diterapkan oleh pemerintah di sana untuk melestarikan tradisi dan nilai yang dikandung oleh jiwa sosial yang tinggi di masyarakat Kanada. Dalam argumentasi pemerintah Kanada, tradisi dan nilai volunterisme yang sudah lama mengakar di masyarakat itu harus diturunkan secara sistemik kepada generasi berikutnya melalui kebijakan praktis di dunia pendidikan. Dengan begitu, kepentingan untuk mengembangkan karakter bangsa bisa dijamin melalui proses pendidikan yang dijalankan.

Kebijakan *volunterisme* di atas tentu merupakan salah satu saja dari serangkaian teladan baik (*best practices*) yang diberikan oleh pemerintah Kanada dalam pengembangan karakter secara sistemik melalui dunia pendidikan. Dengan begitu, pengembangan karakter tidak saja berada pada ranah kognitif, tapi juga hingga afektif dan psikomotorik. Lebih dari

itu, perayaan kelulusan sekolah, sebagai contoh spesifik yang dalam perkembangan terakhir menyeruak di Indonesia, tidak dilakukan dengan cara yang kontradiktif dengan jiwa sosial yang lama ditumbuhkan pada masa studi, seperti pemborosan dan penghamburan.

Seperti diberitakan di sejumlah media, perayaan kelulusan sekolah dalam babakan waktu belakangan terjadi di seluruh sudut kota di Indonesia. Seakan menjadi kebiasaan yang sulit ditolak, perayaan ini berulang pada hampir setiap tahun menyusul pengumuman kelulusan, khususnya ketika ujian nasional masih diselenggarakan, secara serentak di seluruh penjuru tanah air.

Meskipun pelarangan dilakukan, berbagai bentuk perayaan kerap saja terjadi. Mulai dari mencat baju sekolah pakai cat sembur, mewarnai rambut secara ramai-ramai, hingga konvoi panjang di jalanan. Bahkan, seperti diberitakan berbagai media, dalam konvoi panjang itu terdapat siswa yang tertangkap basah membawa celurit. Ada juga yang menenggak minuman keras.

Mendikbud pun di sela pembukaan Lomba Cipta Elektroteknik Nasional (LCEN) 2012 di Surabaya lalu menyarankan pihak sekolah untuk mencari cara yang kreatif agar siswa pasca pengumuman kelulusan tetap di bawah kendali sekolah. Caranya, di antaranya, melalui praktik volunterisme dan karitas ke lembaga-lembaga sosial, seperti panti asuhan. Daripada melakukan aksi coret baju dan rambut serta konvoi jalanan, siswa diminta untuk menyerahkan baju dan atau buku yang segera tidak terpakai untuk kepentingan warga panti asuhan.

Idealnya, memang, penanaman nilai volunterisme dan karitas tidak dilakukan dengan cara yang instan dan untuk kepentingan sesaat, seperti pencegahan tindak pemborosan dan penghamburan saat perayaan kelulusan sekolah. Bahwa

ada masalah dalam perayaan kelulusan sekolah, hal itu tidak bisa dimungkiri.

Tapi, penanaman nilai volunterisme dan karitas tersebut harus dilakukan secara sistemik melalui proses pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan begitu, kepentingannya tidak saja untuk mencegah tindak pemborosan dan penghamburan saat perayaan kelulusan, namun lebih dari itu untuk menumbuhkan semangat dan jiwa sosial yang tinggi kepada sesama.

Perayaan kelulusan sekolah oleh siswa di berbagai kota melalui praktik coret-menyoret baju hingga konvoi jalanan yang selama ini terjadi di Indonesia seakan menghilangkan nilai pendidikan karakter yang lama dilakukan selama masa studi. Bak kata pepatah, hujan sehari menghapus panas setahun. Perayaan kelulusan sekali dalam masa studi dalam berbagai bentuknya di atas seakan menghapus penanaman nilai volunterisme dan karitas selama masa studi.

Pendidikan karakter, terutama nilai volunterisme dan karitas, seakan telah berhenti pada saat pelaksanaan ujian nasional atau ujian sekolah. Usai terselenggaranya ujian-ujian tersebut, siswa terkesan seakan-akan hanya menunggu masa yang tepat untuk melampiaskan semua perasaan dan beban yang selama ini mereka pikul melalui berbagai bentuk perayaan kelulusan. Nah, saat perayaan kelulusan datang, ekspresi dari suasana batin dan karakter siswa seakan terluapkan dengan begitu leluasa.

Publik pun lalu bisa segera melihat adanya celah antara idealisasi karakter yang selama ini ditanamkan dalam proses pendidikan dan ekspresi publik dari siswa saat perayaan kelulusan mereka lakukan. Celah itu semakin terlihat lebar saat perayaan kelulusan itu semakin tidak terkontrol. Bukan saja aksi corat-coret baju dan sekadar konvoi jalanan yang dilakukan, tapi praktik tenggak minuman keras dan aksi

melukai yang lain pun bukan sesuatu yang mustahil dilakukan jika kontrol diri sudah hilang, seperti disinggung di atas.

Maka, publik pun berharap banyak kepada pengambil kebijakan dan penyelenggara pendidikan di negeri ini agar penanaman nilai dan karakter bangsa tetap dilakukan, bahkan diperkuat secara serius, menjelang akhir atau bahkan pada ujung masa studi. Harapan itu muncul agar penguatan nilai volunterisme dan karitas sebagai bagian dari pendidikan karakter yang telah lama dilakukan dalam proses pembelajaran bisa segera tercermin pada akhir masa studi.

Siswa tetap butuh didampingi secara lebih intensif menjelang akhir masa studi mereka. Dengan begitu, pembentukan karakter selama masa studi segera bisa berbuah manis bagi semua pihak. Saat kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, anak-anak bangsa yang telah mengakhiri masa sekolah bisa segera membantu menyelesaikan masalah, dan bukan malah menambah masalah itu sendiri.

Best practices dari pendidikan di luar negeri harus segera menjadi teladan bagi kita semua. Kita patut mencontoh sesuatu yang telah terbukti baik dalam kehidupan yang lain. Cara praktisnya, teladan itu jangan hanya dijadikan sebagai wacana, tapi langsung segera dipraktikkan. Apalagi, sejak 2010, pendidikan karakter telah menjadi semangat penting dalam dunia pendidikan kita. Karena itu, kebijakan penguatan volunterisme dalam pendidikan layak untuk diapresiasi lebih lanjut melalui praktik nyata dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Academical Village

Pendidikan tinggi dibutuhkan untuk mendampingi pergerakan bangsa dan negara ke arah kemajuan yang lebih baik. Keberadannya selalu dinantikan untuk mengembangkan kehidupan akademik agar senantiasa bergerak maju, namun pada saat yang sama juga untuk selalu dekat dengan masyarakat. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan muhibah ke sejumlah kota di lima negara bagian di Amerika Serikat (AS; yang meliputi Washington DC, New Hampshire, Iowa, Nevada, hingga San Fransisco) dari tanggal 22 Februari hingga 18 Maret 2013 dalam rangka penguatan kepemimpinan internasional (*International Visitor Leadership program/IVLP*) bertajuk “Mendidik Pemuda Calon Pemimpin Masa Depan” (*Educating Youth for Future Leaders*) oleh Departemen Luar Negeri AS. Pada bagian ini, catatan perjalanan menggambarkan bagaimana perguruan tinggi di Amerika Serikat mengembangkan diri untuk kepentingan akademik maupun sosial politik dan kebangsaan. Dengan fokus pembahasan pada The University of Virginia, catatan ini berharap bisa memberikan inspirasi bagi pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.



Gambar Kampus Darden School of Business, University of Virginia

Judul di atas merupakan istilah yang digunakan oleh Presiden ketiga Amerika Serikat Thomas Jefferson untuk membangun sebuah konsep brilian tentang perguruan tinggi. Padanan kata dalam bahasa Indonesia dari istilah *academical*

village di atas adalah “desa akademik”. Keberadaan konsep perguruan tinggi dengan istilah ini sangat menarik dan menjadi catatan tersendiri pada kegiatan saya selama lima hari di Washington DC di antara rangkaian agenda kegiatan selama hampir sebulan di Amerika Serikat.

Selama ini, secara normatif, semua orang tidak pernah mempertanyakan ulang identifikasi pendidikan tinggi dengan dunia akademik. Pasalnya, pendidikan tinggi sangat sarat dengan kegiatan akademik yang diperuntukkan bagi penyediaan sumber daya manusia dengan standar kepemilikan kompetensi yang tinggi. Karena itu, semua orang mengamini identifikasi itu.

Namun, identifikasi kampus pendidikan tinggi dengan konsep desa, seperti yang dilakukan oleh Thomas Jefferson di atas, adalah sesuatu yang layak didiskusikan lebih jauh untuk kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia. Dan, saya sendiri sangat mengapresiasi dan sekaligus menyebut konsep itu sebagai ide cemerlang. *Pertama*, kampus tidak harus membuat civitas akademiknya tercerabut dari akar tradisinya, sebagaimana keberadaan desa yang menjadi konsep afinitas sosial yang kuat bagi warganya beserta proses pelembagaan nilai tradisionalnya. *Kedua*, kampus tidak membuat civitas akademiknya berada di ruang yang kosong dari orientasi sosialnya, namun juga tidak enyah dari pendadaran nilai akademik yang dipersyaratkan sebagai medium dan sekaligus sentrum dari pendidikan tinggi.

Dari istilah dan konsep *academical village* di atas, Thomas Jefferson mendirikan sebuah perguruan yang letaknya di negara bagian yang bertetangga dengan Washington sebagai ibukota Amerika Serikat, yakni Virginia. Nama perguruan tinggi itu pun juga dinamai The University of Virginia. Penamaan seperti ini merupakan sebuah realitas yang lumrah terjadi di berbagai kawasan di dunia tentang pemberian nama universitas dengan

sebuah identitas nomenklatural yang diatribusikan kepada nama kota yang menjadi tempat berdiri dan beroperasinya perguruan tinggi dimaksud. Di Australia, sebagai misal, ada The University of Sydney. Di Inggris, sebagai contoh lain, terdapat nama The University of Oxford.

Saya sungguh tercengang dan takjub saat pengarah perjalanan (*tour director*) rombongan kami, Monica Flores, menjelaskan pandangan Thomas Jefferson tentang keberadaan perguruan tinggi. Dengan pola dan metode *oral history* yang dilakukan kepada kami, pengarah perjalanan itu menjelaskan pernyataan dan argumen Thomas Jefferson seperti ini: “*We are now [in the 1820s in the US] in the era of growing democracy; we need more educated people, and therefore we need an institution of higher learning.*”

Maksud umumnya begini. Demokrasi bisa saja berkembang di sebuah negara. Namun, untuk bisa berkembang dengan baik, proses demokratisasi itu harus mengalami pelembagaan yang baik pula. Dan, pelembagaan demokrasi ini akan menemukan titik kedewasaan dan ketuntasan yang tinggi jika nilai-nilai yang diajarkan dan disebarakan oleh demokrasi itu tumbuh dengan apik pula. Nah, upaya untuk menuju pelembagaan demokrasi dan penumbuhan nilai-nilainya tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang siap dan handal. Karakteristik manusia seperti ini bisa dipenuhi melalui jalur pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kuat pula kontribusinya bagi pelembagaan nilai-nilai demokrasi.

Sebagai bagian dari konsep dan desain *academical village* ala Thomas Jefferson di atas, terdapat bagian lapangan rumput yang luas dengan model semi terasering. Lapangan itu persis berada di tengah rangkaian bangunan gedung yang paling artistik. Salah satu yang paling dikenal dan menjadi ikon

kampus itu bernama *The Rotunda*. Terdapat 10 bangunan yang disebut dengan nama *The Pavilions*. Di lantai dua kesepuluh bangunan *pavilion* itulah, para staf pengajar tinggal. Lantai bawahnya ditinggali oleh sejumlah mahasiswa tahun terakhir. Mereka adalah mahasiswa pilihan yang sedang dalam proses penyelesaian studi.

Konsep *academical village* dengan bagian pentingnya *The Pavilion* di atas memang dikembangkan dalam konteks dan latar belakang sosiologis masyarakat Amerika. Namun begitu, ada pelajaran penting yang bisa dipetik oleh perguruan tinggi di Indonesia. *Pertama*, pentingnya memanfaatkan infrastruktur yang ada di dalam kampus sebagai desa akademik. Tentu kita tidak mungkin untuk melakukan redesain atas fisik bangunan yang telah dimiliki agar bisa mendekati konsep dan desain fisik desa akademik model Thomas Jefferson.

Yang bisa dijadikan sebagai inspirasi adalah bagaimana ide desa akademik oleh Thomas Jefferson di atas bisa ditiru. Bisa sebagian melalui modifikasi atau seluruhnya. Misalnya, keberadaan asrama atau pesantren mahasiswa, putera dan puteri, bisa menjadi cikal bakal dari desa akademik di kampus. Manajemen asrama atau pesantren mahasiswa, mulai dari jajaran direksi hingga pembina (*musyrif*), bisa memainkan peranan yang dimainkan oleh staf pengajar di *The Pavilion* yang diidealisasikan oleh Thomas Jefferson. Santri mahasiswa berada di bawah pembibingan kuat tenaga pengajar. Infrastruktur yang ada diorientasikan sebagai sarana konsentrasi yang tinggi bagi studi mahasiswa. Proses pembelajaran memang selama ini sudah berjalan. Namun, yang sekarang berjalan bisa digerakkan dengan target akademik yang lebih tinggi dalam tenggat waktu yang ketat. Maka, manajemen kurikulum perlu menjadi perhatian khusus dalam kaitan ini.

Perpustakaan layak untuk diperkuat. Baik dari sisi

koleksi buku maupun manajemen penyelenggaraannya. Termasuk dalam kaitan ini adalah durasi layanannya. Perpustakaan harus menjadi indikator penting: hidup tidaknya perpustakaan akan segera menjadi penanda dinamis tidaknya civitas akademika. Atau sebaliknya, dinamis tidaknya civitas akademika bisa dilihat dari hidup tidaknya perpustakaan. Karena, salah satu pilar utama dari pendidikan tinggi adalah perpustakaan. Sebagaimana dalam desain Thomas Jefferson, pergerakan perguruan tinggi harus terpusat pada perpustakaan. Dan karena itu, perpustakaan didesain oleh Thomas Jefferson menjadi salah satu bangunan penting dalam konsep *academical village* di atas. Termasuk yang menjadi perkembangan terkini adalah bagaimana dipikirkan secara serius desain perpustakaan digital untuk penguatan mutu akademik mahasiswa.

Secara lebih konkret lagi, kampus di Indonesia bisa didorong untuk menyediakan dan memanfaatkan sebuah bangunan khusus untuk mahasiswa tahun terakhir program doktoral. Di gedung khusus mirip *the Pavilion* itu, mahasiswa tahun terakhir program doktoral bisa dikonsentrasikan. Berbagai kegiatan mulai pembimbingan hingga penyelesaian penulisan tugas akhir bisa dilakukan di situ dengan tingkat konsentrasi dan fokus akademik yang tinggi. Dengan begitu, akan terjadi percepatan penyelesaian dan pendalaman mutu disertai oleh masing-masing mahasiswa doktoral itu. Sebagai catatan khusus, mahasiswa doktoral tahun terakhir bisa menjadi pihak yang sangat diutamakan untuk memanfaatkan fasilitas tinggal mirip *The Pavilion* ini. Meskipun bukan yang pertama, gagasan ini sangat menarik untuk dilakukan, karena memiliki kemiripan dengan konsep *The pavilion ala academical village* yang ditelorkan oleh Thomas Jefferson tahun 1820an di Amerika Serikat.

Tentu, semua biaya operasional harus dihitung dengan

jeli, agar tidak ada yang dirugikan dari sisi finansial. Tapi, terlepas dari hitung-hitungan pembiayaan ini, tujuan penyediaan dan pemanfaatan fasilitas tinggal mirip *The Pavilion* dimaksud sangat jelas; agar mahasiswa doktoral tidak mempraktikkan prinsip “lestari”. Ya,..... “lestari” dengan kepanjangan dalam bahasa Jawa: *males tapi mari* (selesai sih, tapi butuh waktu sangat lama). Kata “sangat lama” ini menunjuk kepada ketidaktepatan waktu yang tinggi.

Sudah sangat banyak istilah yang dipakai untuk mensifati jihad para pencari ilmu di level doktoral. Sebut saja sebagai misal, pemlesetan “doktor” dengan kepanjangan “mondok di kantor”. Contoh anekdotal ini menjelaskan bahwa studi doktoral bukan persoalan kecil. Apapun akan dilakukan oleh mahasiswa doktoral agar studinya bisa tuntas. Akan tetapi, godaan dan tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Ini yang membuat sekelompok mahasiswa doktoral harus “mondok di kantor” agar studinya selesai. Nah, kalau ada fasilitas tinggal mirip *The Pavilion* seperti dijelaskan di atas, maka upaya untuk mempercepat finalisasi penulisan disertasi bisa dikondisikan dengan maksimal. Karena, mahasiswa yang tinggal di dalamnya dengan tingkat fasilitas pembimbingan dan konsentrasi yang baik dan tinggi akan dihadapkan pada target studi dengan tenggat waktu yang ketat.

Lebih dari itu, ketepatan waktu penyelesaian studi doktoral akan berdampak positif pada keberadaan kampus asal mahasiswa yang bersangkutan. Minimal, kualifikasi pendidikan doktoral segera akan mendongkrak nilai akreditasi lembaga, baik pada level program studi maupun perguruan tingginya. Kalau ini bisa dilakukan, maka sebuah perguruan tinggi telah menjalankan fungsi *outreach* akademik ke perguruan tinggi lainnya, negeri ataupun swasta. Lebih dari itu semua, ketepatan waktu penyelesaian studi doktoral, secara maksimal,

bisa dijadikan sebagai jalan dan sekaligus upaya bersama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di perguruan tinggi di tanah air.

Orang Tua, Jangan Telat Mengajarkan Moral!

Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang nilai. Juga mengalaminya. Posisinya begitu penting bagi kemajuan individu, masyarakat dan bahkan bangsa. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan muhibah ke sejumlah kota di lima negara bagian di Amerika Serikat (AS; yang meliputi Washington DC, New Hampshire, Iowa, Nevada, hingga San Fransisco) dari tanggal 22 Februari hingga 18 Maret 2013 dalam rangka penguatan kepemimpinan internasional (*International Visitor Leadership program/IVLP*) bertajuk “Mendidik Pemuda Calon Pemimpin Masa Depan” (*Educating Youth for Future Leaders*) oleh Departemen Luar Negeri AS. Pada bagian ini, catatan perjalanan menguraikan tentang bagaimana keluarga memainkan peran pentingnya dalam kehidupan sebuah masyarakat dan bangsa di Amerika Serikat. Peran penting itu tergambar mulai dari persoalan moral diri hingga sukses hidup di tengah masyarakat.

Sebuah memori akan bersemayam kuat. Itu mungkin saat sebuah pengalaman tak pernah terjadi sebelumnya. Hari-hari itu di pertengahan minggu pertama Maret 2013, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat dihantam badai salju hebat. Berbagai kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Sekolah-sekolah di beberapa wilayah diliburkan. Termasuk penerbangan terpaksa harus ditunda. Bahkan, penjadwalan ulang pun tak bisa dihindari.

Penerbangan yang membawa saya dan rombongan dari negara bagian New Hampshire ke Iowa melalui beberapa transfer di bandara kota Boston dan Chicago akhirnya mengalami penundaan beberapa kali, bahkan penjadwalan ulang hingga hari berikutnya pun terjadi. Tidak ada yang komplain. Tidak ada orang yang menggerutu karena penundaan hingga penjadwalan ulang itu. Tidak pula ada orang yang

marah-marah hingga harus memaki-maki staf penerbangan yang mengurus *boarding* penumpang.

Mengapa begitu? Karena faktor alam. Badai salju (*winter storm*) yang hebat tidak memungkinkan aktivitas penerbangan. Jangankan penerbangan pesawat, sekolah saja, seperti dijelaskan di atas, harus diliburkan. Bisa dipastikan celaka jika penerbangan pesawat dipaksakan, di antaranya karena desakan dan kengototan penumpang. Tentu, standar keselamatan menjadi prioritas hingga penundaan dan penjadwalan ulang pun harus ditempuh.

Semuanya mengerti dan memahami kondisi yang mengakibatkan penundaan hingga penjadwalan penerbangan itu. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menerima kenyataan itu. Karena, semua yang dilakukan pihak bandara dan kru pesawat itu demi keselamatan penerbangan. Keselamatan bersama. Sebab, landasan penuh dengan salju. Bodi pesawat juga semakin tebal karena salju semakin kuat menempel dan semakin menebal pula. Kalau dipaksakan terbang, pasti pesawat akan kehilangan keseimbangan. Naas pun hampir bisa dipastikan tak terhindarkan jika dipaksakan terbang.



Foto: Penulis sedang bermain ski di New Hampshire

Tentu, semua itu menjadi pengalaman menarik. Tentu, pengalaman itu pertama terjadi pada saya. Juga, tentu, pengalaman itu tak akan terlupakan. Sebab, penundaan dan bahkan penjadwalan ulang sangat biasa terjadi pada penerbangan di Indonesia. Faktor penyebabnya, mayoritas, bukan alam. Tetapi murni faktor manusianya. Pengelolanya. Argumennya macam-macam. Mulai dari masalah layanan sistem komputerisasi hingga teknis mesin pesawat, yang semuanya sejatinya masih berada dalam kontrol manusia jika dikelola secara maksimal-profesional.

Nah, faktor kehidupan yang masih bisa dikontrol oleh manusia inilah yang membuat saya semakin menaruh perhatian besar untuk belajar dari kehidupan orang-orang Amerika Serikat. Dalam bayangan saya, negara ini bisa maju pasti karena orang-orangnya bisa menunjukkan prestasi yang hebat. Pasti orang-orangnya tidak pernah menyerah pada keadaan yang masih bisa dikelola dan bahkan dikendalikan oleh mereka sendiri. Meskipun alam menjadi sebuah faktor kehidupan mereka, seperti dalam kasus penerbangan pesawat di tengah badai salju hebat di atas, kemampuan diri mereka sangat dimaksimalkan.

Persoalan itulah yang banyak menginspirasi kegiatan saya dan rombongan selama bertemu dan bergaul dengan sejumlah kalangan di negeri adidaya itu. Termasuk, tidak lupa, belajar dari kemungkinan “kesalahan” orang-orang Amerika sendiri saat mereka mungkin tidak bisa mengontrol bagian dari kehidupan yang sejatinya masih di bawah kewenangan dan kekuasaan mereka untuk mengontrolnya. “Kesalahan” inilah yang mungkin menjadi problem sosial di tengah-tengah kehidupan nyata mereka sendiri.

Sesampai di negara bagian Iowa pada Rabu 6 Maret 2013 dari serangkaian kunjungan ke lima negara bagian,

saya dan rombongan langsung diajak oleh pengarah kegiatan untuk mengunjungi dua akademi komunitas (*community college*) di daerah karesidenan Dallas. Yaitu, Des Moines Area Community College (DMACC) dan John Deere TECH Community College (JDCC). Sepulang dari kegiatan itu, kami dijemput oleh sebuah keluarga yang terdiri dari dua ibu-ibu cukup tua. Namanya Judi dan Jane. Selama dua malam, kami serombongan melakukan *homestay* di rumah mereka.

Judi dan Jane adalah dua saudara kandung, yang ingin menghabiskan masa tuanya berdua untuk mengulang masa manis kanak-kanak dan remaja mereka saat masih berada di bawah pengasuhan orang tua. Itu mereka lakukan setelah masing-masing “menyelesaikan” tugas pekerjaan dan kehidupan masing-masing bersama keluarga masing-masing pula.



Foto: (Dari Kiri) Penulis, Judi, dan Jane

Kenangan saat mereka dididik dan dibesarkan oleh orang tua membekas kuat hingga ingin mereka ulang kembali. Saat-saat itu, bagi mereka, sangat indah sekali. Mereka merasa, justeru kebersamaan, pendidikan, dan pengasuhan oleh orang tua saat mereka kanak-kanak dan remaja itulah yang mempengaruhi seluruh kehidupan mereka.

Atas kenangan pendidikan dan pengasuhan masa lalu itu pula, Jane pun mengkritik kehidupan sosial yang terjadi di sejumlah warga Amerika belakangan kala itu. “Munculnya problem-problem sosial di Amerika belakangan ini, karena peran orang tua sudah memudar. Bangunan keluarga sudah tidak lagi kuat. Buktinya, tingkat perceraian sudah meningkat.” Begitu kritik Jane.

“Akibatnya,” lanjutnya, “mulai banyak keluarga yang berada di bawah pengasuhan satu orang tua, *single parent*. Dan biasanya, anak-anak ikut ibu daripada bapak. Maka, dalam kondisi itu, ibu menjadi segalanya dalam keluarga itu. Anak kehilangan figur bapak. Sebagai gantinya, ibu harus bertindak sebagai ibu sekaligus bapak. Tentu, tugas itu tak bisa dilakukan persis seperti jika figur bapak ada di dalamnya.”

Pernyataan Jane bernada otokritik di atas diamini oleh kakaknya, Judi. Itu mereka sampaikan sekaligus untuk menjelaskan sentralnya peran orang tua dan keluarga dalam seluruh kehidupan mereka. Pula, otokritik itu menggambarkan bahwa problem sosial yang berkembang kala itu terjadi di lingkungan masyarakat Amerika bisa diasumsikan bermula dari rapuhnya bangunan keluarga. Keberadaan, peran, dan fungsi orang tua sudah tidak lagi maksimal. Perubahan kehidupan keluarga inilah yang menjadi awal dari problem sosial lebih luas.

Dalam kondisi bangunan keluarga yang demikian itu, maka berbagai negosiasi psikologis, kultural, dan sosial harus dilakukan oleh seorang ibu sebagai orang tua tunggal terhadap anak-anaknya di tengah keterbatasan itu. Baik keterbatasan tenaga, waktu, hingga finansial akibat kesendiriannya sebagai orang tua. Akibatnya lebih jauh, seorang ibu harus berdamai dengan apa saja yang ingin atau telah dilakukan oleh anaknya. Lalu seakan-akan harus disediakan ruang pemakluman, konsesi, dan sekaligus kompensasi kepada anak-anaknya atas

keterbatasan yang dimilikinya. Ibu tidak bisa bertindak tegas saat anak-anaknya melakukan kesalahan. Bahkan, yang secara moral sangat fatal sekalipun, seperti praktik seks bebas dan kecanduan obatan-obatan terlarang.

Rapuhnya bangunan keluarga dan redupnya peran pendidikan orang tua akan semakin menimbulkan masalah sosial lebih besar jika bertemu dengan lingkungan kehidupan yang tidak baik. Bertemu dua kondisi ini akan sangat potensial menjadi lahan subur bagi tumbuhnya anak-anak dengan kepribadian yang bermasalah. Jika, anak-anak dengan kepribadian bermasalah seperti ini mencari tempat bersosialisasi yang bermasalah pula, maka akan muncul kepribadian kolektif yang bermasalah juga dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Munculnya kriminalitas dalam bentuk kelompok seperti gangster di sejumlah wilayah di Amerika hanya merupakan akibat saja dari bertemu dua kondisi di atas. Dalam kehidupan kelompok gangster seperti ini, nalar kolektif lebih menguasai diri individu anggotanya daripada nalar individual. Praktik kehidupan individu anggota gangster lahir dari cara berpikir dan bertindak kolektif yang berkembang kuat di internal kelompok itu. Kalau sudah begini, maka penanganannya pun tidak bisa mengandalkan kewenangan individual. Kewenangan kolektif harus dimainkan secara efektif dalam kaitan ini.



Foto: Bagian Film American Gangster

(Sumber: <https://www.catchplay.com/id/ed-says/article-1578-5dek2ttg>)

Nah, satu-satunya kewenangan kolektif yang secara konstitusional diperbolehkan melakukan tindakan hukum di sebuah negara adalah pemerintah. Kelompok masyarakat, bahkan ormas besar sekalipun, tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap apa saja yang terkait dengan kehidupan bersama. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik yang mengatur hajat hidup orang banyak memiliki peranan penting pada titik minimal untuk menyelesaikan problem bersama di tengah masyarakat, dan pada titik maksimal menyetir arah perkembangan sebuah bangsa ke depan.

Dalam kaitan ini, kesan kuat yang saya tangkap dari praktik politik pemerintahan di Amerika dan sekaligus dari hasil konfirmasi pembicaraan dengan berbagai anggota dan kelompok masyarakat yang beragam, kekuatan politik di negeri Paman Sam ini juga terbelah dalam menghadapi dan menyelesaikan problem sosial di atas. Partai Republik kala itu cenderung konservatif. Politisi partai ini ingin sekali menjadikan keluarga sebagai unit paling dasar dan

penting untuk menyelesaikan problem sosial yang terjadi dan membentuk masa depan kehidupan bersama.

Mereka kala itu cenderung melakukan konservasi terhadap nilai-nilai tradisional yang tumbuh dan berkembang lama dalam kehidupan masyarakat Amerika. Karena itu, pemahaman yang bisa saya tangkap, mereka sangat menjunjung tinggi struktur dan nilai keluarga. Kehidupan masa depan Amerika, dalam kesan pembacaan saya terhadap pandangan politik Partai Republik ini, dibangun melalui penguatan struktur fondasi bangunan serta nilai-nilai keluarga yang berjalan dalam kehidupan tradisional masyarakat Amerika.

Lain halnya dengan Partai Demokrat. Kehidupan liberal lebih menjadi arus utama dari kebijakan politik partai ini. Unit dasar dari kehidupan masyarakat dan bangsa Amerika bukan diletakkan pada bangunan keluarga, melainkan individu. Maka, yang ditekankan partai ini kala itu adalah hak individual. Apapun keputusan yang diambil dalam praktik kehidupan seseorang, baik atau tidak, dikembalikan kepada hak individu.

Tentu, proses penegakan hukum, dalam pandangan partai politik ini, ditegakkan secara kuat agar bangsa dan negara ini tidak mengalami kekacauan dan kegaduhan akibat centang-perenangannya ekspresi dan aktualisasi dari hak individu dimaksud. Penegakan hukum itu dianggap wajib untuk menjamin kebajikan hidup bersama. Selama tidak merugikan kepentingan dan kebajikan hidup bersama, maka apapun yang dilakukan oleh seseorang dianggap sebagai hak individu yang tidak boleh diganggu.



Foto: (Dari Kiri) Capres 2012 Partai Republik (Mitt Romney) dan Partai Demokrat (Obama)

Argumen kebijakan politik oleh dua partai seperti di atas terus hidup dan berlangsung di tengah berbagai prestasi dan problem kehidupan sosial masyarakat di Amerika. Keduanya tentu memiliki nilai plus-minusnya. Namun, interaksi dari kedua partai beserta argumentasi politik yang dikembangkan dalam kebijakan masing-masing turut mengantarkan dinamika yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, di tingkat masyarakat sendiri, kehidupan berjalan sangat dinamis. Kondisi ini yang menimbulkan kekuatan dan energi yang kuat bagi lahirnya, selain masalah sosial, berbagai prestasi di tingkat masyarakat.

Kreativitas dan inovasi menjadi bagian paling penting dari kekuatan dan energi untuk berprestasi di atas. Publik tentu sangat ingat dengan figur kreatif-inovatif, seperti Bill Gates dengan Microsoft-nya dan Steve Jobs dengan Apple-nya. Keduanya sama-sama figur kreatif-inovatif kelahiran 1955. Bill Gates terlahir dari pasangan orang tua ternama. Ayahnya seorang penasihat hukum tersohor di Washington. Ibunya menjadi dewan direktur lembaga ekonomi [First Interstate BancSystem](#) dan lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat The [United Way](#).

Steve Jobs juga terlahir dari keluarga terdidik. Ayah dan ibunya memang berpisah. Namun, perpisahan itu, menurut

pengakuan ayahnya yang kelahiran Syria Abdulfattah “John” Jandali, terpaksa terjadi karena keluarga dari ibu Steve Jobs (Joanne Carole Schieble) sangat berkeberatan dengan hubungan mereka. Steve Jobs lalu diadopsi sebagai anak angkat dari pasangan Paul Jobs dan Clara Jobs. Keduanya memang bukan lulusan universitas. Namun, sesuai surat perjanjian mereka kepada ibu kandung Steve Jobs saat proses adopsi, keduanya menyekolahkan Steve Jobs hingga lulus universitas.

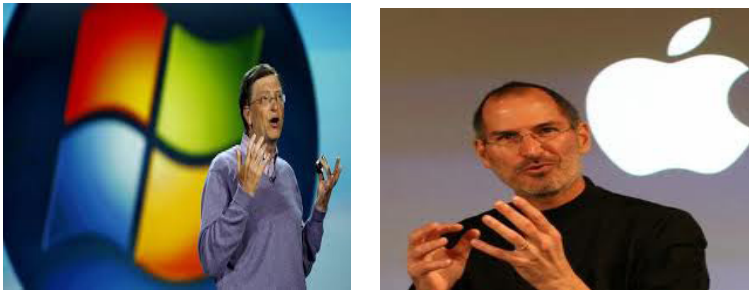


Foto: (Dari Kiri) Bill Gates dan Steve Jobs

Bill Gates dan Steve Jobs akhirnya menjadi pencetus, pendiri dan sekaligus pemimpin perusahaan raksasa bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan merek masing-masing. Bill Gates dengan bendera *Microsoft*-nya dan Steve Jobs dengan *Apple*-nya. Di tengah kedua orang hebat tersebut, kedua perusahaan dimaksud masing-masing kemudian berkembang dan menjadi raksasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hingga dalam waktu yang sangat lama. Nama kedua tokoh itu pun lalu melegenda dalam dunia bisnis teknologi informasi dan komunikasi global.

Kesadaran orang tua atas pentingnya pendidikan menjadi modal dasar bagi serta awal dari lahirnya generasi berprestasi. Tentu, peran pemerintah Amerika juga sangat besar dalam menyediakan serangkaian kebijakan yang terkait dengan kepentingan umum, mulai dari perhatian yang besar

pada sektor pendidikan hingga penguatan ekonomi nasional. Itu semua memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masa depan generasi Amerika.

Masyarakat Amerika pun bangga dengan prestasi hebat yang diraih anak bangsa sendiri. Judi dan Jane, warga Amerika yang menjadi tuan rumah *homestay* saya dan rombongan kala itu, juga sangat bangga dengan prestasi hebat anak bangsa seperti Bill Gates dan Steve Jobs di atas. Kebangaan itu tak pernah dilepaskan, di antaranya, dari prestasi dan model pendidikan serta pengasuhan orang tua. Dalam kehidupan internal mereka sendiri, Judi dan Jane pun akhirnya mengenang bagaimana mereka dibesarkan, diasuh, dirawat, dan dididik oleh bapak dan ibu mereka saat masih kanak-kanak dan remaja.

Bapak mereka adalah polisi satuan lalu lintas jalan tol. Ibu mereka seorang ibu rumah tangga murni, mengurus keluarga, termasuk mendidik dan membesarkan anak. Si Bapak sangat tegas, namun penuh kasih sayang dalam mendidik dan membesarkan mereka. Si ibu menjadi jangkar bagi kehidupan mereka. Dia dalam pandangan mereka menjadi pelaksana harian kebijakan sang Bapak. Karena itulah, di hari tua mereka, mereka ingin mengenang kembali masa-masa indah itu dengan menghabiskan sisa umur mereka bersama dalam satu rumah sebagai saudara kandung.

Dan, pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat Amerika, termasuk *homestay* di rumah Judi dan Jane di atas, memberikan pelajaran penting atas arti hidup sebuah keluarga dan sekaligus makna sentral keberadaan orang tua sebagai jangkar bagi pendidikan dan penyiapan generasi mendatang. Tidak penting bagi masyarakat Indonesia untuk memberikan sikap dukungan atas salah satu kekuatan partai politik di Amerika. Tapi, kebijakan politik kekuasaan dan juga sekaligus pengalaman konkret masyarakat Amerika harus memberikan pelajaran penting untuk diambil hikmahnya

bagi kehidupan bersama di Indonesia. Tentu, pengalaman sejarah, konteks sosiologis-kultural, serta berbagai kekayaan dan kearifan lokal yang dimiliki Indonesia harus tetap menjadi basis bagi pemetikan pelajaran dari kehidupan masyarakat dan politik kekuasaan negeri adidaya itu.

Salah satu pelajaran terpenting yang bisa dipetik dari pengalaman kehidupan di Amerika, bangunan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus kuat ditegakkan di tengah kehidupan masyarakat dan atau bangsa Indonesia. Komponen paling sentral dari bangunan keluarga yang kokoh ini adalah berfungsinya secara maksimal peran pendidikan orang tua kepada akan-anak. Salah satu indikator konkret untuk mengukur berfungsinya peran pendidikan ini, orang tua tidak pernah terlambat melakukan penanaman moral pada diri anak.

Penanaman moral sejak dini adalah aspek yang masih berada dalam kontrol manusia. Ini adalah sesuatu yang masih dalam kekuatan dan kekuasaan orang tua untuk melakukannya. Tidak ada faktor alam, seperti dalam kasus penjadwalan ulang penerbangan di beberapa negara bagian di Amerika di atas, yang membuat orang tua tidak kuasa atau tidak berdaya di sini. Keterlambatan pendidikan moral hanya akan menjadi bukti riil tidak berfungsinya secara maksimal peran pendidikan orang tua dimaksud.

Maka, jangan pernah terlambat mendidik moral anak! Kata Jane, *"If you don't teach your children well, somebody else will teach them the way you may don't like."* Maksudnya, jika Anda tidak mendidik Anak-anak Anda dengan baik, maka orang lain yang akan mengajari mereka meskipun Anda mungkin tidak suka mereka diajari seperti itu.

Siapakah yang akan mengajari anak-anak Anda seperti itu? Mereka mungkin teman sebaya. Mereka bisa jadi teman sepergaulan. Mereka bisa juga orang dewasa yang memiliki

kepribadian bermasalah dan ingin menanamkan pengaruh jeleknya. Dan seterusnya. Mungkin Anda tidak akan suka dengan mereka. Namun, justru mereka yang akan mengajari anak Anda di tengah kehidupan nyata. Karena, anak-anak Anda tidak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik dari Anda sendiri. Perkembangan teknologi dunia maya yang semakin canggih semakin membuka kesempatan anak-anak Anda untuk mendapatkan pengaruh dari siapapun yang mungkin Anda sendiri sebagai orang tua tidak suka.

Pengalaman advokasi dan pendampingan lembaga Creative Visions pimpinan Ako Abdul-Samad terhadap anak-anak, remaja, dan orang dewasa bermasalah di negara bagian Iowa, khususnya kota Des Moines, harus dijadikan pelajaran. Saat saya dan rombongan berkunjung ke lembaga ini dalam rangkaian IVLP 2013, kami dijelaskan bahwa lembaga ini melakukan advokasi dan pendampingan di antaranya kepada pecandu narkoba, anggota gangster, serta remaja yang hamil dan akhirnya memiliki anak dari hubungan seks bebas.

Pria yang saat itu juga menjadi anggota DPR negara bagian Iowa tersebut menuturkan kepada rombongan kami, masalah sosial yang menghinggapinya generasi di Amerika kala itu di antaranya karena lemahnya pendidikan keluarga. Kondisi pendidikan keluarga yang lemah itu bertemu dengan pengaruh luar yang buruk juga. Sebagai contoh riil dari akibat bertemunya kedua faktor ini, mulai meningkat jumlah remaja yang sudah terlalu cepat menjadi orang tua akibat perilaku seks bebas. *“They have become parents, but they don’t know how to become parents,”* kata pria yang lebih akrab dipanggil Ako. Mereka telah menjadi orang tua, tapi mereka tak tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik.



Foto: (Dari Kiri) Jago Bukit, Penulis, Ako, Dua Pengarah Kunjungan

Di Amerika dalam perkembangan kala itu, ada dua istilah terkenal, *teen pregnancy* (kehamilan remaja) dan *teen mom* (ibu remaja). Kedua istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi remaja yang, umumnya, karena seks bebas lalu hamil dan menjadi ibu dalam usia remaja sangat dini. Tentu, kedua istilah tersebut menyiratkan adanya masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Amerika sebagai akibat dari pergaulan bebas tak terkendali para generasi mudanya.

Angka kasus *teen pregnancy* dan *teen mom* di atas tampaknya tercatat makin hari makin meningkat. Data itu saya peroleh, khususnya, dalam kunjungan saya dalam rangkaian IVLP 2013 ke Reno Youth City Council (Pusat Pengembangan Pemuda Reno) yang berada di lokasi Evelyn Mount Northeast Community Center, negara bagian Nevada (12/03/2013). Direktur Reno Youth City Council, Darryl Feemster Sr., menjelaskan: “Jumlah kasus *teen pregnancy* belakangan meningkat; dan bahkan, mulai ada anak usia 10 atau 11 tahun yang sudah hamil karena seks bebas itu.”



Foto: (Dari Kanan) Penulis, Darryl Feemster Sr., dan Rombongan

Tentu, tidak ada satupun di antara keluarga dan masyarakat di Amerika, dan juga bahkan kita semua, yang menginginkan munculnya kasus *teen pregnancy* dan *teen mom* seperti dijelaskan di atas. Terutama apalagi jika hal itu terjadi pada keluarga sendiri. Sebab, jelas, bukan berkah yang muncul. Justeru musibah yang lebih menguat.

Perhatian khusus dibutuhkan terhadap masalah sosial ini. Dalam bahasa Ako Abdul-Samad, pria yang aktivis sosial dan sekaligus seorang muballigh aktif tersebut di atas, kalau kondisi buruk ini terjadi secara berantai dan berulang, maka mata rantai kehidupan antar generasi yang buruk sulit diputus. Keburukan akan terus berlangsung.

Dia mencontohkan, ada sebuah klub malam yang di antaranya pengunjungnya ternyata adalah tiga perempuan satu garis keturunan. Yakni, nenek, anak, dan cucu. Usia mereka

tidak terpaut jauh karena kehamilan muda akibat seks bebas di atas. Mereka sebetulnya datang secara terpisah, lalu bertemu di klub malam yang sama. “Akhirnya, mereka pun kompak berjoget bersama dan mabuk bersama di satu klub malam itu,” jelas Ako sambil mengernyitkan dahi sebagai simbol kegalauan atas kenyataan itu.

Telat membelajarkan moral yang baik, apalagi gagal sama sekali, hanya akan menjadi awal dari mata rantai kehidupan lintas generasi yang sulit terurai. Dibutuhkan bangunan keluarga yang kokoh dan baik. Masyarakat Indonesia harus belajar dari pengalaman di atas. Masyarakat Amerika telah memberikan pelajaran berharga, baik atas apa yang harus diteruskan dan apa yang harus ditiggalkan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dilema Pendidikan di Kota Perbatasan

Indonesia ini tidak saja Jakarta. Bukan juga Surabaya, Bandung, Medan atau Yogyakarta. Indonesia sangat luas dengan keragaman budaya dan kekayaan alam yang cukup berlimpah. Termasuk di antaranya adalah letak dan kondisi geografis yang tidak semuanya seperti lima kota besar di atas. Prinsip *one fits all* menjadi tidak relevan dan tidak bisa dipraktikkan di sini. Perbedaan situasi dan kondisi geografis, secara partikular, karena itu menjadi perihal penting yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan muhibah ke tanah Papua selama 6 hari (06 hingga 10 Januari 2012) dalam rangka studi arus dasar kompetensi pengawas dan kepala sekolah/madrasah (*Schools and Madrasah Principals and Supervisor' Competence Baseline Study*) hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta lembaga analis kebijakan *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP). Selama muhibah itu, penulis membuat serangkaian catatan perjalanan, mulai tentang Islam, pendidikan, dan masyarakat di tanah Papua. Pada bagian ini, catatan perjalanan menceritakan tentang tantangan pendidikan di daerah perbatasan Papua yang berhadapan secara langsung dengan problem mutu dan distribusi akses, atau bahkan keamanan.



Foto Siswa-Siswi (saat Istirahat) di SDN 1 Arso IV Kab. Keerom, Papua

“Pilih mutu atau aman? Kalau milih mutu, maka tidak akan ada anak Papua yang tuntas bersekolah karena mereka tidak mungkin bisa lulus ujian nasional. Kalau milih aman, turunkan standar aturan pendidikan. Jangan pakai standar di kota-kota lain untuk mereka. Yang penting, mereka bisa bersekolah. Bisa sekolah saja sudah untung. Jangan paksa mereka untuk memenuhi standar yang dipakai secara umum di tempat lain. Yang penting, mereka punya nasionalisme. Bisa berbahasa Indonesia. Dan bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya.”

Itulah problematika yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Papua di kota perbatasan. Kalimat “Pilih mutu atau aman?” pada kutipan yang bernada dilema atas dunia pendidikan di kota perbatasan di atas disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Bambang Suhartawan, dalam wawancaranya dengan saya di kantornya (7 Januari 2012). Bambang Suhartawan adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas urusan pendidikan di kabupaten ini. Dan dalam posisinya itu, dia memahami medan dunia pendidikan lokal di masyarakat Keerom.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom Provinsi Papua itu saya lakukan dalam rangka studi dasar kompetensi pengawas dan kepala sekolah/madrasah (*Schools and Madrasah Principals and Supervisor' Competence Baseline Study*). Studi itu penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kinerja pengawas dan kepala sekolah. Kajian akademik itu merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta lembaga analisis kebijakan *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP).

Di Kabupaten Keerom sendiri, seperti yang mungkin sudah menjadi pengetahuan umum sebagaimana saya tulis di bagian lain dari buku ini (lihat tulisan berjudul “Madrasah dan Sekolah Adalah Sama” di buku ini), terdapat tujuh distrik (kecamatan). Ketujuh distrik itu adalah Arso, Skanto, Arso Timur, Senggi, Web, Waris, dan Towe. Lima dari tujuh distrik tersebut merupakan kota perbatasan dengan negara Papua Nugini. Artinya, mayoritas gugusan geografis tanah Keerom merupakan “titik rawan”. Karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini.

Secara ras, kedua masyarakat dari dua negara berbeda di kelima titik perbatasan itu berasal dari ras yang sama, yakni ras Melanesia. Dari sisi sejarah sendiri, Melanesia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “pulau hitam”. Secara geografis, kelompok sosial dari ras tersebut menghuni sebuah wilayah yang terhampar dari Pasifik Barat sampai ke Laut Arafura, utara dan timur laut Australia. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di lima titik perbatasan Indonesia di sisi Kabupaten Keerom dan negara Papua Nugini memiliki kesamaan rasial, dan karena itu mereka mempunyai ikatan emosional yang kuat.

Sulitnya akses dari pusat pemerintahan kabupaten ke daerah-daerah perbatasan di lima titik di atas menjadikan tantangan tersendiri bagi pendidikan masyarakat Kabupaten Keerom. Jalan darat sangat tidak memungkinkan dari sisi transportasi dan keamanan. Bayangkan saja, dibutuhkan hampir dua hari untuk melakukan jalan darat. Itupun tidak bisa mengantarkan kita untuk sampai ke daerah-daerah perbatasan itu. Kita harus berhenti dan turun dari kendaraan di sebuah titik tertentu karena akses terputus. Selanjutnya, perjalanan sisanya harus ditempuh dengan jalan kaki.

Kondisi ini semakin diperparah oleh masih seringnya

terjadi gangguan keamanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di tengah perjalanan menuju lokasi daerah perbatasan itu. Medan yang luas, sulit, berbukit-bukit, bergunung-gunung, dan berawa-rawa membuat gangguan itu sulit pula diantisipasi dari awal. Artinya, tidak ada jaminan keselamatan. Karena itu, masalah keamanan semakin memperparah keadaan, sehingga akses darat ke daerah-daerah perbatasan itu terasa makin sulit. Siapapun terutama dari warga sipil akan menghindari cara tempuh darat seperti ini.

Maka, satu-satunya cara tempuh adalah dengan menggunakan pesawat carter. Namun, seperti pernah saya singgung pada bagian tulisan lain di buku ini (lihat “Madrasah dan Sekolah Adalah Sama”), biayanya sangat mahal. Seseorang yang memaksakan diri untuk menempuh cara ini harus siap-siap mengeluarkan isi kantongnya antara 18 hingga 20 juta rupiah. Itupun masih harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Karena, medan Papua yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, dan berawa-rawa sering menjadi awal malapetaka jika ekstra hati-hati tidak menjadi perhatian.

Dengan latar kesulitan geografis ini, maka penyelenggaraan pendidikan dihadapkan pada masalah besar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Bambang Suhartawan, memberikan contoh konkret begini: “Untuk membangun sebuah lokal yang dipakai untuk kelas pembelajaran saja, dibutuhkan dana sebesar Rp. 1,7 miliar. Mengapa begitu? Karena semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan lokal gedung itu harus diangkut dengan menggunakan pesawat. Tidak bisa melalui jalan darat.”

Akibatnya, lanjut Bambang Suhartawan, “harga bahan bangunan melangit.” Sebagai contoh, di tahun 2012 saat perjalanan akademik ini saya lakukan, harga semen satu sak

di Kota Jayapura hanya sebesar Rp. 88 ribu. Tapi, harga semen satu sak dengan ukuran perkilo yang sama mencapai Rp. 500 ribu di daerah-daerah perbatasan di Kabupaten Keerom itu. Maka, bisa dibayangkan, jumlah anggaran yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas gedung sekolah di Kota Jayapura untuk satu sekolah hanya bisa digunakan untuk membangun lokal gedung satu kelas di daerah-daerah perbatasan itu.

Maka, mempersamakan penyeleggaraan pendidikan di daerah-daerah perbatasan itu dan daerah-daerah lain, apalagi di Jawa, sangat tidak pas. Mengapa begitu? Karena latar belakang permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda. Fasilitas pendidikan saja sudah jelas berbeda. Lebih jelas lagi, jangankan soal sarana, urusan prasarana berupa gedung atau kelas pembelajaran saja sudah jelas-jelas bertolak belakang. Mahalnya biaya pengadaan dan atau pembangunan fasilitas pendidikan semakin memperbesar tantangan bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah perbatasan di Kabupaten Keerom itu.

Itu belum lagi soal latar belakang sosiologis. Masyarakat di daerah-daerah perbatasan yang sulit dijangkau oleh pihak-pihak dari luar daerah itu, termasuk oleh pemerintah dan pengambil kebijakan negara Indonesia sendiri, dihadapkan pada konteks sosiologisnya tersendiri. Sekolah bagi mereka memang penting. Tapi, mereka, cerita Bambang Suhartawan, tidak akan melupakan problem utama mereka sendiri: problem kelangsungan hidup di tengah keserbaterbatasan dan sekaligus titik perbatasan dengan masyarakat dari negara lain.

Belum lagi, interaksi antara penduduk Indonesia di daerah-daerah perbatasan itu dengan penduduk dari negara tetangga Papua Nugini juga sangat intens. Mereka bisa keluar-masuk antar negara tanpa harus menyertakan tanda pengenal, terutama paspor. Kesamaan ras dan kondisi kehidupan di

perbatasan semakin menambah kuatnya interaksi itu. Seakan-akan sudah tidak ada lagi sekat pembatas antara penduduk kedua negara di titik-titik perbatasan itu (*borderlines*). Bila ditarik ke level analisis lebih tinggi, di sinilah nasionalisme Indonesia bagi penduduk negeri ini di daerah-daerah perbatasan itu mendapatkan tantangan konkret.

Kalau soal sarana-prasarana serta konteks sosiologis saja sudah jelas-jelas berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia, apalagi bicara soal kualitas pendidikannya: pasti berbeda. Maka, bicara tentang mutu pendidikan dalam konteks seperti ini akan bermasalah. Harus diakui, bagi warga yang tinggal di daerah-daerah perbatasan di kabupaten Keerom, lulus sekolah dengan nilai hebat dan bisa menembus level pendidikan selanjutnya dengan kualitas terbaik tidak dianggap sepenting melangsungkan hidup. Penjelasan Pak Bambang Suhartawan di atas dengan beberapa ungkapannya “bisa sekolah saja sudah untung” menjelaskan bahwa problem yang dihadapi masyarakat di perbatasan negara harus dipahami dengan berbagai kearifan tersendiri. Jangan dimasukkan ke dalam standar pendidikan yang sama dengan tempat lain di Indonesia.

Maka, pilihan aman atau mutu yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom Provinsi Papua di atas adalah persoalan konkret. Mementingkan mutu saja akan segera dihadapkan pada kepentingan keamanan. Karena, pendidikan itu dijalani oleh masyarakat Keerom di titik perbatasan negara dengan berbagai tingkat kesulitan akses tempuh, fasilitas, dan biaya, seperti dijelaskan di atas. Karena kesulitan-kesulitan itu, pendidikan di daerah-daerah perbatasan di Kabupaten Keerom tersebut tak mungkin dipersamakan dengan pendidikan di tempat-tempat lainnya yang serba dikaruniai berbagai kemudahan dan fasilitas.

Mementingkan aman saja juga menimbulkan masalah. Karena, bagaimanapun, warga masyarakat di titik perbatasan di Kabupaten Keerom di atas adalah warga negara Indonesia yang harus diperhatikan nasibnya ke depan. Pendidikan adalah jalur pas untuk mobilisasi mereka. Membiarkan penyelenggaraan pendidikan mereka secara apa adanya hanya akan berdampak pada makin lebarnya jarak atau celah antara warga di titik-titik perbatasan tersebut dengan sesama warga negara di tempat-tempat lain di negeri ini.

Lalu, bagaimana solusinya? Bagaimana langkah agar pendidikan untuk masyarakat di daerah-daerah perbatasan, seperti di Kabupaten Keerom, mendapatkan perlakuan khusus dengan standar yaang khusus pula? Kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Bambang Suhartawan: “Gampang, melalui SK Bupati bahwa daerah-daerah itu masuk kategori daerah tertinggal.” Dengan SK itu, kata dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa menetapkan serta menerapkan standar dan perlakuan khusus bagi masyarakat dan pendidikan mereka di kota perbatasan.

Tanpa SK Bupati itu, maka pendidikan di daerah-daerah perbatasan akan diperlakukan dengan standar dan aturan yang sama dengan daerah-daerah lainnya. Jika itu yang terjadi, kalimat “pilih mutu atau aman?” seperi dalam kutipan di awal tulisan ini akan terus menjadi dilema pendidikan di daerah-daerah perbatasan dimaksud. Karena itu, para pengambil kebijakan di negeri ini harus segera memikirkan solusi paling efektif atas permasalahan ini.

Bersyukur Itu Menjaga Tradisi

Karakter akan mengalami penguatan jika dibiasakan. Dikondisikan. Sedini mungkin. Dan, pendidikan merupakan instrumen penting untuk melembagakan pembiasaan sedini mungkin itu. Di situ, sekolah memegang peranan penting. Jepang, dalam struktur budaya dan sosialnya, sangat menyadari hal itu, dan menjadikan sekolah sebagai penyemai karakter. Pilar lainnya adalah melalui kehidupan keluarga dan sosial. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan muhibah ke Povinsi Osaka (*Osaka Prefecture Government*) Jepang dan melakukan wawancara dengan pimpinan Kantor Dinas Pendidikan setempat serta observasi-wawancara ke SMA Higashi Ohtani Highschool pada tanggal 19-23 Desember 2019. Pada bagian ini, catatan perjalanan melukiskan cara masyarakat Jepang melestarikan budaya dan menjadikan sekolah sebagai instrumen penting untuk penguatan karakter yang telah lama menjadi pembentuk budaya mereka.

Belajar kepada yang lebih maju itu penting. Menunggu hikmah dari yang lebih dulu mengalami itu menarik. Karena yang lebih dulu maju pasti akan memberi pelajaran berharga. Bagi yang sedang mencari bentuk. Tak terkecuali kita. Apalagi, pelajaran itu kerap datang dari yang telah mengalami. Maka, yang datang belakangan atau yang berusaha untuk maju serupa penting untuk berguru kepada yang lebih maju. Atau yang lebih dulu mengalami. Sebagai contoh. Atau referensi. Minimal inspirasi.

Jepang adalah bangsa yang modern. Ukurannya adalah pengetahuan dan sains. Juga peradaban lebih jauh. Bukan saja material. Tapi juga nonmaterial. Bukan saja bentuknya teknologi. Seperti automotif. Informasi. Industri. Dan bahkan infrastruktur bangunan. Tapi juga tradisi. Juga sistem nilai yang lebih lebih mendasar bagi tata kehidupan sebagai sebuah bangsa.

Jepang adalah negeri dengan kekuatan karakter

tradisional yang terjaga. Negara dengan bangsanya yang sangat modern. Tapi mereka sangat kuat menjaga tradisinya. Sistem nilai hidupnya terpelihara dengan begitu baiknya. Meskipun peradaban material mereka sangat terkini. Meskipun mereka hidup dalam kemudahan yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi dalam banyak aspeknya.

Dalam situasi seperti itu, tentu pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah: Bagaimana masyarakat Jepang menjaga tradisinya di tengah modernitas yang tinggi itu? Bagaimana bangsa Jepang menyandingkan antara modernitas dan tradisi secara baik dan kuat? Tak kalah pentingnya, bagaimana pemerintah Jepang menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk penanaman karakter yang hebat hingga nilai tradisi bisa terpelihara dengan baiknya di tengah gegap modernitas dalam nafas bangsa itu?

Kunjungan studi banding rombongan kami menjadi penguat atas hasil bacaan dan pengetahuan awal tentang kebiasaan masyarakat Jepang itu. Secara konsisten, kami mendapati semua orang di Jepang begitu menghormati yang tua. Di rumah. Di pusat perbelanjaan. Di stasiun kereta api yang menjadi moda mobilisasi terpopuler bagi individu dan masyarakat. Dan bahkan di keluarga sekalipun.

“Di sini, setiap siswa sesampai di pintu gerbang sekolah pasti menganggukkan badan.” Begitu penjelasan kepala sekolah SMA Higashi Ohtani Highschool yang kami kunjungi setelah kunjungan pertama ke Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Osaka (Osaka Prefecture Government). Di Jepang, memang menganggukkan badan merupakan tradisi lumrah yang gampang dijumpai di banyak kesempatan.

Bahkan, di kereta cepat Shinkansen yang membawa kami dari Osaka ke Tokyo, semua petugas selalu menganggukkan badan setiap kali mau meninggalkan gerbong untuk pindah

ke gerbong lainnya. Apakah itu posisinya membelakangi atau menghadapi penumpang. Dan dilakukan oleh semua petugas. Tak peduli petugas keamanan kereta api--yang di Indonesia dikenal dengan polisi khusus (polsus) kereta api. Ataukah petugas penjual makanan dan minuman. Atau petugas layanan lainnya. Semua menganggukkan badan ketika hendak membuka pintu gerbong untuk pindah ke gerbong lainnya.

Dalam hal kebiasaan menganggukkan badan di pintu gerbang sekolah di atas, jangan dibayangkan bahwa di pintu gerbang sekolah itu ada guru yang berdiri menyambut siswa. Seperti halnya di sekolah-sekolah di Indonesia. Jangan dibayangkan ada sejumlah guru yang piket pagi dengan berdiri di bagian depan sekolah untuk menyambut siswa yang datang. Lalu, para siswa itu mencium tangan guru-guru itu. Bukan. Di sekolah itu, tidak ada pemandangan seperti yang bisa dijumpai di sekolah-sekolah kita di pagi hari. Atau bahkan sore saat pulang. Tidak sama sekali.

Tapi, siswa otomatis menganggukkan badan ke sekolah saat mereka sampai di pintu gerbang depan sekolah. Lalu apa maksud menganggukkan badan itu? “Bersyukur ke sekolah,” begitu kata kepala sekolah SMA Higashi Ohtani Highschool itu. “Saat menganggukkan badan itu, mereka mengucapkan syukur ke sekolah,” tambahnya. Praktik ini dilakukan setiap siswa datang di pintu gerbang sekolah.

Ucapan syukur itu penting dibiasakan kepada siswa. Kebiasaan itu harus dipraktikkan untuk menanamkan nilai bahwa kemajuan hidup mereka tidak lepas dari berkah sekolah. Tidak lepas dari jasa guru. Dan karena itu, setiap hari, setiap siswa harus bersyukur kepada guru. Biar tertanam pada diri mereka dari awal bahwa sukses mereka kelak tidak terlepas dari perjuangan guru. Dari kontribusi sekolah.

Itulah praktik pembiasaan pertama yang dilakukan di

sekolah. Berlaku setiap hari. Tidak mengenal itu hari efektif biasa atukah tidak. Tidak terpengaruh apakah itu hari istimewa, atau hari besar nasional, atukah tidak. Setiap hari, siswa pasti menganggukkan badan ke sekolah saat mereka sampai di pintu gerbang depan sekolah. Setiap siswa pasti melakukan praktik itu. Tidak peduli latar belakang sosial ekonomi keluarga asalnya. Semua dari siswa sekolah itu melakukan aksi menganggukkan badan saat menginjakkan kaki di depan pintu gerbang sekolah.

Lalu, praktik pembiasaan kedua yang menjadi kebijakan sekolah adalah mewajibkan setiap siswa untuk berdoa. Bentuknya, mereka difasilitasi untuk melakukan meditasi di kelas selama 3-4 menit. Pada saat memulai jam pelajaran, dan mengakhirinya. Jadi dua kali dalam sehari: di awal dan di akhir pembelajaran harian. Praktik pembiasaan berdoa itu dilakukan setiap hari pembelajaran di sekolah. Guru mengajak siswa untuk melakukan praktik berdoa itu. Melalui meditasi.

Meskipun dilakukan secara berbarengan, praktik berdoa dalam meditasi itu bersifat sangat individual. Yang mengandalkan konsentrasi individu siswa terhadap Tuhannya. Bukan membaca doa bersama-sama di kelas bersama teman siswa lainnya dengan bacaan doa yang sama dan diucapkan bersama-sama pula. Bukan. Melainkan sendiri-sendiri. Konsentrasi pribadi. Redaksi doanya masing-masing. Walaupun doa itu dilakukan dalam waktu bersamaan dan dalam kelas bersama-sama lainnya.

Lalu, apa yang dibaca sebagai doa dalam meditasi harian itu? “Intinya doa untuk bersyukur,” begitu penjelasan kepala sekolah SMA Higashi Ohtani Highschool itu. Pada pagi mengawali pembelajaran, menurut kepala sekolah tersebut, siswa diajak untuk melakukan doa dengan mengenang jasa orang-orang yang telah memberi kebaikan kepadanya. Mulai dari orang tua, guru hingga orang-orang yang telah

mengantarkan bangsa Jepang hingga semodern saat ini. Dalam meditasi pagi itu, mereka diajak untuk bersyukur kepada mereka yang telah berjasa pada bangsa.

Doa syukur yang sama juga dilakukan saat mengakhiri pembelajaran sore hari. Polanya sama. Basisnya individual. Meskipun dilakukan bersamaan satu waktu. Hanya bedanya, saat meditasi di akhir pembelajaran sore hari itu, siswa diajak untuk menyampaikan doa syukur atas hari itu hingga bisa menjalani hidup, khususnya menyelesaikan tugas belajar hari itu. Yang Maha Kuasa dan guru sekolah menjadi panjatan doa syukur mereka.

Untuk memperkuat tradisi di kalangan peserta didik, sekolah juga melengkapi siswa dengan bahan-bahan bacaan yang diambil dari inspirasi dan nilai ajaran agama Buddha. Bahkan untuk kepentingan itu, sekolah mencetak buku-buku saku yang berisi cerita-cerita ringkas nan populer tentang ajaran Buddha. Salah satunya adalah buku berjudul *Butten Dōwa: Buddhist Stories for Children*, karya Higashi Honganji.²⁵ Buku ini memberi siswa inspirasi dan nilai-nilai dari cerita seputar ajaran Buddha, dan bagus dibaca oleh orang-orang umum yang pengetahuannya tentang ajaran Buddha masih cenderung terbatas, seperti siswa sekolah SMA Higashi Ohtani Highschool itu.

²⁵ Higashi Honganji, *Butten Dōwa: Buddhist Stories for Children*, terj. Aiko Watanabe (Kyoto: Higashi Honganji Publication Department, 2000).

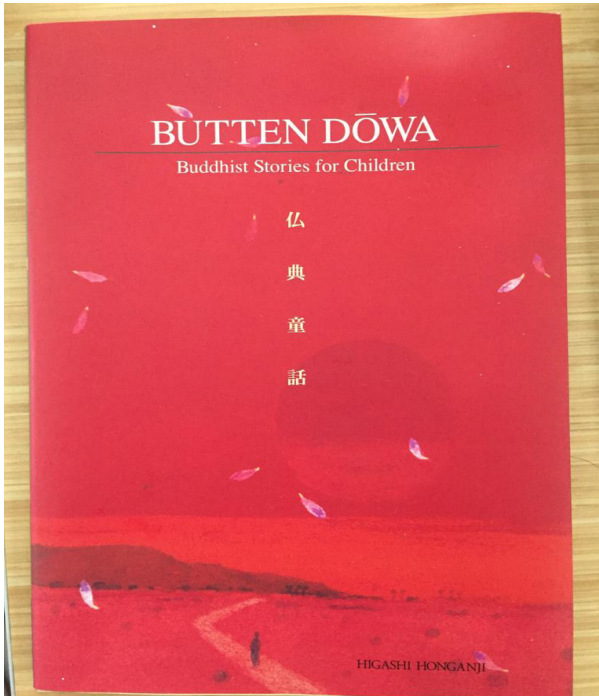


Foto: buku *Butten Dōwa: Buddhist Stories for Children*

Penyediaan buku-buku populer seperti *Butten Dōwa* di atas memang untuk memenuhi ekspektasi pembaca umum yang tidak secara spesifik dididik dalam kajian agama Buddha. Pernyataan penerjemah buku ini, Aiko Watanabe, dalam kata pengantar yang diberikan untuk buku ini sangat ilustratif, sebagaimana berikut: “Saat ini, minat terhadap agama Buddha semakin meningkat, dan banyak buku tentangnya telah ditulis. Sayangnya, banyak dari buku-buku itu sangat teknis, ditulis oleh kaum terpelajar untuk orang-orang terpelajar lain, dan karenanya tidak terlalu berarti bagi pembaca kebanyakan.”²⁶

²⁶ Kutipan asli dalam Bahasa Inggris berbunyi: “*There is growing interest in Buddhism today, and numerous books have been written about it. Regretfully, however, many of*

Dihadirkannya buku-buku populer seperti *Butten Dōwa* di sekolah-sekolah di atas adalah untuk memperkuat karakter berbasis ajaran Buddha kepada kalangan siswa. Melalui cerita-cerita populer yang disuguhkan oleh buku-buku dengan genre seperti di atas, diharapkan pembaca kebanyakan atau pembaca yang pengetahuannya masih dalam taraf berkembang, seperti siswa sekolah, bisa segera menyerap dan menerapkannya. Pada titik ini, pelajaran penting yang diberikan oleh SMA Higashi Ohtani Highschool Jepang adalah menghadirkan ajaran agama melalui cara yang maknanya bisa segera ditangkap dan diterangkan pembacanya, seperti cerita pendek.

those books are very technical, written by scholars for other scholars, and thus are not very meaningful to the average reader." Lihat Aiko Watanabe, "Foreword," dalam Honganji, *Butten Dōwa*, 2.

Ekosistem Sosial Ekonomi, Prasyarat Pendidikan Vokasi

Cita-cita dan fakta tak selalu berjalan bersama. Kadang ada bias di antara keduanya. Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai misal, pada awalnya diorientasikan secara berbeda dibanding Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Yang disebut pertama pertama diproyeksikan lebih ke akademik dan menjadi saluran pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, dan yang kedua lebih ke vokasi dalam rangka menyiapkan calon lulusan yang siap kerja. Namun dalam faktanya, terjadi proses persilangan. Sebagian lulusan SMA justru berorientasi ke pasar kerja, dan sebagian lulusan SMK justru ke pendidikan tinggi. Karena itu, ada kebutuhan untuk membekali siswa SMA dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan sebagai kompetensi teknis tambahan untuk masuk ke pasar kerja. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan muhibah pendidikan ke Perth, negara bagian Australia sebelah barat, selama seminggu (8-13 Desember 2019). Muhibah pendidikan ini diselenggarakan dalam rangka studi banding peningkatan mutu pembelajaran MIPA dan Bahasa untuk SMA ke Australia Barat pada satu sisi, dan studi tiru penyelenggaraan pemberian kompetensi tertentu dalam bentuk keterampilan teknis untuk masuk ke pasar kerja pada sisi lainnya. Pada bagian ini, catatan perjalanan menggambarkan pentingnya pembangunan ekosistem sosial ekonomi sebagai prasyarat penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Mindset untuk sekolah vokasi di Australia dan Indonesia beda. Di Australia, siswa sekolah di pendidikan vokasi karena minat. Bukan uang. Di Indonesia, siswa sekolah vokasi karena uang. Bukan minat.

Kutipan di atas adalah pernyataan Konsul Jenderal Kantor Perwakilan RI di Perth, Australia Barat, Dewi Tobing. Kalimat tersebut diucapkan saat memberikan sambutan pada acara jamuan makan malam delegasi Provinsi Jawa Timur selama kunjungan studi banding di Australia Barat, Minggu

(8/12/2019). Di tengah kebijakan pemerintah Indonesia yang menempatkan pendidikan vokasi sebagai primadona dalam pengembangan pendidikan untuk kurun hampir sepuluh tahun terakhir, pernyataan Konjen di atas sangat menggelitik untuk menjadi konteks dasar yang harus menjadi perhatian bersama. Sustansi pernyataan tersebut bisa menjadi faktor penentu dan sekaligus pembeda.

Boleh saja pemerintah Indonesia berargumentasi pendidikan vokasi penting untuk memutus mata rantai pengangguran. Tidak menjadi masalah pemerintah menjadikan pendidikan vokasi sebagai instrumen untuk menurunkan angka pengangguran. Namanya juga kebijakan. Tentu, saat pemerintah menelorkan kebijakan pendidikan semacam itu dimaksudkan sebagai intervensi politik untuk menekan dan atau menurunkan angka pengangguran. Caranya, dengan mempersiapkan calon tenaga kerja terampil yang siap kerja.

Terhadap kebijakan nasional itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun tampak “taat asas”. Kebijakan itu diterjemahkan secara teknis melalui ikhtiar kebijakan turunan teknis penyelenggaraan pendidikan secara terukur. Bentuknya, pendidikan jenjang menengah atas diterjemahkan ke dalam formula 70:30. Maksudnya, 70 persen layanan pendidikan jenjang menengah atas di Jawa Timur diperuntukkan bagi pendidikan vokasi. Bentuknya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). Dan 30 persen sisanya adalah pendidikan reguler dalam pengertian non-vokasi. Bentuknya adalah sekolah menengah atas (SMA). Formula itu dilakukan secara taat. Dan faktanya, hingga 2019, formula di atas hampir tercapai secara maksimal, dengan jumlah SMA yang mencapai hampir 30 persen dari jumlah total layanan pendidikan jenjang sekolah menengah atas.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan data yang

berbeda dari yang diinginkan. Sekolah vokasi tampak belum mampu menjadi jawaban atas kepentingan penurunan angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menunjuk kepada fakta masih mendominasinya lulusan SMK atas realitas pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai angka 11,34 persen. Melebihi lulusan SMA yang mencapai 7,95 persen. Untuk selanjutnya di bawahnya adalah lulusan diploma sebesar 6,02 persen dan perguruan tinggi 5,89 persen.

Data BPS 2018 di atas tidak bisa menafikan bahwa serapan lulusan yang cenderung rendah di pasar kerja masih menjadi faktor penting yang menyumbang angka yang signifikan terhadap gambar besar pengangguran. Dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator penting yang bisa dipakai untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Bentuknya, sama sekali tidak bekerja. Faktor penyebabnya beragam. Mulai dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, keengganan untuk bekerja, hingga ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan. Meski begitu, faktor yang disebut terakhir masih cenderung yang paling menonjol.

Fakta penyelenggaraan pendidikan vokasi di Australia Barat, seperti disampaikan Konjen RI di atas, penting untuk menjadi bahan refleksi dan pemikiran mendalam bagi pengambil kebijakan pendidikan di tanah air. Pelajarannya, ikhtiar besar pemerintah untuk mengembangkan formula 70:30 untuk penyelenggaraan pendidikan menengah atas bagi sekolah vokasi dibanding regular alias non-vokasi masih belum tuntas. Harus ada upaya terukur untuk menyempurnakan intervensi politik pendidikan tersebut dengan dua hal penting: pengembangan cara berpikir mendasar (*mindset*) dan ekosistem

sosial. Pengembangan cara berpikir mendasar penting untuk memperkuat sistem tata nilai yang mendasari perilaku seseorang, sedangkan pengembangan ekosistem sosial berperan vital untuk memfasilitasi secara teknis bagi pengembangan sistem tata nilai yang mendasari perilaku dimaksud. Dalam bahasa ilmu sosial kritis, yang disebut pertama dinamakan dengan suprastruktur sosial, dan yang kedua infrastruktur sosial.

Mindset yang berbeda akan menimbulkan hasil yang berbeda pula. Sistem tata nilai pikir ini cenderung menjadi titik berangkat bagi munculnya perubahan-perubahan perilaku. Ia berfungsi sebagai motivasi yang akan menggerakkan seseorang untuk melahirkan perilaku tertentu. Karena motivasi yang berbeda, tingkat keseriusan pun akan berbeda. Tingkat komitmen pun juga pasti berbeda pula. Itu yang menjadikan hasil yang diperoleh juga berbeda juga. Dan pernyataan Konjen RI yang dikutip di awal tulisan ini mengingatkan agar pemerintah Indonesia tidak melupakan penguatan suprastruktur sosial dimaksud. Jika persoalan sistem tata nilai-pikir ini tidak diurus, harapan untuk menjadikan sekolah vokasi sebagai salah satu instrumen pemutus mata rantai pengangguran hanya menjadi impian belaka.

Peringatan di atas tampak semakin menemukan nilai signifikansinya di kala politik kuasa di negeri ini masih cenderung berpikir pendek. Ukuran yang dipakai untuk menyatakan keberhasilan sebuah program sangat sesaat. Yakni selama keberhasilan itu berada pada masa kuasa politik yang di bawah kendalinya. Jika praktik menanamnya berada di masa kuasa politiknya namun masa memanennya akan berada di kendali kuasa politik yang lain, maka program itu tidak bisa diklaim sebagai cerita sukses kebijakannya. Akhirnya, hampir semua pemangku kuasa politik di negeri ini cenderung berpikir

pendek: “menanam sesuatu yang hasilnya bisa dipetik tak lama dari masa menanam.” Dengan begitu, pemegang kuasa politik yang sedang berkuasa bisa mengambil dan menikmati insentif politik atas program kebijakan yang dilakukan.

Padahal, pendidikan itu urusan pekerjaan “menanam berjangka panjang”. Hasilnya tidak bisa diukur dan dinikmati tak lama setelah masa tanam. Kebijakan yang dibuat hari ini atas pendidikan, hasilnya baru bisa diketahui sepuluh atau lima belas tahun berikutnya. Atau paling cepat lima tahun setelah kebijakan dilahirkan. Maka, saat berpikir pendek lebih mengemuka, tak akan ada perubahan mendasar yang bisa diharapkan lahir. Sebab, perubahan mendasar itu tidak lahir seketika, melainkan butuh proses panjang nan berliku. Di sinilah dibutuhkan politik kenegarawanan yang berorientasi pada masa depan yang panjang dari sebuah bangsa, dan bukan politik kekuasaan primordial yang kerap diwarnai dengan aksi tanam-tunai kebijakan secara instan.

Dengan *mindset* yang baik terhadap politik pendidikan, pengaruh positif kebijakan pendidikan juga berimplikasi pada pola pikir peserta didik serta sekolah penyelenggara pendidikan. Sebagai contoh, di Australia, menyusul *mindset* kebijakan yang positif tentang pendidikan vokasi, siswa pendidikan vokasi cenderung menjalani pembelajaran secara sangat serius. Mereka oleh sekolah didesain untuk menguasai urusan *a* sampai *z* tentang keahlian spesifik itu. Lebih dari itu, siswa pun menyambut baik kebijakan bahwa siswa sekolah vokasi wajib mempunyai *license* atau sertifikat keahlian. Dan untuk itu, sekolah pun melengkapi siswa dengan selengkap mungkin alat peraga, pelatihan, dan lab yang dibutuhkan untuk menjamin keahlian itu. Contoh, sekolah vokasi kelistrikan, semua peralatan untuk menunjang dan mencapai keahlian kelistrikan disediakan di lab sekolah itu. Lalu siswa didesain

melalui pembelajaran keahlian untuk menguasai betul keahlian teknis tentang kelistrikan itu.

Lalu yang lebih penting dari semua itu, dengan keterampilan-keahlian teknis kelistrikan itu saja, lulusan sekolah vokasi sudah bisa hidup dengan baik. Mengapa bisa begitu? “Itu karena orang Australia sini juga sangat menghormati jasa terampil seseorang. Sehingga keahlian teknis apapun bisa membuat seseorang hidup layak.” Begitu penjelasan Bu Dewi Tobing, Konjen RI di Perth dalam jamuan resmi makan malam itu. Artinya, penghormatan atas jasa terampil itu diwujudkan ke dalam bentuk pemberian honorarium yang layak. Ukurannya, tidak saja bisa untuk penyambung hidup, melainkan juga bisa untuk gantungan hidup yang diandalkan. Dengan penghormatan yang baik melalui model penggajian dan pemberian honorarium yang baik begitu, mereka yang sedang menjalani pembelajaran teknis pada sekolah vokasi terdorong untuk menguasai keterampilan-keahlian teknis itu sebaik mungkin. Dan sekolahpun sebagai penyelenggaraan pembelajaran vokasi terdorong untuk menyiapkan peserta didiknya sebagai mungkin agar bisa menjadi tenaga terampil yang memadai.

Jadi, dari uraian, termasuk berbasis pada penjelasan konjen di atas, tampak pesan yang sangat jelas bahwa ekosistem sosial pendidikan-cum- ekonomi menjadi syarat mutlak agar pendidikan vokasi bisa mempunyai arti penting. Tanpa itu, maka keterampilan-keahlian teknis tertentu tidak bisa menjadi sandaran hidup, karena tidak ada apresiasi dari lingkungan pasar kerja yang membuat pemilik keterampilan-keahlian teknis yang merupakan lulusan sekolah vokasi tersebut bisa hidup layak.

Maka, pesan penting di atas patut diterjemahkan oleh pemerintah menjadi lima paket kebijakan konkret. *Pertama*,

memperkuat sekolah vokasi dengan penyediaan kelengkapan lab. *Kedua*, memperkuat strategi pembelajaran yang kondusif bagi penambahan keterampilan teknis siswa. *Ketiga*, menyertakan keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (dudiker) secara dekat ke dalam penyelenggaraan praktik khusus kecakapan teknis terkait. *Keempat*, memperkuat sertifikasi profesi pada sekolah vokasi. *Kelima*, mendorong dudiker agar mempertimbangkan keterampilan-keahlian khusus siswa sesuai dengan keahlian sekolah sebagai syarat penting rekrutmen pegawai atau karyawan.

Sekolah Integrasi; Inklusi Yes, Vokasi Oke

Pasca alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus-Layanan Khusus (atau yang lebih dikenal dengan kependekan SMA/SMK/PK-LK) tahun 2017 dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, semua pemerintah jenjang yang disebut terakhir memberikan perhatian besar untuk pengingkatan mutu pembelajaran jenjang pendidikan ini. Membekali siswa dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan sebagai kompetensi teknis tambahan untuk masuk ke pasar kerja sebagai pilihan pendamping dari kuliah, serta menyelenggarakan pendidikan inklusi, adalah contoh konkretnya. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan muhibah pendidikan ke Perth, negara bagian Australia sebelah barat, selama seminggu (8-13 Desember 2019). Muhibah pendidikan ini diselenggarakan dalam rangka studi banding peningkatan mutu pembelajaran MIPA dan Bahasa untuk SMA ke Australia Barat serta penyelenggaraan pemberian kompetensi tertentu dalam bentuk keterampilan teknis untuk masuk ke pasar kerja pada satu sisi, dan studi tiru penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sisi lainnya. Pada bagian ini, catatan perjalanan secara khusus menjelaskan bagaimana pendidikan inklusi diselenggarakan di Australia Barat melalui konsep sekolah integrasi. Konsep ini menggabungkan kebutuhan inklusi dan sekaligus vokasi ke dalam satu tarikan nafas yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik.



Foto: (tengah kabid SMA Ety Prawesti, paling kanan Helen Macri, paling kanan kedua Akh Muzakki)

Perjalanan siang itu sekitar 30 menit dari pusat kota Perth. Tujuannya ke daerah pinggiran kota. Namanya Butler. Perjalanan ini ditempuh untuk mengetahui secara konkret bagaimana Pemerintah Australia Barat menyelenggarakan pendidikan inklusi dan sekaligus vokasi di sekolah jenjang SMA.

Sekolah menengah dimaksud bernama Butler College. Butler menunjuk ke nama daerah. Dan kata yang dipakai untuk menunjuk ke arti sekolah adalah *college*. Bukan *school*. Di kompleks sekolah yang berdiri tahun 2013 di atas hamparan tanah yang sangat luas itu, terdapat sejumlah institusi sekolah berjenjang. Ada Butler Primary College untuk jenjang pendidikan dasar. Ada pula Butler College sendiri yang menandai penyelenggaraan sekolah level SMP dan SMA.

Rasa penasaran pun tak kuasa kutahan. “Mengapa

sekolah dasar ini kok diberi nama *primary college*, dan bukan *primary school*?” tanya saya kepada Helen Macri (wakil kepala sekolah Butler College) sambil menunjuk ke pemahaman jamak di negeri Kanguru itu bahwa *college* biasanya digunakan untuk level SMA dan pendidikan tinggi. “Itu untuk memudahkan pengingatan dan atribusi, karena semua jenjang sekolah berada di bawah *brand* tunggal: Butler College,” jelasnya.

Nah, cerita awal sampainya rombongan di kompleks Butler College penting untuk diturunkan. Setibanya di sekolah itu, rombongan kami ditolak memasuki pintu gedung. “Tamu tidak diperkenankan melewati pintu gedung ini. Harus lewat pintu gerbang utama bagian depan.” Begitu penjelasan salah seorang petugas sekolah. Ternyata, pintu itu adalah pintu khusus gedung utama yang menjadi akses keluar-masuknya siswa berkebutuhan khusus. Tidak boleh ada siapapun di luar kategori itu untuk menggunakannya sebagai akses masuk dan keluar kecuali guru.

Gedung itu khusus diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus. Kategorinya mulai dari *children with disabilities* (anak dengan kondisi disabilitas, atau yang kini juga dikenal dengan difabel) hingga *children with complex needs* (anak dengan kebutuhan kompleks). Kategori terakhir dipakai untuk menggambarkan kondisi anak yang mengalami keterbatasan banyak hal, mulai dari pendengaran, penglihatan, pengucapan, hingga keterlambatan berpikir (atau yang dalam bahasa mereka disebut dengan istilah *down syndrome* atau *intellectual disability*).

Rupanya, peruntukan bangunan gedung khusus untuk anak berkebutuhan khusus di atas berkaitan erat dengan desain pendidikan yang dijalankan oleh Butler College. “Kami tidak menyebut sekolah ini sekolah inklusi. Tidak. Kami menamai sekolah ini ‘sekolah integrasi.’” Begitu kata Bu Helen. Saya pun

penasaran. Apa bedanya sekolah inklusi dan sekolah integrasi. Sebab, dalam pemahaman umum, sekolah yang dalam penyelenggaraan pembelajaran di dalamnya menyertakan anak berkebutuhan khusus secara berbaur dan menyatu dengan anak reguler pada umumnya disebut dengan sekolah inklusi.

Ternyata kedua konsep itu berbeda makna dan cakupan di tangan Butler College. Penjelasan Helen berikut sangat ilustratif: “Kami tidak menyebut ini sekolah inklusi. Sebab, sekolah inklusi itu berarti seluruh proses pembelajarannya menyertakan baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus secara menyatu keseluruhannya. Untuk semua mata pelajarannya, dan semua kegiatannya. Semua jadi satu.” Helen menyebut anak reguler di sekolah tersebut dengan istilah khusus: *mainstream students* (“siswa pada umumnya”; dalam konteks ini saya lebih suka menerjemahkan istilah Inggris tersebut dengan “siswa pada umumnya” daripada “siswa arus utama” agar pemahaman semua kita menempatkan seluruh kategori siswa tersebut dalam posisi sama-sama penting).

Pada titik ini, Helen pun mengulangi penolakannya terhadap penamaan sekolahnya dengan sekolah inklusi. Dia justru lebih jauh menjelaskan konsep “sekolah integrasi” untuk mengidentifikasi sekolahnya. “Sekolah kami tetap memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara khusus pula. Itu untuk beberapa mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Untuk pembelajaran sains, matematika, dan bahasa, mereka memang kita jadikan satu ke dalam satu kelas dengan siswa reguler. Tidak ada perbedaan satupun. Tapi untuk kegiatan pembelajaran lainnya kita perlakukan berbeda. Contoh, seni dan olahraga. Karena mereka memang memiliki perbedaan kemampuan fisik dan atau mental.”

Bahkan, untuk mendukung pemberian perlakuan khusus itu, Butler College juga mendirikan gedung tersendiri

bagi anak berkebutuhan khusus dengan fasilitas yang khusus pula. Di dalamnya ada layanan ruang sensorik untuk memonitor perkembangan fungsi indera siswa berkebutuhan khusus. Juga ada ruang layanan (*student services*) yang khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Di dalamnya ada ruang konseling bagi siswa berkebutuhan khusus, dan ruang konsultasi psikologis bagi orang tua mereka.

Perbedaan kemampuan fisik dan atau mental di atas diperlakukan secara khusus, namun mereka dengan kemampuan berbeda tersebut dipersatukan ke dalam proses pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu dan kegiatan sekolah tertentu pula. Dengan penyatuan tersebut, siswa regular bisa terintegrasi dengan siswa berkebutuhan khusus dengan segala perbedaan yang memerlukan perlakuan khusus pula tersebut. Siswa *mainstream* bisa belajar apresiasi, adaptasi, dan kesantunan kepada siswa berkebutuhan khusus. Dan siswa berkebutuhan khusus juga bisa belajar untuk lebih percaya diri bersosialisasi ke kalangan lebih luas.

Bahkan untuk melengkapi desain sekolah integrasi di atas, Butler College juga memberikan keterampilan khusus kepada seluruh siswanya. Baik siswa *mainstream* maupun berkebutuhan khusus. Bentuknya adalah pemberian pembelajaran keterampilan teknis selama empat jam seminggu, yang terdistribusi ke dalam satu jam selama empat hari di lima hari belajar. Pilihan pembelajaran keterampilan teknis dimaksud di antaranya meliputi pertukangan kayu, bermain musik, memasak, dan penguasaan multimedia. Masing-masing di bawah penyelenggaraan guru ahli-spesialis.

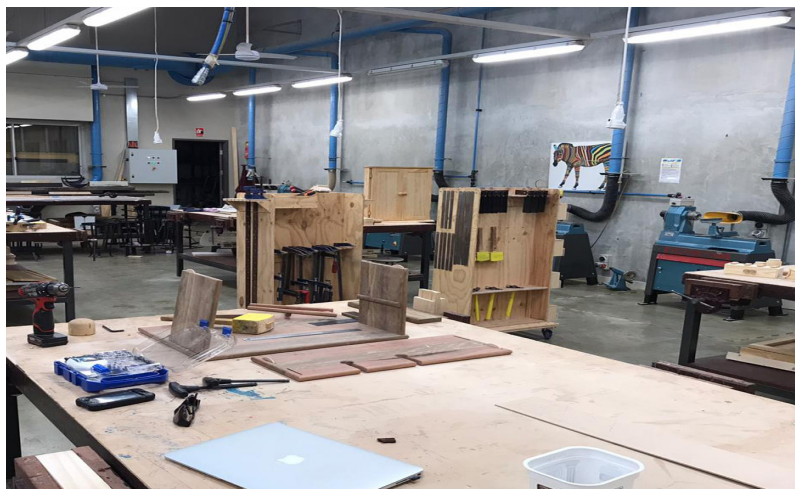


Foto: laboratorium pertukangan kayu di Butler College

Penguasaan atas keterampilan teknis tersebut dibuktikan dengan kepemilikan atas sertifikat keterampilan teknis. Dan, semua siswa bisa mengambil atau mengikuti pilihan pembelajaran keterampilan teknis yang berbuah sertifikat tersebut mulai kelas 11 hingga 12. Khusus untuk siswa berkebutuhan khusus, keterlibatan dan atau kepesertaan pada pembelajaran keterampilan teknis tersebut bisa dimulai setahun lebih awal, yakni pada kelas 10. Penentuannya berdasarkan hasil penilaian guru ahli-spesialis keterampilan khusus terkait.

Dengan desain penyelenggaraan pendidikan semacam itu, konsep sekolah integrasi di Butler College di atas bisa digambarkan dengan platform berikut: inklusi yes, vokasi oke. Inilah yang membedakan sekolah Butler College dengan sekolah-sekolah inklusi lainnya di luar Australia. Dan, Indonesia patut menirunya.

Untuk kepentingan pengelolaan pendidikan SMA, pemerintah provinsi di manapun di Indonesia patut mengambil

pelajaran besar dari Butler College. Sekolah ini menjadi contoh partikular yang menarik. Ia bukan sekolah vokasi, tapi memberikan bekal kepada siswa di dalamnya keterampilan teknis untuk bekal hidup mereka, termasuk di antaranya dalam memasuki pasar kerja pasca lulus sekolah.

Desain dan praktik pengintegrasian siswa berkebutuhan khusus ke kelas regular bersama siswa pada umumnya juga menjadi contoh yang patut ditiru bagi upaya untuk memperkuat desain dan implementasi sekolah inklusi di penyelenggaraan pendidikan SMA. Pada titik ini, konsep SMA *double track* milik Pemprov Jatim memiliki kedekatan dengan konsep sekolah integrasi Butler College. Hanya, Butler College telah lebih jauh menyertakan praktik integrasi yang di dalamnya juga terdapat inklusi. Sekolah integrasi Butler College mengajarkan: inklusi yes, vokasi oke.

BAGIAN TIGA

Eksperimentasi Sosial Ekonomi Lintas Budaya

Manusia itu makhluk multidimensional. Untuk melengkapi dimensi spiritual-immaterial pada dirinya, manusia juga diberi kelengkapan lain dalam bentuk dimensi material. Salah satu hilang darinya akan membuatnya tidak sempurna, minimal kehilangan keseimbangan hidup. Disorientasi adalah konsekuensi lanjutan semata dari ketidaksempurnaan dan atau ketidakseimbangan hidup dimaksud. Dimensi spiritual-immaterial menyangkut mental, dan karena itu perlakuan (*intervention*) terhadapnya juga harus menyentuh dimensi batin dan watak manusia. Sebaliknya, dimensi material menyangkut aspek hidup yang nyata, dan karena itu perlakuan terhadapnya pun juga harus menyentuh dimensi lahir yang konkret dari hidup manusia. Meskipun tidak berkaitan secara langsung, dimensi material ini juga dapat mempengaruhi mental manusia.

Ekonomi adalah bagian dari dimensi material yang sangat dibutuhkan oleh, dan dapat mempengaruhi, hidup manusia. Salah satu varian di dalamnya adalah apa yang dikenal dengan istilah ekonomi sosial (*social economy*) yang kerap diidentifikasi sebagai bagian dari kerangka kerja yang khas dari pengembangan ekonomi kemasyarakatan (*socio-economic development*).²⁷ Secara per definisi, Ekonomi Sosial ini mengkaji hubungan antara ekonomi dan perilaku sosial dengan

²⁷ Crystal Tremblay, *Advancing the Social Economy for Socio-Economic Development: International Perspectives*, Public Policy Paper Series 2009, No. 01 (September 2009) (Victoria, Kanada: Canadian Social Economy Hub at the University of Victoria, 2009).

menggabungkan kegiatan ekonomi dan kepentingan sosial yang memberikan penekanan dan hak istimewa kepada pemenuhan kebutuhan sosial, dan bahkan dalam derajat lebih spesifik juga lingkungan yang menjadi *locus* dari kelangsungan hidup masyarakat, di atas kepentingan penumpukan keuntungan ekonomis-finansial.²⁸ Dalam cara kerjanya, anggitan ini menganalisis secara mendalam bagaimana perilaku seseorang (konsumen) dipengaruhi oleh bangunan dasar moral sosial, etika, dan prinsip-prinsip yang menempatkan kepentingan sosial (manusia) sebagai hulu dan hilir orientasi aktivitas ekonomi individu dan masyarakat.

Bagian integral dari kajian dan pembahasan yang dikembangkan anggitan ekonomi sosial ini adalah aktivitas individu dan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi di tengah kehidupan nyata mereka, termasuk yang dilakukan oleh individu dan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang perkhidmatan dan atau pengabdian masyarakat.²⁹ Hanya, dalam aktivitas ekonomi tersebut, tujuan sosialnya melampaui kepentingan ekonominya. Dengan ungkapan lain, terdapat prioritasasi atas tujuan yang disebut pertama daripada yang kedua,³⁰ walaupun ekonomi sosial itu sendiri bisa menciptakan pekerjaan (*jobs*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*).³¹ Salah

²⁸ Ash Amin, "Extraordinarily Ordinary: Working in the Social Economy," *Social Enterprise Journal*, Vol.5, No.1 (2009): hlm.30-31. doi:10.1108/17508610910956390.

²⁹ Lihat Jack Quarter, Laurie Mook, dan Ann Armstrong, *Understanding the Social Economy: A Canadian Perspective*, edisi ke-2 (Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2018), hlm. v;

³⁰ Laurie Mook, John R. Whitman, Jack Quarter, dan Ann Armstrong, *Understanding the Social Economy of the United States* (Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2015), hlm. 3; Ash Amin, "Locating the Social Economy," dalam Ash Amin (ed.), *The Social Economy: International Perspectives on Economic Solidarity* (London; New York: Zed Books, 2009), hlm. 4.

³¹ Ash Amin, Angus Cameron, dan Ray Hudson, *Placing the Social Economy* (London, New York: Routledge, 2002), hlm. vii.

satu cara yang lazim dimaksimalkan oleh anggitan Ekonomi Sosial adalah melalui pelibatan warga masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged community*) dalam produksi atau konsumsi barang dan jasa yang berguna secara sosial.³² Karena itu, dalam proses dan ujung aktivitas ekonomi dimaksud, ada kaitan erat antara ekonomi sosial dan pengembangan-pemberdayaan masyarakat (*community development*).³³

Untuk melengkapi diskusi mengenai bagaimana individu dan gugus sosial memenuhi kebutuhan materialnya terutama dalam aktivitas ekonomi, kata “sosial” dalam konteks pembahasan buku ini tidak selalu diletakkan melekat dengan, dan ditempatkan pada posisi setelah, kata “ekonomi” untuk menunjuk kepada pemaknaan seperti dijelaskan di atas, melainkan juga digunakan secara mandiri untuk menunjuk kepada praktik masyarakat dalam kehidupan konkret mereka, yang di antaranya juga menyentuh persoalan ekonomi. Menyusul karakter dasar konsep Ekonomi Sosial yang menempatkan kepentingan sosial di atas tujuan motif ekonomi seperti dijelaskan sebelumnya, maka beragam praktik sosial pada gugus masyarakat yang variatif menjadi menarik untuk dipahami dan dijelaskan lebih lanjut sebagai tambahan terhadap diskusi yang terkait dengan Ekonomi Sosial itu sendiri. Bahkan dalam derajat tertentu, pembahasan mengenai praktik sosial ini penting dilakukan secara lebih spesifik tanpa mengesampingkan sama sekali kaitan dan implikasinya pada aspek ekonomi dalam kehidupan mereka.

Penjelasan mengenai ekonomi dan sosial, baik dalam

³² Amin, “Extraordinarily Ordinary,” hlm. 31.

³³ Alan Kay, “Social Capital, the Social Economy and Community Development,” *Community Development Journal*, Vol. 41, No. 2 (2005): hlm. 160-173. doi:10.1093/cdj/bsi045; Juan-Luis Klein, “The Social Economy: A Springboard for Local Development Projects?” dalam Marie J. Bouchard (ed.), *Innovation and the Social Economy: The Quebec Experience* (Toronto: University of Toronto Press, 2017), hlm. 229-254.

posisi relasional (melekat) maupun nonrelasional (mandiri) di atas, semakin menemukan signifikansinya saat manusia dalam kenyataannya selama hidup tidak bisa lepas dari kebutuhan ekonomi, karena ekonomi merupakan bagian dari penghidupan (*mode of production*) yang juga akan mempengaruhi pola dan kegiatan konsumsi hidup mereka. Dalam pelaksanaan teknisnya, manusia harus berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya atau satu sama lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Itu karena proses produksi dan konsumsi yang dibutuhkan untuk melangsungkan hidup mereka tidak bisa dipenuhi kecuali dengan melakukan transaksi antar sesamanya. Oleh sebab itu, interaksi dan sosialisasi dengan sesamanya merupakan langkah mendasar yang harus dilakukan. Pada titik inilah, masing-masing dari mereka memerlukan hubungan yang baik di antara mereka, baik antar sesama individu maupun antara individu dan struktur yang lebih besar yang bernama masyarakat.

Bahkan pada taraf yang lebih maju, masing-masing dari mereka akan selalu berusaha untuk menunjuk dan bahkan mencontoh kebaikan serta keunggulan satu sama lain. Selalu ada proses pertukaran pelajaran hidup satu sama lain. Perbandingan, penyetaraan, dan penyesuaian merupakan kosa kata kerja yang menandai usaha satu sama lain dalam rangka untuk melangsungkan proses pertukaran pelajaran hidup dimaksud. Proses ini terjadi hampir di semua individu dan atau struktur yang lebih besar yang bernama masyarakat di belahan dunia mana pun, dalam dan luar negeri Indonesia. Karena itulah, lalu aktivitas ekonomi dan praktik sosial itu sendiri yang terjadi pada seorang individu atau masyarakat akan selalu muncul sebagai eksperimentasi yang pada tahap selanjutnya melahirkan praktik tiru-modifikasi oleh yang lainnya. Pada titik inilah, eksperimentasi sosial ekonomi lintas

budaya sebagai gabungan dari aktivitas ekonomi dan praktik sosial menjadi perhatian penting bagi perkembangan dan kemajuan hidup individu dan masyarakat mana pun.

Sosiologi pada dasarnya memberikan perhatian pada hubungan antar individu dan antara individu dan struktur yang lebih besar yang bernama gugus sosial atau kelompok masyarakat. Karena itulah, Bagian Tiga dari buku ini menurunkan pembahasan mengenai ekspresi dan eksperimentasi sosial ekonomi dari individu dan atau gugus sosial yang terjadi di sejumlah wilayah, baik dalam maupun luar negeri—seperti ditemukan oleh penulis melalui serangkaian perjalanan akademik yang dilakukan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang selanjutnya disusun menjadi materi uraian dan analisis sebagaimana berikut ini:

- ❑ *Hubbul Wathon* di Negeri Zindabad
- ❑ Individualisme No, Kolektivisme Yes
- ❑ Madrasah Perdamaian
- ❑ Mengubah Dunia dari Coady
- ❑ Pembelajaran Kepemimpinan Sosial
- ❑ Indonesia, “Bahasa Kedua” di Saudi
- ❑ Seni Bertahan Hidup
- ❑ Makna Besar di Balik Aksi Kecil
- ❑ Berlatih Kesabaran
- ❑ Membangun Pemahaman, Merenda Masa Depan
- ❑ Bos Tionghoa yang Berjiwa Melayani
- ❑ Keluarga, Pilar Antiterorisme
- ❑ Simbol Kebersamaan Melawan Terorisme
- ❑ Sukses yang Berbuah Volunterisme
- ❑ Pengembangan Ekonomi Desa dengan Nilai Tambah
- ❑ Ekonomi Berbasis Masjid

Melalui pembacaan terhadap serangkaian materi eksperimentasi sosial ekonomi lintas budaya di atas, pembaca

difasilitasi oleh buku ini untuk bisa mengambil pelajaran dari setiap materi yang dibahas, sebagaimana platform akademik awal yang menjadi perhatian besar buku ini: “Setiap Kejadian adalah Pelajaran”. Detail pembahasan untuk masing-masing dari materi eksperimentasi sosial ekonomi lintas budaya dimaksud bisa dijumpai pada lembar uraian selanjutnya, seperti tampak pada halaman-halaman berikut, sesuai dengan urutannya.

Hubbul Wathon di Negeri Zindabad

Patriotisme itu tidak berada di ruang kosong. Ia selalu bergerak seiring dengan ikhtiar penduduk negeri. Karena itu, dibutuhkan desain dan kerja keras untuk menanamkan dan menguatkannya di internal penduduk negeri itu. Kuat atau lemahnya patriotism hanyalah buah semata dari tingkat keseriusan desan dna kerja keras itu. Pengalaman Pakistan penting menjadi pelajaran. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan selama seminggu (13-19 Agustus 2018) ke Islamabad, ibukota Pakistan, dalam rangka menghadiri konferensi internasional bertajuk The Zhenghe Peace International Forum ke-IV oleh The Center of Excellence for China-Pakistan Economic Corridor (CPEC; Pakistan), Department of Media and Communication Studies at International Islamic University (Islamabad, Pakistan), dan Zhenghe International Peace Foundation (ZIPF). Pada bagian ini, catatan perjalanan mengilustrasikan bagaimana pengalaman negeri Pakistan menanamkan dan memperkuat nilai patriotisme di kalangan warganya di tengah situasi dan kondisi geopolitik negeri itu yang berada di lintasan negara-negara berlatar belakang sosial-politik yang beragam.

Malam itu seharusnya sudah sunyi. Jam sudah menunjuk ke angka 23:35, pertanda suasana mulai sepi. Aktivitas sudah sangat menurun dan mulai berhenti. Mata yang *low bat* mulai menghampiri. Aktivitas harian sudah menjelang untuk diakhiri. Saatnya tubuh berbaring menikmati. Menunaikan haknya yang terpakai dalam sehari. Untuk istirahat setelah seharian bekerja mencari rizki. Atau belajar untuk kemajuan diri. Atau menjalani tugas rumah tangga yang ditunggu. Atau bahkan kemasyarakatan yang selalu didampingi.

Itulah saat kuinjakkan kaki di kota Islamabad. Di jelang pergantian hari. Di penghujung tanggal 13 Agustus 2018. Aku tiba setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Berangkat dari Bandara Juanda Surabaya jam 6:15 pagi. Lalu sampai di Islamabad di penghujung hari. Kutempuh

perjalanan dari Surabaya ke Jakarta terlebih dahulu. Pesawat lalu menerbangkanku lagi dari Jakarta ke Bangkok. Setelah transit beberapa jam, pesawat membawaku terbang kembali menuju ibukota Pakistan itu.

Sesampai di Islamabad dan meninggalkan bandara internasional di ibu kota negara Islam itu, kurasakan kesunyian malam itu. Begitu heningnya. Pertanda normal hari sudah sangat larut malam. Akupun memastikan kembali waktu seperti yang ditunjuk oleh angka waktu gadgetku. Ya betul, waktu sudah semakin mendekati angka 24:00.

Kutinggalkan bandara internasional Islamabad menuju hotel tempat menginapku di tengah kota. Dan kudapati keindahan kota Islamabad malam itu seakan sempurna dengan tata kota yang keren dan cenderung modern. Pemandangan kota tampak rapi nan cantik. Hasil tata letak yang sangat apik. Sungguh sangat menawan malam yang saat itu kunanti.

Kesan sekejapku begitu mobil bergerak ke tengah kota Islamabad, akupun berujar ke teman-teman rombongan: “Islamabad ini tampak mirip dengan kota Canberra, Australia. Tertata rapi. *Highway* dan jalanan yang lebih kecil terdesain rapi. Lebar jalan hingga desain rumah tinggal dan perkantoran cenderung sama dengan yang ada di Canberra. Kota ini sungguh elok sekali. Sangat *well-planned!*” Begitu kesanku pada Islamabad sesaat setelah memasukinya malam itu.

Begitu menjelang masuk kota, bukan sunyi yang kudapat. Bukan heningnya kota yang kurasakan. Bukan tenang dan lengangnya jalanan yang kulewati. Seperti yang kudapati begitu meninggalkan bandara internasional Islamabad menuju kota. Alih-alih, macet di mana-mana. Lurus jalanan ke tengah kota makin macet total. Belok kiri awalnya lancar. Tapi di ujung macet pula. Belok kanan dan atau berbalik juga kami lakukan. Tapi tetap kudapati macet yang makin lama makin

memuncak di mana-mana.

Pergantian malam dari tanggal 13 ke 14 Agustus 2018 di kota Islamabad itu berlalu dengan begitu gegap gempita. Persis seperti pergantian malam tahun baru di banyak tempat. Termasuk di Indonesia. Tua muda turun ke jalan. Bak buah-buahan yang terjatuh dari kendaraan dan tumpah ruah memenuhi jalanan, mereka memadati hampir setiap sudut jalanan di tengah kota Islamabad itu. Ada yang berdiri dan melongokkan tubuh mereka lewat jendela mobil yang ditumpangi. Ada yang menggunakan mobil bak terbuka. Ada pula yang menggunakan angkot lokal. Dan bahkan tidak sedikit yang menggunakan motor. Mereka menggeber gas kencang-kencang.

Mereka membawa serta bendera Pakistan. Bendera yang didominasi warna hijau dan putih. Dengan ada bulan sabit dan bintang di bagian tengahnya. Mereka tampak begitu hormat dan bangga dengan bendera kesayangan negeri itu. Mereka tempatkan bendera-bendera itu di bagian depan dan atau belakang mobil. Bahkan di motor sekalipun. Mereka kibarkan bendera-bendera itu. Mereka geber bendera berukuran besar dan kecil. Mereka memenuhi jalanan malam itu.

Muncul pertanyaan di benakku malam itu: Apakah yang sedang terjadi di Islamabad hingga tua muda turun ke jalan seramai itu? Adakah itu efek naiknya Imrah Khan sebagai perdana menteri terpilih beberapa hari sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelayut dalam benakku. Karena Pakistan baru saja menyelenggarakan Pemilu. Tepatnya tanggal 25 Juli 2018. Dan partai Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) yang dipimpin Imran Khan memenangi kursi parlemen. Dia pun sebagai pimpinan tertinggi partai akhirnya terpilih menjadi perdana menteri.

Rupanya memang ada nuansa itu. Ada nuansa

menyambut kemenangan Imran Khan sebagai perdana menteri. Karena bagi sebagian kelompok, Imran Khan adalah simbol perubahan di negeri itu. Apalagi, dengan latar belakang yang belum pernah menjadi pejabat elit, Imran Khan dianggap menjanjikan perubahan bagi negeri itu.

Tapi, melihat gairah yang besar malam itu di ibu kota Pakistan, pertanyaanku masih menyisakan ruang bagi munculnya jawaban lebih lanjut. Aku masih penasaran, ada apa gerangan dengan besarnya massa di jalanan malam itu? ini pasti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar terpilihnya Imran Khan sebagai perdana menteri. Begitu bisikku ke telingaku malam itu.

Dan akhirnya, semakin lama semakin kutemukan jawabannya. Lebih-lebih saat esok harinya tanggal 14 Agustus 2018. Kegembiraan dan keriangannya sangat terasa lebih besar di Islamabad. Mengapa? Kalau di pergantian malam 13 ke 14 Agustus, yang turun menyesaki jalanan hanya kaum laki-laki. Di siang hari tanggal 14 Agustus 2018, para kaum hawa pun juga keluar rumah. Pusat-pusat keramaian seperti mal dan pertokoan ramai sekali. Tidak saja oleh kaum lelaki, tapi juga kaum hawa. Suatu pemandangan yang tidak kusaksikan di malam sebelumnya pada pergantian tanggal 13 ke 14 Agustus.

Yang menarik, para kaum hawa di Islamabad itu tidak hanya menempatkan bendera di mobil yang mereka tumpangi bersama suami atau keluarganya. Melainkan, mereka juga mengenakan busana yang bermotif bendera Pakistan. Atau busana yang warnanya mengeksploitasi perpaduan hijau dan putih. Persis seperti warna bendera Pakistan.

Di jalanan pun, warga masyarakat pun masih menunjukkan riang gembiranya. Motor dan mobil berbendera Pakistan hijau putih berseliweran di jalanan. Tidak hanya bendera kecil yang menempel di kaca spion kendaraan seperi

yang banyak kita temui di negeri seperti Indonesia. Melainkan juga kain bendera besar yang dikibarkan di belakang kendaraan.



Foto: Pemuda dengan motor berbendera Pakistan³⁴

Bahkan, sangat banyak dijumpai kap mobil yang ditutup utuh dengan bendera besar Pakistan. Itu terutama pada mobil-mobil pribadi level “kelas menengah” ke bawah seperti Toyota Altis hingga sedan Ford era 80an. Untuk kendaraan taxi, baik yang berbasis aplikasi seperti uber maupun angkot, bendera-bendera Pakistan itu dipasang di bagian belakang mobil. Atau diikatkan di kaca spion. Pada mobil-mobil mewah seperti Land Cruiser atau level di bawahnya yang lagi *booming* di Islamabad, yaitu Honda Civic sport *hatchback*, bendera-bendera itu diikatkan di kaca spion.

³⁴ Sumber: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.arabnews.pk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2018%2F08%2F13%2F1281891-1673605484.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.arabnews.pk%2Fnode%2F1355801%2Fworld&tbnid=e5K6LBK3HhrMEM&vet=12ahUKEwi4_cWv3MH3AhWOjtgFHXi5CK4QMyhJegQIARB4..i&docid=ouO5oOv09GQFzM&cw=1388&ch=817&q=nationla%20flag%20of%20pakistan%20in%20bikes&ved=2ahUKEwi4_cWv3MH3AhWOjtgFHXi5CK4QMyhJegQIARB4
(Diakses 19 Agustus 2018)

Di hari kemerdekaan itu, mayoritas toko dan layanan publik tutup. Kecuali tempat keramaian umum seperti The Centaurus. Mal terbesar di ibukota Pakistan itu. Warga di banyak tempat banyak menggunakan pakaian bermotif bendera Pakistan. Laki perempuan melakukan itu. Ruang publik riuh dengan ekspresi kegembiraan seperti melalui spanduk, poster, kaos dan baliho bermotif bendera Pakistan.



Foto penulis (kedua depan kanan) berserta rombongan di Mal The Centaurus Islamabad

Bahkan, di ujung-ujung jalan sekalipun. Terpasang baliho berwarna hijau dan putih bertuliskan *efforts for a greener Pakistan*. Upaya membuat Pakistan lebih hijau. Begitu arti harfiahnya. Saya menangkap kuat tingginya rasa cinta warga masyarakat Islamabad terhadap negaranya. Dan pemerintah negeri itu pun tahu bagaimana menjaga nilai patriotisme rakyatnya kepada negerinya. Kampanye *efforts for a greener Pakistan* bisa ditemui di banyak tempat umum. Tidak saja *indoor*. Tapi juga *outdoor*.

menentukan pelebagaan moral kebangsaan dan kenegaraan di negeri itu. Bertemunya janji suci kebangsaan yang ditanamkan dari dini di sekolah dengan kebanggaan dalam identitas kultural lokal memang menjadi faktor internal yang memperkuat pelebagaan moral kebangsaan dan kenegaraan negeri itu. Faktor internal itu seakan disempurnakan dengan faktor eksternal berupa posisi geopolitik negeri itu.

Pakistan merupakan negara yang berbatasan dengan Afghanistan dan Iran di bagian barat. Ada India di bagian timur. Dan Tiongkok di arah timur laut. Artinya, Pakistan dikelilingi negara-negara yang memiliki potensi konflik dan ancaman besar baginya. Ada Iran yang berideologi berbeda dengannya. Yakni Syiah. Ada Afghanistan yang memiliki rekam jejak panjang konflik etnis dan keagamaan. Ada Tiongkok yang berideologi komunis dengan kekuatan ekonomi yang gigantik. Ada India yang pernah membuat Pakistan memerdekakan diri karena perbedaan identitas dasar, terutama agama.

Jadi, Pakistan terletak di kawasan yang sangat strategis di antara daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Tidak ada cara lain untuk berdaya kecuali kohesi internal yang harus kuat. Memang konflik tak juga absen di internal negeri itu. Bahkan, penyelesaiannya pun tak jarang dirupakan dalam bentuk bom bunuh diri. Atau pembunuhan lainnya. Tapi negeri itu bergerak dengan kekuatan militer yang besar nan berpengaruh sekali. Dinamika sosial politik dan bahkan ekonomi pun tak pernah lepas dari kekuatan militer. Itu sebagai respon terhadap tantangan geopolitik di atas.

Nah, pendidikan moral kebangsaan dan kenegaraan di Pakistan tampak ditempatkan dalam konteks geopolitik yang menekankan kohesi dan soliditas internal bangsa dan negara itu. Karena itu, ada kebutuhan riil atas militer yang sangat kuat. Kekuasaan politik di negeri itu tak bisa bergerak tanpa “restu”

dan “sentuhan langit” kekuatan militer. Transisi kepemimpinan dalam sejarah panjang Pakistan hampir selalu bersentuhan dengan “restu” dan “sentuhan langit” militer dimaksud.

Pakistan juga dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan nuklir terbaik di dunia. Di negeri itu, pengembangan nuklir menjadi program nasional yang diandalkan. Itu dilakukan di antaranya untuk menunjang penciptaan militer yang kuat. Juga untuk menjamin pertahanan dan keamanan yang mapan. Tanpa itu, negeri itu tampak berada dalam tekanan besar dari negeri-negeri sekitarnya. Selain itu, pengembangan nuklir juga dimaksudkan untuk menunjang pengembangan teknologi yang juga menjadi prioritas negeri itu.

Tapi, geopolitik dan potensi dasar negeri itu tak akan mampu membangkitkan nasionalisme yang kuat jika nasionalisme itu tidak mengalami pelembagaan yang bagus. Di situlah kutemukan pendidikan menjadi faktor kontributif yang penting. Melalui pendidikanlah, gerakan kebangkitan patriotisme warga bangsa itu mengalami masifikasi.

Di jalur itulah, *hubbul wathon* ditumbuhkan dengan apiknya. Cinta tanah air dikembangkan dengan cantiknya. Dan nilai patriotik disemai dengan suburnya. Karena itu, *hubbul wathon* atau cinta tanah air atau nilai patriotik tidak akan bisa ditanamkan secara kuat jika tidak ada kebijakan yang serius dalam pengembangannya. Dunia pendidikan menjadi instrumen strategis. Banyaknya tantangan dan ancaman eksternal bisa dijawab dengan kohesi yang kuat nan patriotik. Yang melahirkan *hubbul wathon* yang kokoh.

Pada titik ini, aku mulai gelisah saat menengok ke negeri sendiri. Kalimat *Allahu Akbar!* yang dulu di zaman perjuangan diteriakkan para leluhur dan tokoh negeri ini, seperti Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy'ari, sebagai teriakan patriotik untuk mempertahankan negara dari kekuatan

kolonial mulai digeser oleh sejumlah kelompok. Bahkan “diselewengkan”. Para tokoh negeri zaman dulu menjadikan semangat gabungan antara diktum agama dan kebangsaan untuk menciptakan patriotisme yang tinggi untuk negeri. Tapi, kini diktum agama dan kebangsaan oleh sebagian kecil kelompok justru ditempatkan pada posisi berhadapan. Bukan saling melengkapi, tapi saling bertentangan.

Maka tidak heran jika belakangan di negeri sendiri ini muncul sejumlah kasus yang mempertentangkan agama dan kebangsaan. Kalimat *Allahu Akbar!* diteriakkan oleh sejumlah orang bukan untuk memperkuat nilai patriotik kebangsaan. Melainkan dipakai untuk memperkuat politik identitas atas selainnya. Di antaranya, kalimat itu diteriakkan untuk mempertajam perbedaan berbasis agama. Lalu, bangunan kebangsaan terpaksa harus babak belur sebagai akibatnya.

Negara Republik Islam Pakistan, seperti yang kutangkap dalam pengalaman tinggal yang singkat di Islamabad, mengajarku bagaimana menyelenggarakan dan merawat patriotisme warga bangsa kepada negaranya. Penanaman cinta tanah air atau *hubbul wathon* harus dari dini. Harus melalui instrumen pendidikan yang terstruktur, sistemik dan masif.

Di era revolusi industri 4:0, pendidikan harus mampu menerjemahkan konsep *good citizen* (warga negara yang baik) secara khusus menjadi *good netizen* (warga maya yang baik). Sebab, di era itu, perubahan begitu supercepat. Informasi mengalami *booming* yang luar bisa. Bahkan tanpa ada proses pengaturan yang terkontrol. Di situasi itu, proses konsumsi dan produksi gagasan tak lagi mengandalkan kehadiran diri (*in person*). Proses itu sudah berpindah melalui dunia maya. Nah pendidikan harus hadir untuk menciptakan *al-muwathin al-shalih* atau warga negara yang baik di tengah berbagai keragaman yang ada di internal bangsa dan negeri itu.

Individualisme No, Kolektivisme Yes

Kesadaran atas kemandirian menjadi kunci penting bagi berdayanya masyarakat. Dengan kemandirian yang tinggi, hampir semua masalah hidup terselesaikan. Oleh dirinya. Secara mandiri. Bukan bergantung pada yang lain. Termasuk pada pemerintah. Sebaliknya, tanpa kemandirian, sebesar apapun intervensi yang dilakukan pemerintah tak akan mampu membuat warga masyarakat beranjak ke pengelolaan diri yang selesai. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan yang bertajuk *exposure visit* ke sejumlah instansi pemerintahan dan sejumlah komunitas, baik di perkotaan maupun pedesaan, di Kanada dari tanggal 11 Mei hingga 4 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan *project* penguatan kepemimpinan lokal untuk pembangunan di Indonesia (*Supporting Islamic Leadership/SILE*) hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) atau yang dalam perkembangan berikutnya dikenal juga dengan Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD). Pada bagian ini, catatan perjalanan menguraikan tentang tingginya kemandirian masyarakat yang disempurnakan dengan semangat kolektivisme yang mengikat kebersamaan mereka secara kuat ke dalamnya. Dibangunnya, dikelolanya, dan dirawatnya banyak fasilitas kebutuhan bersama oleh warga masyarakat sendiri dan bukan oleh negara menjadi salah satu temuan menarik yang ingin penulis gambarkan melalui catatan ini.



Foto Area Pelabuhan di daerah Canso, Nova Scotia, Kanada (diambil dari pinggir pelabuhan)

Kita sangat sering mendengar, Barat itu individualis, dan Timur itu komunal. Atau dengan bahasa lain, orang Barat itu mementingkan diri sendiri, sedangkan orang Timur itu selalu berpikir untuk kepentingan orang banyak. Benarkah penilaian semacam ini? Validkah pandangan seperti itu? Bagaimanakah sebenarnya yang terjadi?

Kita tampak terlalu gegabah selama ini dalam memberikan penilaian terhadap budaya dan peradaban lain, utamanya Barat. Kita terlalu dangkal dalam memahami budaya dan peradaban Barat. Bahasa akademiknya, terlalu *sweeping argument*, asal sapu sana sapu sini dalam menilai. Bahkan, penilaian itu telah menjadi *mainstream* (arus utama) dari pandangan kita terhadap orang Barat. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan sekalipun. Karena, tidak sedikit pernyataan muncul dalam dunia akademik dengan menyebut individualisme sebagai karakter kuat orang Barat.

Penilaian, pandangan, dan pemahaman yang bias etnosentris seperti di atas tidak saya temukan saat kaki saya melangkah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Kanada lebih jauh. Saya berkesempatan untuk melihat secara lebih dekat kehidupan masyarakat yang tinggal di sebuah daerah yang lebih dikenal dengan nama Komunitas Canso (*Canso Community*), Distrik Guysborough, melalui *field visit* pada tanggal 28 Mei 2012. Kota ini disebut sebagai kota pelabuhan (*harbour town*), dan menjadi salah satu daerah penghasil produk perikanan terbesar di Provinsi Nova Scotia, Kanada.

Secara historis, daerah Canso sendiri telah menjadi basis perikanan strategis sejak abad 16. Pelabuhan Canso sering dikunjungi oleh pedagang bulu dan nelayan Eropa dalam belasan tahun sejak kedatangan Columbus di Amerika. Kota ini penting dan bersejarah karena merupakan salah satu dari hanya dua permukiman Inggris di Nova Scotia sebelum

pembentukan kota Halifax tahun 1749.

Lalu, di manakah letak gegabahnya pemahaman dan pandangan yang memberikan penilaian individualistik kepada orang Barat di atas? Di daerah Canso yang saya kunjungi, banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh warga justeru dibangun dan diselenggarakan, bahkan dirawat, oleh anggota masyarakat itu sendiri. Bukan oleh negara.

Inisiatif, perencanaan, hingga pelaksanaan pembangunan, bahkan operasionalisasinya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Penting untuk dicatat, semua tahapan dari proses ini tidak melibatkan campur tangan negara, sebagaimana yang jamak kita temukan di Indonesia. Bahkan, saat pemerintah daerah menyatakan tidak memiliki anggaran untuk pembangunan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat saat itu, warga masyarakat justeru tampil dengan menyediakan modal pembiayaan sendiri melalui model swadaya.

Sebut saja fasilitas-fasilitas penting seperti perpustakaan, museum, hingga pasar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Perpustakaan, misalnya, murni diinisiasi, dibangun, dikelola, dan dibiayai oleh hasil urunan warga masyarakat setempat. Pembangunan perpustakaan yang murni oleh warga masyarakat ini dilakukan setelah pemerintah lokal memberikan jawaban tentang tidak adanya anggaran untuk itu.

Atas kondisi ini, warga berkumpul untuk mewujudkan fasilitas perpustakaan dimaksud. Fasilitas layanan dan manajemennya pun dibuat modern. Semua serba *computerised*. Koleksinya tersedia baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Tidak hanya buku, melainkan juga majalah hingga video. Bahkan, layanan akses internet pun bisa diperoleh dengan gratis dengan tingkat kecepatan yang sangat tinggi.

Keberadaan perpustakaan dengan layanan seperti di atas sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat setempat untuk menunjang pencapaian pendidikan yang maksimal. Karena alasan ini, mereka terpanggil untuk terciptanya perpustakaan dimaksud. Maka selanjutnya, tidak hanya pikiran dan tenaga yang mereka keluarkan, namun juga biaya.

Model pembangunan seperti inilah yang kini lebih dikenal dengan istilah pembangunan yang dikerahkan oleh masyarakat sendiri (*community-driven development*). Model pembangunan seperti ini memiliki arti penting untuk mengantarkan kehidupan masyarakat kepada derajat yang lebih baik dan mapan dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Peralnya, negara dan atau pemerintah memiliki sejumlah keterbatasan dalam memenuhi setiap kebutuhan warganya. Keterbatasan itulah yang menyebabkan dibuatnya skala prioritas atas dasar kebutuhan dan kemampuan.

Selanjutnya, untuk memperkuat *community-driven development* tersebut, warga masyarakat daerah Canso mendirikan puluhan asosiasi atau perhimpunan. Baik berdasarkan kepentingan ekonomi, keahlian, sosial, agama hingga ketertarikan pada seni. Lions Club merupakan salah satu yang tergolong besar dalam hal ini. Di luar itu, ada perhimpunan masyarakat untuk pengembangan wilayah (*area development association*), kelompok baca (*reading group*), perhimpunan kesehatan dan pemuda (*youth and health association*), dan asosiasi nelayan (*fishermen association*). Semua contoh asosiasi itu dibentuk, dibiayai, dan dikelola oleh masyarakat sendiri yang menjadi anggotanya. Kepentingannya untuk pemberdayaan internal masyarakat sendiri.

Lebih dari itu, di bidang ekonomi lebih luas, warga komunitas Canso membentuk sejumlah koperasi. Di antaranya, koperasi untuk penampungan dan pemasaran ikan. Bahkan,

dari koperasi ini, mereka berhasil mendirikan *food market* (pasar makanan) untuk kebutuhan sehari-hari warga yang tinggal di daerah Canso. Pasar itu didirikan dan dijalankan oleh, dari, dan untuk kemajuan warga masyarakat setempat. Jika ada keuntungan, maka keuntungan itu juga kembali untuk kemajuan hidup masyarakat setempat.

Ada dua pelajaran penting yang bisa ditarik dari kisah masyarakat di daerah Canso di atas. Pelajaran *pertama*, kita perlu menumbuhkan kemandirian warga masyarakat untuk mengembangkan diri dan daerahnya masing-masing secara swadaya. Kita perlu belajar dari pengalaman komunitas Canso di atas bahwa dengan usaha mandiri, maka masyarakat tidak bergantung kepada negara, apalagi bantuan asing.

Kebijakan-kebijakan seperti bantuan langsung tunai (BLT) masih bisa ditoleransi dalam dan untuk jangka waktu yang sangat singkat. Toleransi itu dimungkinkan untuk memperkuat ketahanan hidup anggota masyarakat miskin yang sedang rentan. Namun, jika dilakukan berkepanjangan, skema bantuan itu dikhawatirkan memunculkan dampak negatif. Pasalnya, alih-alih membuat warga bertahan hidup untuk lebih baik, pola pemberian bantuan langsung tunai akan dapat menyebabkan warga masyarakat menjadi serba menggantungkan diri kepada pemerintah.

Akibatnya, mereka tak akan segera mandiri, atau bahkan tidak akan pernah mandiri. Usaha hidup digantungkan hanya pada pemberian pemerintah. Kondisi semacam ini yang dikhawatirkan justru akan menjadikan masyarakat tidak mampu untuk keluar dari jebakan ketergantungan pada bantuan pihak lain. Jika kondisi ini menjangkiti masyarakat dalam jumlah yang banyak, maka bisa dibayangkan bahwa sebagai sebuah kumpulan individu mereka bisa saja akan *collapse*. Sebab, mental mereka sudah jatuh. Dan, sudah tak ada

lagi kemampuan untuk bertahan di atas kemampuan sendiri. Jika itu yang berlangsung, maka justru masyarakat akan menjadi beban bagi dirinya sendiri.

Pelajaran *kedua*, pentingnya memperkuat model-model asosiasi di lingkungan masyarakat kita. Kemauan dan kemampuan untuk membentuk asosiasi menandakan kehendak untuk menjaga kolektivisme pada satu sisi, dan menurunkan ego dan kepentingan pribadi pada sisi lain. Ujungnya, pembentukan asosiasi itu akan membantu menyelesaikan problem internal kehidupan bersama.

Banyak problem sosial dalam kehidupan kita yang muncul karena tidak adanya kebersamaan pada satu, dan tingginya kemauan untuk memenuhi kebutuhan pribadi pada sisi lain. Sehingga yang muncul, orang berebut berpikir untuk kepentingannya sendiri daripada kebajikan bersama. Bila ini yang terjadi, maka kehidupan kewargaan (*civic life*) akan segera terpinggirkan, dan segera tergantikan oleh kehidupan rimba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penilaian dan pandangan kita terhadap Barat memang selayaknya tak lagi bias etnosentris. Namun yang tak kalah pentingnya juga, penguatan semangat kolektivisme juga harus diperkuat di internal masyarakat kita sendiri. Pengembangan koperasi, baik berdasarkan kelompok sosial maupun profesi, adalah salah satu contoh menarik yang bisa dilakukan. Ketidakmauan bekerja bersama awal dari individualisme yang segera berbuah pahit.

Madrasah Perdamaian

Pendidikan adalah ruh peradaban. Keberadaanya tidak hanya dalam kepentingan untuk mendewasakan anak manusia. Tapi juga bisa membantu secara nyata untuk menyelesaikan problem kemasyarakatan. Berikut adalah catatan akademik penulis atas perjalanan ke Kota Davao, Filipina, pada tanggal 14 Mei hingga 1 Juni 2012 dalam rangka mengikuti kursus pendek (*short course*) *Mindanao Peacebuilding Institute/MPI 2012 Annual Peacebuilding Training* (Pelatihan Pembangunan Perdamaian Tahunan MPI 2012) dengan tajuk “*Restoring Justice, Building Peace*” (Memperbaiki Keadilan, Membangun Perdamaian). Catatan perjalanan pada bagian ini mengilustrasikan praktik kebijakan *peace education through madrasah* (pendidikan perdamaian melalui madrasah) yang ada di tengah masyarakat Kota Davao. Begitu kuatnya keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dihadirkan untuk membantu menyelesaikan problem konflik dan perdamaian yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat di sana.



Foto Menara Masjid di Area Muslim di Kota Davao, Filipina (diambil dari sisi jalan raya)

Filipina merupakan sebuah negara yang narasi besar kenegaraan dan bangunan sosio-kulturalnya banyak digerakkan oleh nilai-nilai Kristiani. Islam memang ada di tengah-tengah denyut nadi masyarakatnya. Namun, ia dipeluk hanya oleh

minoritas penduduk.

Dari jumlah yang minoritas itu, konsentrasi besarnya berada pada kawasan kepulauan yang lebih dikenal dengan Mindanao. Konon, nama “Mindanao” itu dimunculkan sebagai identitas simbolik untuk membedakan diri dari kawasan dan tempat hunian kelompok sosial yang lain. Disebut-sebut, kata itu konon berasal dari Bahasa Arab *min ‘indina*. Artinya, “dari kelompok kami (kita)”. Kata itu dipakai untuk menandai politik identitas kelompok. Lalu, dalam proses berikutnya, kata itu berubah mengikuti pelafalan masyarakat setempat hingga menjadi kata *Mindanao*.

Salah satu daerah penting di kawasan Mindanao adalah Kota Davao. Meskipun secara demografis jumlah Muslim di dalamnya masih tergolong minoritas dibanding pemeluk Kristen, Kota Davao tetap memberikan pelajaran menarik dalam konteks pembangunan masyarakat yang multikultural dan multiagama namun penuh kedamaian.

Upaya pembangunan masyarakat dengan karakteristik seperti itu di antaranya dilakukan dalam kerangka pembangunan bangsa secara lebih besar. Dalam kaitan ini, Kota Davao, Mindanao, memberikan pelajaran menarik betapa madrasah diletakkan dalam posisi penting bagi pembangunan dan penciptaan peradaban baru sebuah bangsa. Madrasah tidak saja sebagai model pelembagaan nilai oleh dan demi kepentingan masyarakat Muslim. Madrasah kini diakui memiliki arti penting bagi kemajuan masyarakat Filipina, khususnya Mindanao.

Salah satu prasyarat kemajuan sebuah masyarakat dan bangsa adalah terciptanya tatanan sosial yang penuh kedamaian, ketenangan, dan stabilitas. Kondisi ini dibutuhkan untuk mempercepat upaya penguatan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa itu. Pemenuhan

atas prasyarat ini segera akan menggerakkan masyarakat dan bangsa itu membangun peradabannya yang maju.

Masyarakat Mindanao menyadari betul arti penting dari pemenuhan prasyarat dimaksud. Karena itu, upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan perdamaian dan ketenangan di tengah-tengah kehidupan mereka dipandang sangatlah penting bagi kemajuan kehidupan dan peradaban mereka sendiri.

Maka, setiap ikhtiar positif menuju pemenuhan prasyarat di atas tak pernah luput dari perhatian publik. Bentuknya mulai dari pemanfaatan forum-forum publik hingga proses pelembagaan yang sistemik. Tentu, prinsip kebersinambungan dan kelanggengan (*sustainability*) sangat diperhatikan. Dan, pendidikan menjadi medium pelembagaan sistemik dimaksud dengan nilai efektifitasnya yang tidak diragukan.

Yang menarik, ikhtiar melalui jalur pendidikan itu tidak saja dilakukan melalui model pendidikan formal secara umum, baik yang diikuti oleh peserta didik secara kebanyakan maupun yang juga diikuti oleh peserta didik berlatarbelakang Muslim. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang khas didesain dan diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat Muslim secara khusus mendapatkan perhatian khusus pula oleh publik secara umum dalam kaitan ini. Kepentingan publik umum atas madrasah tidak saja untuk masyarakat Muslim semata, melainkan untuk publik secara keseluruhan.

Program *peace education through madrasah* (pendidikan perdamaian melalui madrasah) yang sejak hampir dua dekade sebelumnya dicanangkan di Mindanao kala itu adalah salah satu contohnya. Program itu tidak saja diinisiasi oleh masyarakat Muslim sendiri. Masyarakat secara kebanyakan pun juga menaruh perhatian khusus terhadap program ini.

Dalam kunjungan saya ke kantor Catholic Relief

Services (CRS) di Kota Davao, Mindanao (14/11/2012), kesan itu sangat kuat sekali. Myla J. Leguro, manajer senior program penciptaan perdamaian CRS, menyatakan bahwa mulai tahun 2012, program *peace education through madrasah* itu juga menjadi program penting oleh sejumlah lembaga yang memberikan perhatian khusus pada penciptaan perdamaian untuk masyarakat Mindanao pada khususnya, dan Filipina pada umumnya.

CRS sendiri bahkan menjadikan program *peace education through madrasah* itu sebagai salah satu program unggulan mereka untuk memperkuat penciptaan perdamaian sejak setahun terakhir. Myla menyatakan: “Program pelibatan madrasah ini penting untuk menjaga kebersinambungan perdamaian di masyarakat.” Bahkan, menurutnya, “program itu merupakan sebuah proses baru, karena sebelumnya kerjasama hanya dilakukan dengan organisasi masyarakat sipil.”

Era baru penciptaan perdamaian telah dimulai dengan ditandai oleh pelibatan madrasah sebagai sebuah agensi dan sekaligus medium pembangunan perdamaian sosial. Proses yang dilakukan mulai dari review kurikulum dan materi pembelajaran madrasah, kerjasama secara erat dengan para guru/ustadz-ustadzah di dalamnya, hingga memasukkan materi tentang pendidikan perdamaian ke dalam proses pembelajaran.

Tentu, ikhtiar dengan melibatkan madrasah di atas dilakukan dengan sejumlah pertimbangan dan persiapan yang matang. Review kurikulum dan materi ajar dilakukan agar pelembagaan nilai perdamaian melalui madrasah berjalan terarah. Guru dilibatkan secara aktif dengan dasar bahwa mereka menjadi titik penentu keberhasilan pendidikan. Maka, pendidikan perdamaian secara khusus harus memperhatikan hal dimaksud.

Melihat fenomena pelibatan aktif madrasah dalam

ikhtiar penciptaan perdamaian di atas, analisis kebijakan pendidikan selanjutnya tidak berhenti pada perspektif relasional antara pendidikan dan ekonomi, pendidikan dan indeks pembangunan manusia, serta pendidikan dan ideologi agama, sebagaimana yang jamak ditemui di sejumlah literatur. Analisis akademik sudah harus digerakkan dengan memperlebar perspektif sosial politik dengan secara khusus memberikan perhatian, di antaranya, pada kaitan antara pendidikan dan perdamaian.

Lebih dari itu, madrasah di kawasan Mindanao menjadi contoh bagaimana lembaga pendidikan Islam di sebuah gugusan dan kelompok masyarakat yang mayoritasnya non-Muslim berkontribusi positif dan aktif terhadap upaya penciptaan perdamaian sosial. Maka, ada dua makna penting yang selanjutnya diambil oleh pemerhati dunia pendidikan Islam pada khususnya, dan masyarakat Muslim pada umumnya.

Pertama, lembaga-lembaga pendidikan Islam patut didorong untuk menjadi agensi atau pelaku aktif dari upaya penciptaan perdamaian sosial. Bentuknya, dengan mengaitkan proses penyelenggaraan pendidikannya secara lebih dekat dan kuat dengan kepentingan dan nilai perdamaian sosial itu sendiri. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, apalagi di negeri yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, perlu menjadi teladan bagi kuatnya kaitan antara pendidikan dan upaya penciptaan perdamaian dimaksud.

Sangat lacur jika lembaga pendidikan Islam justeru menjadi medium pelembagaan benih dan nilai perpecahan antar sesama. Alih-alih pemantik perdamaian dan ketenangan sosial, pendidikan Islam yang demikian justeru menjadi penyemai benih kebencian yang menjadi awal bagi tumbuhnya pertikaian kemanusiaan. Yang menguat di antara peserta didik, kemudian, adalah semangat dan cara berpikir yang menaruh

kecurigaan kepada yang lain secara lebih besar daripada nalar untuk hidup dengan penuh kedamaian. Tidak saja dengan kelompok lintas pemeluk agama, melainkan juga kelompok beda aliran di internal agama sendiri.

Kedua, kajian-kajian akademik selayaknya mulai memberikan perhatian lebih kepada analisis pendidikan perdamaian. Yakni, bagaimana pendidikan berkontribusi positif terhadap penciptaan perdamaian sosial. Untuk konteks Indonesia, konsep *madrasah perdamaian* layak menjadi subyek kajian. Besarnya jumlah madrasah semakin menambah kuatnya daya tarik akademik untuk menjadikan konsep *madrasah perdamaian* itu berdaya tarik tinggi di kajian pendidikan Islam di negeri ini.

Selama ini, kajian-kajian mengenai pendidikan madrasah lebih banyak dilakukan dengan menunjuk kepada signifikansi manajemen sarana-prasarana, manajemen kurikulum, dan politik pendidikan yang meletakkan madrasah ke dalam bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Keberadaan madrasah dalam kerangka spesifik penciptaan perdamaian cenderung terabaikan. Sehingga, data mengenai skala kontribusi, positif dan negatif, dari pendidikan madrasah terhadap upaya penciptaan perdamaian belum terungkap dan termaknai secara akademik dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

“Hidup” pada KBBI Online: <https://kbbi.web.id/hidup>
(Diakses 18 Oktober 2021).

“Kelola” pada KBBI Online: <https://kbbi.web.id/kelola>
(Diakses 28 Oktober 2021).

“Life” dalam kamus online Google: <https://www.google.com/search?q=life+means&oq=life+means&aqs=chrome..69i57j0i512l4j0i22i30l4j0i10i22i30.3613j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses 18 Oktober 2021).

al-Hazimi, Khalid bin Hamid. *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah*. al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia: Dar ‘Alam al-Kutub, 2000.

Alkanderi, Latefah. “Exploring Education in Islam: Al-Ghazali’s Model of the Mater-Pupil Relationship Applied to Educational Relationships within the Islamic Family.” Disertasi Tidak Dipublikasikan, College of Education, The Graduate School, The Pennsylvania State University, Amerika Serikat, Desember 2001.

Amin, Ash, Cameron, Angus, dan Hudson, Ray. *Placing the Social Economy*. London, New York: Routledge, 2002.

Amin, Ash. “Extraordinarily Ordinary: Working in the Social Economy.” *Social Enterprise Journal*, Vol. 5, No. 1

- (2009): hal.30-49. doi:10.1108/17508610910956390.
- Amin, Ash. "Locating the Social Economy." dalam Ash Amin (ed.). *The Social Economy: International Perspectives on Economic Solidarity*. London; New York: Zed Books, 2009. hal. 3-21.
- Antikainen, Ari, Houtsonen, Jarmo, Huotelin, Hannu, dan Kauppila, Juha. "In Search of the Meaning of Education: The Case of Finland." *Scandinavian Journal of Educational Research*, Vol. 39, No. 4 (1995): hal. 295-309. doi:10.1080/0031383950390402.
- Apple, Michael. W. "Power, Meaning and Identity: Critical Sociology of Education in the United States." *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 17, No. 2 (1996): hal. 125-144. doi:10.1080/0142569960170201.
- Atkins, Marc S., Hoagwood, Kimberly E., Kutash, Krista, dan Seidman, Edward. "Toward the Integration of Education and Mental Health in Schools." *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, Vol. 37, No. 1-2 (2010): hal. 40-47. doi:10.1007/s10488-010-0299-7.
- Azman, Azmil, et al. "Link and Match Policy in Vocational Education to Address the Problem of Unemployment." *International Journal of Multi Science*, Vol. 1, No. 6 (Oktober 2020): hal. 76-85.
- Baumeister, Roy F., dan Finkel, Eli J. *Advanced Social Psychology: The State of the Science*. Oxford dan New York: Oxford University Press, 2010.
- Berger, Peter L, dan Luckmann, Thomas. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

- New York, London, Auckland: Penguin Books, 1991.
- Bicchieri, Cristina. *The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms*. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 2006.
- Bier, William C., (ed.). *Alienation: Plight of Modern Man?*. New York: Fordham University Press, 1972.
- Billett, Stephen. *Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects*. Dordrecht; Heidelberg, London; New York: Springer, 2011.
- Bills, David B. *The Sociology of Education and Work*. Oxford, England: Blackwell Publishing, 2004.
- Blakemore, Kenneth, dan Cooksey, Brian. *A Sociology of Education for Africa*. London: Routledge, 2017.
- Carkhuff, Robert R. "Education and the Advancement of Civilization." *Education*, Vol. 106, Issue 3 (1986): hal. 241–249.
- Carr, David. "Philosophy and the Meaning of 'Education'." *Theory and Research in Education*, Vol. 1, No. 2 (2003): hal. 195–212. doi:10.1177/1477878503001002003.
- Carr, David. *Making Sense of Education: An Introduction to the Philosophy and Theory of Education and Teaching*. London: Routledge, 2003.
- Cunningham, Gord, dan Fiander, Kate. *By Their Own Hands: 200 Years of Building Community in St. Andrews, Nova Scotia*. Nova Scotia: Coady International Institute Publications, 2009.
- Davies, Scott, dan Guppy, Neil. *The Schooled Society: An Introduction to the Sociology of Education*. Edisi 2.

- Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
- Davies, Scott. "Leaps of Faith: Shifting Currents in Critical Sociology of Education." *American Journal of Sociology*, Vol. 100, No. 6 (May 1995): hal. 1448-1478.
- de Moor, Johannes C. (ed.). *Synchronic or Diachronic? A Debate on Method in Old Testament Exegesis*. Leiden; New York; Köln: E.J. Brill, 1995.
- de Souza, Marian, Francis, Leslie J., O'Higgins-Norman, James, dan Scott, Daniel G. *International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing*. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2009.
- de Souza, Marian. *Spirituality in Education in a Global, Pluralised World*. London: Routledge, 2015.
- Delamater, John (ed.). *Handbook of Social Psychology*. New York: Springer, 2006.
- Faris, Ibnu. *Mu'jam Maqayis al-Lughab*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Foucault, Michel. *The Archaeology of Knowledge*. London: Routledge, 2004.
- García, Luisa García. "The Basic Valency Orientation of Old English and The Causative *Ja*-Formation: A Synchronic and Diachronic Approach." *English Language and Linguistics*, (2019): hal. 1-25. doi:10.1017/s1360674318000345.

- Garner, Robert T. "Structural Functional Theory." dalam George Ritzer dan Chris Rojek (eds). *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd, 2019. hal. 1–4. doi:10.1002/9781405165518.wbeoss2.
- Gold, Martin, dan Douvan, Elizabeth. *A New Outline of Social Psychology*. Washington, D.C: American Psychological Association, 1997.
- Hallinan, Maureen T., (ed.). *Handbook of the Sociology of Education*. New York: Springer, 2000.
- Hammersley, Martyn. "From Ethnography to Theory: A Programme and Paradigm in the Sociology of Education." *Sociology*, Vol. 19, No. 2 (1985): hal. 244–259. doi:10.1177/0038038585019002007.
- Honganji, Higashi. *Butten Dōwa: Buddhist Stories for Children*, terj. Aiko Watanabe. Kyoto: Higashi Honganji Publication Department, 2000.
- Houser, Neil O. "Negotiating Dissonance and Safety for the Common Good: Social Education in the Elementary Classroom." *Theory & Research in Social Education*, vol. 24, no. 3, (1996): hal. 294–312. doi:10.1080/00933104.1996.10505780.
- Karatay, Halit. "Transfer of Values in the Turkish and Western Children's Literary Works: Character Education in Turkey." *Educational Research and Reviews*, vol. 6, no. 6 (Juni 2011): hal. 472-480.
- Kay, Alan. "Social Capital, the Social Economy and Community Development." *Community Development Journal*, Vol. 41, No. 2 (2005): hal. 160-173. doi:10.1093/cdj/bsi045

- Khawaja, Irfan. "Why They Hate Us: A Pedagogical Proposal." dalam Yvonne Raley dan Gerhard Preyer (ed.). *Philosophy of Education in the Era of Globalization*. New York; London: Routledge, 2010. hal. 91-109.
- Klein, Juan-Luis. "The Social Economy: A Springboard for Local Development Projects?" dalam Marie J. Bouchard (ed.). *Innovation and the Social Economy: The Quebec Experience*. Toronto: University of Toronto Press, 2017. hal. 229-254.
- Kraidy, Marwan M. *Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization*. Philadelphia: Temple University Press, 2005.
- Kuhn, Deanna. "The Application of Piaget's Theory of Cognitive Development to Education." *Harvard Educational Review*, Vol. 49, No. 3 (1979): hal. 340–360. doi:10.17763/haer.49.3.h70173113k.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. edisi revisi. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- Lee, Robert D. *Overcoming Tradition and Modernity: The Search for Islamic Authenticity*. Colorado: Westview Press, 1997.
- Martinek, Tom, dan Lee, Okseon. "From Community Gyms to Classrooms: A Framework for Values-Transfer in Schools." *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, vol. 83, no. 1 (Januari 2012): hal. 33–51. doi:10.1080/07303084.2012.1059870.
- Mezirow, Jack. "A Critical Theory of Adult Learning and Education." *Adult Education*, Vol. 32, No. 1 (1981):

hal. 3–24. doi:10.1177/074171368103200101.

- Millett, Stephan. “The State, the Soul, Virtue and Potential: Aristotle on Education.” dalam Charlene Tan dan Benjamin Wong (eds). *Philosophical Reflections for Educators*. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2008. hal. 21-30.
- Mook, Laurie, Whitman, John R., Quarter, Jack, dan Armstrong, Ann. *Understanding the Social Economy of the United States*. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2015.
- Moore, Rob, and Young, Michael. “Knowledge and the Curriculum in the Sociology of Education: Towards a Reconceptualisation.” *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 22, No. 4 (2001): hal. 445–461. doi:10.1080/01425690120094421.
- Mosse, G. *Nationalism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1985.
- Musgrave, P. W. *The Sociology of Education*. London: Routledge, 2017.
- Muzakki, Akh. “Dan Angin Itu Pun Kini Berhembus Ke Kanan: Fenomena Islamisme Kelas Menengah Muslim Indonesia (Kata Pengantar Buku).” dalam Rubaidi, *Kelas Menengah dan Gerakan Islamisme di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2021. hal xiii–xxxvii.
- Muzakki, Akh. “Otentisitas, Problem Dasar Islam.” dalam *Islam dan Politik Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Impulse, 2010. hal. 13-17.

- Nasr, Seyyed Hossein. *Islam and the Plight of Modern Man*. London; New York: Longman, 1975.
- Noble, Paul R. "Synchronic and Diachronic Approaches to Biblical Interpretation." *Literature and Theology*, Vol. 7, No. 2 (1993): hal. 130–48.
- Norman, Richard. *On Humanism*. London & New York: Routledge, 2004.
- Okely, Judith. *Own or Other Culture*. London & New York: Routledge, 1996.
- Parsons, Talcott. *The Present Status of "Structural-Functional" Theory in Sociology*. London: Routledge, 1975.
- Pinn, Anthony B. *Humanism: Essays on Race, Religion, and Cultural Production*. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury, 2015.
- Quarter, Jack, Mook, Laurie dan Armstrong, Ann. *Understanding the Social Economy: A Canadian Perspective*. edisi ke-2. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2018.
- Ritzer, George. *Sociology: A Multi-Paradigm Science*. Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1975.
- Salter, Liora, dan Wolfe, David A. *Managing Technology: Social Science Perspectives*. Toronto: Garamond Press, 1990.
- Sharp, Donald, Cole, Michael, dan Lave, Charles. "Education and Cognitive Development: The Evidence from Experimental Research." *Monographs of the Society for Research in Child Development*, vol. 44, no. 1-2 (1979): hal. 1-112. doi:10.2307/3181586.

- Sultana, Ronald G. "Transition Education, Student Contestation, and the Production of Meaning: Possibilities and Limitations of Resistance Theories." *British Journal of Sociology of Education*, vol. 10, no. 3 (1989): hal. 287-309.
- Tan, Charlene (ed.). *Philosophical Reflections for Educators*. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2008.
- Tan, Charlene. "Religious Education and Indoctrination."

- dalam Charlene Tan (ed.). *Philosophical Reflections for Educators*. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2008. hal. 183-192.
- Tremblay, Crystal. *Advancing the Social Economy for Socio-Economic Development: International Perspectives*. Public Policy Paper Series 2009, No. 01 (September 2009). Victoria, Kanada: Canadian Social Economy Hub at the University of Victoria, 2009.
- Wai, Lau Chek. "Montessori's Philosophy of Movement." dalam Charlene Tan (ed.). *Philosophical Reflections for Educators*. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2008. hal. 41-50.
- Walsh, Thomas J. (ed.). *Synchronic and Diachronic Approaches to Linguistic Variation and Change*. Washington, D.C: Georgetown University Press, 1989.
- Xenitidou, Maria, dan Edmonds, Bruce (eds.). *The Complexity of Social Norms*. Heidelberg, New York Dordrecht, London: Springer, 2014.

CATATAN BIOGRAFI PENULIS OLEH MEDIA

Kisah Inspiratif, Anak Penjual Petis Dilantik Jadi Rektor UINSA Surabaya⁵⁵

⁵⁵ Tulisan tentang catatan biografi penulis buku yang di hadapan pembaca ini merupakan artikel pemberitaan yang ditulis dan telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Rabu, 15 Juni 2022 - 05:17 WIB oleh M. Purwadi dengan judul “Kisah Inspiratif, Anak Penjual Petis Dilantik Jadi Rektor UINSA Surabaya”. Untuk selengkapnya kunjungi: <https://edukasi.sindonews.com/read/798349/211/kisah-inspiratif-anak-penjual-petis-dilantik-jadi-rektor-uinsa-surabaya-1655229992>



Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melantik Prof. Akh. Muzakki menjadi Rektor UINSA Surabaya. (Foto/Dok/Kemenag)

JAKARTA - Prof. Akh. Muzakki membuktikan diri bahwa latar belakang ekonomi keluarga yang biasa-biasa saja tidak menghalangi cita-citanya untuk menjadi orang sukses. Saat ini dia berhasil meraih gelar sebagai profesor dan kini dilantik menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Dari kisah Prof. Akh. Muzakki ini bisa diperoleh banyak pelajaran berharga. Pendidikan tinggi bisa diraih oleh siapa pun yang punya semangat.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas baru saja melantik Prof. Akh. Muzakki menjadi Rektor UINSA Surabaya. Proses pelantikan ini dilakukan di Auditorium HM. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta pada Senin (6/6/2022). Prof. Akh. Muzakki atau yang akrab disapa Prof. Zaki ini adalah sosok yang inspiratif dalam karier dan

pengkhidmatannya di dunia pendidikan. Guru besar bidang sosiologi pendidikan UIN Sunan Ampel ini adalah seorang putra penjual petis di Pasar Sidoarjo.

Semangat serta pola hidup yang disiplin menjadikan Prof Zaki bisa meraih kesuksesannya, khususnya di bidang pendidikan. Tak hanya itu, ia juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, aktivis sosial, serta organisasi keagamaan. “Prof. Zaki hampir tiga periode di PWNU. Saya belajar keorganisasian dan kedisiplinan dari Prof. Zaki yang menjabat sebagai Sekretaris PWNU (sekarang di Wasekjen PBNU). Lanjut bersama lagi di MUI Jatim, beliau juga menjadi Sekretaris Umum MUI Jatim. *Alhamdulillah*, kini beliau menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,” komentar Ketua Aswaja Center Jawa Timur K.H. Ma’ruf Khozin melalui akun media sosialnya mengenai sosok Prof. Zaki.

Sebelum dilantik menjadi Rektor UINSA Surabaya, Prof Zaki adalah guru besar termuda di kampus UIN Sunan Ampel. Ia menyandang gelar profesor sejak 1 November 2014 dengan SK Nomor 3755/A4.3/KP/2015 yang ditandatangani oleh Mohamad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kala itu.

Menag melantik Prof Zaki bersama sejumlah rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) lainnya. Dalam kesempatan ini, Menag meminta para rektor untuk menjadi pemimpin yang baik bagi lingkungan kerjanya. “Para rektor dan kepala biro PTKN harus bisa membuktikan bahwa Saudara-Saudara siap memajukan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sesuai tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Saudara,” pesan Yaqut Cholil Qoumas seperti dilansir dari laman kemenag.go.id. Menag menegaskan bahwa PTKN bukanlah perguruan tinggi kelas dua. PTKN memiliki potensi,

peluang dan keunggulan seperti perguruan tinggi lainnya. Hal ini telah dibuktikan dengan capaian beberapa PTKN dengan berbagai prestasi. Menag juga berharap harus bisa mencetak para ahli agama (agamawan) yang sarjana sekaligus sarjana yang agamawan. PTKN juga harus bisa melahirkan intelektual publik yang mempunyai tanggung jawab terhadap masa depan umat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

Lewat postingan Instagram UINSA Surabaya (6/6) dapat dilihat prosesi pelantikan Prof. Zaki sebagai Rektor UINSA Surabaya periode 2022-2026. Dalam kesempatan itu, Prof. Zaki berjanji, “Saya sebagai rektor akan mewakafkan diri saya, tidak sekadar menjadi CEO dari sebuah perusahaan akademik tetapi juga menjadi pelayan bagi kebutuhan perusahaan akademik itu untuk mengantarkan UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi perguruan tinggi yang disegani di Asia.”

Prof. Akh. Muzakki: Jangan Tunduk pada Kemiskinan⁵⁶



Hanya pendidikan yang mampu mengubah kondisi sosial seseorang menjadi lebih baik di tengah masyarakat. Hanyalah orang-orang berilmu yang mampu mengangkat derajat guna berperan aktif di tengah perubahan masyarakatnya. Prof. Akh. Muzakki, Grad Dip. SEA. M. Ag. M.Phil. Ph.D, membuktikan hal tersebut. Guru besar bidang sosiologi pendidikan ini berhasil dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, periode 2022-2026.

Prof. Akh. Muzakki dilantik sebagai Rektor UINSA menggantikan Prof Masdar Hilmy, berdasar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 021232/B.II/3/2022 tertanggal

⁵⁶ Tulisan tentang catatan biografi penulis buku yang di hadapan pembaca ini merupakan artikel pemberitaan pada rubrik “Tokoh” oleh portal berita [ngopibareng.id](https://www.ngopibareng.id) pada Senin, 06 Juni 2022 13:33 WIB. Untuk selengkapnya kunjungi: <https://www.ngopibareng.id/read/prof-akh-muzakki-jangan-tunduk-pada-kemiskinan>

6 Juni 2022. Ia dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Rektor UINSA masa jabatan 2022 sampai dengan 2026.

Berkepribadian tegas dan integritas terjaga, Prof. Akh. Muzakki tak pernah lelah menyampaikan pentingnya pendidikan untuk kemajuan masyarakat. Baginya, cita-cita yang tinggi harus diperjuangkan tanpa lelah.

“Jangan pernah menyerah untuk mencapai apa yang diinginkan. Semua pasti ada jalannya,” tutur Prof. Akh. Muzakki, yang dilantik oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai Rektor UINSA di Jakarta, Senin 6 Juni 2022.

Keluarga Sederhana

Lahir di Sidoarjo 9 Februari 1974 dari pasangan Imam Syafii (almarhum) dan Ibu Zulaicha, Prof. Akh. Muzakki menempa diri dalam pergulatan hidup dari keluarga sederhana. Bahkan, diakuinya, secara materi tidak akan mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang paling tinggi. Dengan kerja keras dan keinginan yang kuat mengalahkan semua itu. “Jangan tertunduk pada kemiskinan. Kemiskinan adalah sebagian dari romantika hidup,” ujar penulis buku *Eduspiring, Sekolah Inspirasi, Hidup Berprestasi* yang terbit 2017.

Karena keinginan kuat itu, Prof. Akh. Muzakki terus belajar dan belajar. Hingga dia tidak pernah membutuhkan uang untuk bisa bersekolah. “Semuanya beasiswa, *free*,” tutur peraih gelar Ph.D dari The University Of Queensland, Australia.

Memang ada kesan jemawa ketika ia selalu menempelkan namanya dengan sederet gelar panjang, meskipun di forum yang tak ada kaitannya dengan dunia akademik. Hal itu semata-mata sebagai bagian dari menebarkan inspirasi kepada publik. Semua itu memang tidak didapat dengan mudah. Prof. Akh. Muzakki mengakui, proses meraih pendidikan tinggi itu

penuh liku. Tak jarang cemoohan pun diarahkan pada dirinya.

Sosok yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA (2018-2022) ini mengakui bahwa sejak kecil hingga masuk kuliah, tidak pernah menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang keren. Ia merampungkan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri, semua di Sidoarjo.

“Saya dari kecil sekolah di madrasah. Zaman dulu mana ada madrasah yang keren, hingga kuliah di UINSA, dulu masih IAIN. Karena, tidak keren itu, saya diejek dan dicibir, mana mungkin bisa sekolah tinggi, sekolahnya saja tidak mutu. Tetapi itu membuat saya termotivasi untuk terus belajar.” Suami Erna Mawati ini juga menambahkan, “Madrasah yang mengajari saya bagaimana menjadi individu yang pintar dan benar sebagai kerangka kesempurnaan seorang hamba yang ideal.”



Prof. Akh. Muzakki, Grad Dip. SEA. M. Ag. M.Phil. bersama para dosen UINSA usai dilantik oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai Rektor UINSA di Jakarta, Senin 6 Juni 2022. (Foto: Istimewa)

Intelektualisme, Tanggung Jawab Sosial

Sebagai kaum terpelajar, Prof. Akh. Muzakki tak hanya bergelut di dunia kampus semata. Ia pun mengambil bagian di tengah masyarakat dengan aktif berorganisasi guna menyalurkan kegelisahan intelektualnya. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Saat belajar di Australia pun ia tidak lepas dari organisasi dengan aktif menjadi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia.

Prof. Akh. Muzakki meyakini bahwa kalangan akademisi akan muncul sebagai pengkritik tajam terhadap kemapanan yang hegemonik. Di situlah peran-peran intelektual menjadi bagian penting dalam perubahan masyarakat. Tentu perubahan ke arah perbaikan-perbaikan menuju kemajuan. Sebagai bagian kelas menengah di Indonesia, peraih gelar master of philosophy (MPhil) dari Australian National University (ANU) ini berkeyakinan bahwa kalangan intelektual kampus justru berpotensi untuk menjadi kritis terhadap segala bentuk hegemoni kemapanan. “Sentralnya semangat dan nilai kebebasan akademik yang mereka miliki dan junjung tinggi sebagai bagian dari civitas akademika dalam posisi mereka sebagai penjaga moral sosial.”



Prof. Akh. Muzakki, Grad Dip. SEA. M. Ag. M.Phil. dilantik dilantik sebagai Rektor UINSA oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Senin 6 Juni 2022. (Foto: Istimewa)

Sikap Kritis

Memang, kalangan akademisi memiliki tanggung jawab untuk melakukan kritik terhadap segala bentuk penyimpangan moral sosial. Seiring dengan karakter tipikal umum kelas menengah sebagai kelompok sosial yang paling “cerewet”, kritis, dan “tidak tahan” terhadap kebobrokan. Potensi akademisi dengan kekuatan gagasan dan kapasitas artikulasinya pun sangat potensial untuk menjadi penggerak atas terjadinya sebuah perubahan. Kaum terpelajar—kini di antaranya berwujud dalam profesi akademisi—berperan sebagai elemen penting bagi perubahan Indonesia menyusul posisi mereka sebagai kelas menengah.

“Dari sisi aspirasi, akademisi merepresentasikan sebuah kelompok kelas menengah. Kritisisme sangat lekat dengan karakter akademisi, sebagaimana kelompok kelas menengah pada umumnya,” tutur mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa

Timur ini.

Perubahan sosial digerakkan, antara lain, dari kalangan Kelas Menengah. Prof. Akh. Muzakki mengingatkan, moralitas sosial publik tampak menjadi pertimbangan bagi lahirnya kritisisme di sejumlah kalangan akademisi. Orang pun akhirnya mempersepsi kekuatan kalangan akademisi sebagai kekuatan moral. Sikap kritis bagi kaum intelektual terejawantah dalam gagasan-gagasan yang ditulis, baik di media massa (surat kabar, majalah dan jurnal) maupun dalam bentuk buku.

“Ketahuilah apa yang kamu tulis, jangan tulis apa yang kamu ketahui,” pesan Prof. Akh. Muzakki, mengajak merenung bersama.

